

**M. Yusuf Wibisono
Ahmad Gibson Albustomi
Ruslan Moh. Yunus**

AGAMA DAN PEMULIHAN PASCA-KONFLIK: KAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL



Penerbit: Gunung Djati Publishing

**AGAMA DAN PEMULIHAN
PASCA-KONFLIK:
KAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL**

**M. Yusuf Wibisono
Ahmad Gibson Albustomi
Ruslan Moh. Yunus**

**GUNUNG DJATI PUBLISHING
2024**

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Agama dan Pemulihan Pasca-Konflik: Kajian Pembangunan Sosial

Penulis:

M. Yusuf Wibisono
Ahmad Gibson Albustomi
Ruslan Moh. Yunus

Editor:

M. Taufiq Rahman

Desain Sampul & Tata Letak:

Paelani Setia

ISBN 978-623-5485-90-4 (PDF)

ISBN 978-623-5485-90-4 (PDF)



Diterbitkan September 2024

Oleh:

Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung

Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, September 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dalam kesempatan ini, marilah kita mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang. Dengan bimbingan-Nya, kita dapat memahami pentingnya nilai-nilai agama dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

Buku ini hadir sebagai sumbangan pemikiran dalam memahami peran agama dalam proses pemulihan pasca-konflik. Dalam konteks global yang semakin kompleks, konflik sosial yang bersifat agama menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian serius. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara agama, konflik, dan pembangunan sosial, diharapkan pembaca dapat menangkap esensi peran agama sebagai jembatan perdamaian dalam masyarakat yang beragama.

Di dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menyelami berbagai konsep penting, mulai dari bagaimana agama dapat berfungsi dalam pemulihan pasca-konflik, hingga teori pembangunan sosial yang relevan. Kajian kasus konflik di Poso, Sulawesi Tengah, memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan upaya yang dilakukan dalam konteks rekonsiliasi. Dari sejarah panjang ketegangan hingga peran masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam menciptakan perdamaian, setiap bab dirancang untuk menyajikan informasi yang komprehensif dan mendalam.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para peneliti, mahasiswa, dan praktisi yang ingin memahami lebih jauh tentang dinamika konflik agama dan peran agama dalam pembangunan sosial. Semoga dengan terbitnya buku ini, kita semua dapat lebih menghargai pentingnya dialog dan kerjasama antaragama dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati upaya kita dalam menciptakan dunia yang penuh kedamaian dan persatuan.

Bandung, September 2024

Para Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Agama sebagai Jembatan Perdamaian..... | 1 |
| B. Signifikansi Buku Ini..... | 3 |
| BAB II KONSEP AGAMA, KONFLIK, DAN PEMBANGUNAN SOSIAL | 5 |
| A. Agama dan Pemulihan Pasca-Konflik..... | 5 |
| B. Konflik Agama | 35 |
| C. Teori Pembangunan Sosial | 37 |
| D. Peran Pemerintah dalam Konflik Agama | 69 |
| BAB III KASUS KONFLIK AGAMA: PENGALAMAN DI POSO SULAWESI TENGAH | 82 |
| A. Konflik di Kabupaten Poso | 82 |
| B. Kondisi Umum Pasca Konflik..... | 86 |
| BAB IV KONFLIK AGAMA DAN ETNIS: KONTRIBUSINYA TERHADAP KEKERASAN DAN KERUSUHAN SOSIAL | 88 |
| A. Sejarah Panjang Ketegangan | 88 |
| B. Perpecahan: Dampak Konflik..... | 93 |
| BAB V REKONSILIASI PASCA-KONFLIK | 98 |
| A. Dinamika Sosial Pasca-Konflik..... | 98 |
| B. Peran Masyarakat Sipil dalam Rekonsiliasi Pasca-Konflik | 102 |
| C. Peran Lembaga Keagamaan dalam Rekonsiliasi Pasca-Konflik..... | 106 |
| BAB VI PENUTUP | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Agama sebagai Jembatan Perdamaian

Peran agama dalam pemulihan konflik sosial merupakan subjek yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang telah menjadi fokus penelitian yang luas. Kelompok agama telah terlibat dalam mengelola proses pemulihan kebenaran di berbagai situasi pasca-konflik, seperti di Amerika Latin, di mana mereka memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi dan penyembuhan.¹

Selain itu, ada juga riset yang menunjukkan bahwa konflik agama dapat membentuk represi negara, karena konflik tersebut meningkatkan ancaman perilaku yang ditimbulkan oleh kelompok agama dan mengurangi dampak penindasan terhadap komunitas tersebut.² Lebih lanjut, hubungan antara agama dan kohesi sosial sangat kontekstual dan terus berkembang, seiring dengan globalisasi agama dan munculnya komunitas keagamaan transnasional yang mempengaruhi dinamika kohesi sosial lokal.³

Dalam konteks pembangunan perdamaian, peran agama sebagian besar dilihat sebagai kegiatan pasca-konflik, dengan fokus pada rekonsiliasi dan rekonstruksi tekstur masyarakat, sementara peran preventif dari keterlibatan antaragama dalam konflik yang berkepanjangan belum banyak dibukukan.⁴ Ada juga kajian yang menyoroti pentingnya masyarakat sipil dalam memutus siklus kekerasan di wilayah pasca-konflik, dan menekankan perlunya melibatkan berbagai kelompok, termasuk organisasi keagamaan, dalam upaya mitigasi konflik untuk mencapai kohesi sosial.⁵

¹ Nukhet Sandal, 'Post-Conflict Processes and Religion: An Overview', *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2019.

² Peter S Henne and Jason Klocek, 'Taming the Gods: How Religious Conflict Shapes State Repression', *Journal of Conflict Resolution*, 63.1 (2019), 112–38.

³ Fletcher D Cox, Catherine R Orsborn, and Timothy D Sisk, 'Religion, Peacebuilding, and Social Cohesion in Conflict-Affected Countries', *Denver: University of Denver*, 2014.

⁴ Sara Silvestri and James Mayall, 'The Role of Religion in Conflict and Peacebuilding' (British Academy, 2015).

⁵ Agus Trihartono and Nino Viartasiwi, 'Engaging the Quiet Mission: Civil Society in Breaking the Cycle of Violence in the Post-Conflict Poso, Indonesia', *Procedia Environmental Sciences*, 28 (2015), 115–23.

Sejarah panjang agama dan konflik di Indonesia terutama bisa kita pelajari dari konflik di Poso, Sulawesi Tengah, yang memiliki sejarah konflik etno-agama yang penuh kekerasan, yang berdampak signifikan terhadap tatanan sosial dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.⁶

Hal penting yang kita harus renungkan ialah proses pemulihan pasca konflik di Poso yang ditandai dengan upaya membangun kembali kepercayaan sosial dan memupuk perdamaian di antara berbagai komunitas. Organisasi dan pemimpin keagamaan telah memainkan peran penting dalam upaya ini, dengan memanfaatkan pengaruh dan sumber daya mereka untuk mendorong rekonsiliasi dan kohesi sosial.⁷

Terlepas dari itu semua, buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran agama dalam pemulihan pasca konflik dengan fokus pada aspek-aspek berikut: (1) Pengaruh nilai-nilai dan norma-norma agama: Buku ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai dan norma-norma agama mempengaruhi proses pembangunan perdamaian dan berkontribusi terhadap rekonsiliasi antar komunitas yang berbeda.⁸ (2) Interaksi antara pemuka agama, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya: Ke depan buku ini akan menyelidiki hubungan antara pemuka agama, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam tata kelola dan rekonstruksi pasca-konflik, dengan menyoroti peran dan tanggung jawab mereka masing-masing.⁹

Dengan menyelidiki peran agama dalam pemulihan pasca-konflik buku ini berharap bisa memberikan kontribusi pada pemahaman tentang interaksi yang kompleks antara agama dan pemulihan pasca-konflik, yang mempunyai implikasi terhadap kebijakan dan praktik dalam konteks serupa.¹⁰ Buku ini bisa

⁶ Dwia Aries Tina Pulubuhu and others, 'Social Trust of Indonesia's Post Conflict Society: A Case Study of Poso Regency', *CCER*, 2019, 276.

⁷ Putri Ariza Kristimanta, 'Grass-Roots Post-Conflict Peacebuilding: A Case Study of Mosintuwu Women's School in Poso District, Central Sulawesi, Indonesia', in *Decolonising Conflicts, Security, Peace, Gender, Environment and Development in the Anthropocene* (Springer, 2021), pp. 569–90.

⁸ John Mwangi Githigaro, 'Faith-Based Peacebuilding: A Case Study of the National Council of Churches of Kenya', *Peace and Conflict Studies*, 19.1 (2012), 93–120.

⁹ Kristimanta; Pulubuhu and others.

¹⁰ Don Rugar, 'Role of Religious Organizations in Conflict and Peacebuilding in Sub-Saharan Africa: A Case Study of the Catholic Church and the Islamic Religion.' (University of Nairobi, 2020).

dikonsumsi oleh kalangan luas terutama masyarakat umum agar sama-sama bisa belajar akan hikmah dari adanya sebuah konflik.

Karenanya, buku ini bertujuan untuk menyelidiki peran agama dalam pemulihan pasca-konflik. Penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dan norma-norma agama mempengaruhi proses pembangunan perdamaian dan berkontribusi terhadap rekonsiliasi. Kita juga mempelajari interaksi antara pemimpin agama, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam tata kelola dan rekonstruksi pasca-konflik.

Sebagian besar isi buku ini adalah akan menguraikan bagaimana resolusi dan kehidupan pasca konflik. Kami para penulis akan lebih banyak belajar dari konflik di Poso, Sulawesi Tengah, yang kala itu diwarnai dengan ketegangan agama dan etnis yang berujung pada kekerasan dan keresahan sosial.

Upaya pemulihan pasca-konflik di sana terfokus pada pembangunan sosial, pembangunan perdamaian, dan peran masyarakat sipil, dengan beberapa keberhasilan dalam mengatasi kepercayaan sosial dan memahami akar konflik di wilayah tersebut.

Pada kesimpulannya kami akan menguraikan peran agama dalam membentuk upaya pemulihan pasca-konflik dan potensi perdamaian jangka panjang dan kohesi sosial. Kami berharap masyarakat akan membacanya sebagai bagian mempertajam pemahaman tentang keterkaitan yang kompleks antara agama dan pemulihan pasca-konflik, yang mempunyai implikasi terhadap kebijakan dan praktik dalam konteks serupa.

B. Signifikansi Buku Ini

Buku ini memiliki signifikansi yang mendalam dan relevan, terutama dalam konteks dunia yang semakin terfragmentasi oleh konflik sosial, terutama yang berakar dari perbedaan agama dan etnis. Buku ini membahas berbagai aspek, mulai dari konsep agama dan pembangunan sosial hingga analisis mendetail mengenai kasus konflik di Poso, Sulawesi Tengah sebagai pembelajaran, buku ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang holistik tentang peran agama dalam pemulihan pasca-konflik. Melalui kajian ini, pembaca diajak untuk merenungkan betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam menciptakan ruang dialog yang konstruktif di antara komunitas yang berbeda, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses rekonsiliasi dan pemulihan sosial.

Dalam bab-bab awal, pembaca akan diperkenalkan dengan konsep-konsep fundamental yang menghubungkan agama dengan pembangunan sosial. Hal ini menjadi krusial, karena pemahaman yang kuat tentang interaksi ini dapat membantu kita menyadari bagaimana norma-norma agama dapat mendorong terciptanya kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik. Dalam konteks ini, signifikansi buku ini bukan hanya terletak pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana pemahaman ini dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan di masyarakat.

Khususnya dalam bab yang membahas kasus Poso, buku ini mengungkapkan bagaimana pengalaman nyata dari masyarakat yang pernah mengalami konflik dapat menjadi pelajaran berharga bagi komunitas lain. Dengan menggali kondisi pasca-konflik di Poso dan peran aktif masyarakat sipil serta lembaga keagamaan dalam proses rekonsiliasi, buku ini memberikan wawasan yang dapat diadaptasi dan diterapkan di berbagai konteks lain di seluruh dunia. Hal ini sangat penting untuk diakses oleh masyarakat luas, karena memberi mereka alat untuk memahami dan mengatasi tantangan yang serupa.

Selain itu, dengan memasukkan perspektif tentang keterlibatan pemerintah dan dinamika sosial di Poso, buku ini juga menyentuh aspek penting dari tata kelola konflik dan pembangunan perdamaian. Dalam konteks ini, pembaca tidak hanya diperkenalkan pada masalah, tetapi juga pada solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan. Ini menjadikan buku ini sebagai sumber daya yang tidak hanya informatif tetapi juga praktis, bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis yang berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih damai.

Dengan demikian, signifikansi buku ini terletak pada kemampuannya untuk menjembatani pemahaman teoretis dan praktik nyata dalam upaya pemulihan pasca-konflik. Dengan menjadikannya sebagai bacaan yang *accessible* bagi masyarakat umum, kita berharap buku ini dapat berkontribusi dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya kerukunan, dialog antaragama, dan upaya bersama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan cara ini, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai pendorong aksi nyata dalam upaya perdamaian global.

BAB II KONSEP AGAMA, KONFLIK, DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

A. Agama dan Pemulihan Pasca-Konflik

Agama memiliki potensi untuk menjadi alat pemicu konflik atau pembawa damai. Bahkan di antara kelompok yang saling bertikai, seperti Protestan dan Katolik di Irlandia Utara, perpecahan tidak selalu disebabkan semata oleh keyakinan agama.¹¹ Di kawasan dengan populasi yang jarang, seperti Timur Tengah, Irlandia Utara, Balkan, Sudan, Indonesia, dan Kashmir, agama sering kali menjadi faktor signifikan dalam konflik kekerasan, baik karena motif agama itu sendiri maupun karena kepentingan politik.

Aktivis agama sering kali menunjuk agama sebagai penyebab utama dari perbedaan dan perselisihan di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Banyak riset menunjukkan bahwa keyakinan agama memiliki peran besar dalam memicu konflik kekerasan yang terjadi saat ini.¹² Smock mengemukakan pertanyaan mengenai apakah perang antar komunitas di Irlandia Utara, Bosnia, Sri Lanka, dan Kashmir benar-benar dipicu oleh perbedaan agama, seperti yang sering diklaim oleh para analis, atau apakah ada faktor lain seperti tanah, minyak, etnis, atau kenangan sejarah yang menjadi penyebabnya.¹³

Menurut Smock, agama dapat memicu konflik melalui dua cara utama. *Pertama*, agama membentuk kesetiaan dan identitas kelompok yang berperang, sehingga menciptakan jalan bagi terjadinya perang. *Kedua*, agama dapat langsung memicu kekerasan dengan mengungkap loyalitas, identitas, dan agenda politik masyarakat yang terlibat dalam konflik.¹⁴

Dalam beberapa kasus, seperti konflik intra-Muslim di Iran dan Aljazair, agama sering dianggap sebagai penentu tujuan, meskipun bukan merupakan

¹¹ David R Smock, *Religious Contributions to Peacemaking: When Religion Brings Peace, Not War* (US Institute of Peace, 2006), LV.

¹² Isak Svensson, *Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars* (University of Queensland Press (Australia), 2012).

¹³ Sebastian Lippez-De Castro, 'Intrastate Armed Conflicts and Government Decentralization: A Cross-National Longitudinal and Panel Data Analysis, 1950-2010' (State University of New York at Binghamton, 2022).

¹⁴ Sumanto Al Qurtuby, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas* (Routledge, 2016).

komunitas yang terlibat secara langsung.¹⁵ Di wilayah-wilayah ini, agama membentuk identitas dan loyalitas masyarakat, memungkinkan para pemimpin agama untuk berperan dalam mobilisasi masyarakat bersama pengusaha politik. Dimensi kedua adalah bahwa agama dapat mendefinisikan ambisi politik, menunjukkan bagaimana agama memiliki peran historis dalam mendorong perubahan politik dan sosial.

Menurut Smock, dalam banyak konflik, agama dan identitas sering berkolaborasi dalam kelompok agama, sementara gerakan-gerakan yang merespon perubahan politik melihat konflik sebagai hasil akhirnya. Kesetiaan beragama dapat memperoleh makna baru dengan mengubah frustrasi politik, ekonomi, budaya, dan sosial menjadi keluhan berbasis identitas. Keluhan-keluhan ini kemudian menjadi tujuan spesifik dalam konflik politik-militer yang sering kali diperburuk oleh skala besar konflik tersebut.¹⁶

Konflik yang berakar dari agama cenderung berkembang menjadi konflik nilai. Beberapa penulis berpendapat bahwa kekerasan politik yang dipicu oleh inspirasi agama sering kali berakibat buruk, penuh bias, dan sangat kejam. Konflik nilai merupakan permasalahan yang saling menguntungkan atau merugikan karena melibatkan pendirian yang tegas mengenai arah yang benar dan salah.¹⁷ Dalam situasi ini, individu enggan mencapai titik temu dan mengatasi permasalahan mereka, sehingga konflik nilai tidak dapat diselesaikan dengan metode distributif dan pragmatis seperti konflik sumber daya.

Meskipun agama dapat berperan dalam menyelesaikan konflik dan memelihara perdamaian, agama bisa dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, sebagai alat yang menjadi penengah dalam sebagian besar konflik, dan *kedua*, sebagai alat yang dapat membawa perdamaian di suatu wilayah. Contohnya, di

¹⁵ Dino Krause, Isak Svensson, and Göran Larsson, 'Why Is There So Little Shia-Sunni Dialogue? Understanding the Deficit of Intra-Muslim Dialogue and Interreligious Peacemaking', *Religions*, 10.10 (2019), 567.

¹⁶ Peter Suwarno, 'Resolving Religious Conflicts through Expanding Inter-Religious Communication: Issues and Challenges', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 43.2 (2005), 309-25.

¹⁷ Suwarno.

Mozambik dan Nigeria, agama berperan dalam mendamaikan komunitas-komunitas yang berkonflik.¹⁸

Pada akhirnya, perdamaian dan kohesi sosial tercapai, sehingga membangun landasan yang kuat bagi pembangunan dan kemajuan manusia. Kasus-kasus di Israel, Palestina, Sudan, Irak, Nigeria, Makedonia, dan Sudan menunjukkan betapa pentingnya kontribusi agama dalam membangun dunia yang damai. Meskipun kontribusi agama dalam memelihara perdamaian tidak selalu memberikan solusi akhir, namun dapat mendukung upaya perdamaian sekuler secara produktif.¹⁹

Berdasarkan keyakinan dan otoritas moral yang dimiliki, banyak organisasi keagamaan dan pemimpinnya berasal dari basis konstituen yang luas; mereka berada dalam posisi yang ideal untuk memfasilitasi dan mendukung rekonstruksi wilayah pasca-konflik serta menawarkan bantuan dalam proses rekonsiliasi. Dalam konteks Afrika Barat, seperti di Guinea dan Sierra Leone yang dilanda perang saudara, serta Liberia yang terus mengalami kekerasan sipil, berbagai kelompok agama, termasuk Muslim, Protestan, dan Katolik, bersatu untuk memberikan kepemimpinan dan sumber daya dalam membangun kembali masyarakat dan mendukung para pengungsi.²⁰

Jaringan keagamaan ini memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan perdamaian melintasi batas-batas regional dan nasional. Di Kenya, pasca kekerasan pemilu, anggota Dewan Nasional Gereja-Gereja Kenya (NCCCK) terlibat dalam berbagai program pembangunan perdamaian. Mereka memberikan dukungan kemanusiaan, seperti bantuan makanan dan non-makanan bagi para pengungsi internal, serta dukungan psikososial melalui konseling dan seni pertunjukan untuk membantu mengurangi trauma sosial akibat kekerasan.²¹

NCCCK fokus pada promosi perdamaian baik di tingkat nasional maupun lokal. Di tingkat nasional, dewan ini terlibat dalam pemulihan perdamaian dengan menjadi pihak dalam dialog yang melibatkan pihak-pihak yang

¹⁸ Jeffrey Haynes, 'Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia', *Commonwealth & Comparative Politics*, 47.1 (2009), 52–75.

¹⁹ Rugar.

²⁰ George Klay Kieh Jr, 'Civilians and Civil Wars in Africa: The Cases of Liberia, Sierra Leone, and Côte D'Ivoire', *Peace Research*, 2016, 203–28.

²¹ Githigaro.

berselisih serta berpartisipasi dalam forum mediasi yang dipimpin oleh Uni Afrika. Mereka juga memberikan masukan tentang mekanisme keadilan transisi.²²

Di tingkat lokal, dewan ini bermitra dengan pemimpin agama lain, termasuk komunitas Muslim dan Hindu, untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang di antara komunitas yang bertikai melalui forum dialog dan pertemuan perdamaian. Tulisan ini, oleh karena itu, menyoroti upaya Dewan Nasional Gereja-Gereja Kenya (NCCCK) dalam mempromosikan perdamaian pasca kekerasan pemilu di Kenya.²³

Dengan demikian, agama dapat dilihat sebagai faktor yang memecah belah, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga perdamaian dan kohesi sosial, serta sebagai faktor dalam konflik. Meskipun peran agama dalam memicu konflik sering dilebih-lebihkan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dekade sebelumnya, puluhan ribu orang tewas dalam perang yang dilandasi oleh agama. Kekerasan ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap agama, menggambarkannya sebagai pemicu utama sebagian besar konflik internasional.²⁴

Peran lembaga dan pemimpin agama sering diabaikan dalam upaya mempromosikan dan memelihara perdamaian. Lembaga-lembaga dan pemimpin agama dapat bertindak sebagai mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik dengan menghubungkan komunikasi, memberikan solusi perdamaian, dan menyediakan pelatihan mekanisme perdamaian. Meskipun agama sering dianggap sebagai pemicu kekerasan, seperti yang terjadi di Sudan (di mana konflik terjadi antara Kristen dan Muslim), baik agama tradisional Afrika maupun agama modern dapat menjadi solusi untuk perang saudara dan konflik di Afrika.²⁵

²² Aemro Tenaw, 'The Role of Religious Institutions for Conflict Management: Experience of National Council of Churches of Kenya', *International Journal of Humanities, Art and Social Studies (IJHAS)*, 3.1 (2018).

²³ Aemro Tenaw, 'The Role of Religious Institutions for Conflict Management: Experience of National Council of Churches of Kenya', *International Journal of Humanities, Art and Social Studies (IJHAS)*, 3.1 (2018).

²⁴ Susan Mbula Kilonzo, 'The Potential Of The Church As A Community Institution In Peacebuilding In Africa. Lessons From Kenya's Ethnic Conflicts', *New Europe College Yearbook*, 11, 2011, 241–79.

²⁵ Jeffrey Haynes, 'Religion, Ethnicity and Civil War in Africa: The Cases of Uganda and Sudan', *The Round Table*, 96.390 (2007), 305–17.

Studi menunjukkan bahwa selama kekerasan pasca pemilu di Kenya, Dewan Nasional Gereja-Gereja Kenya (NCCCK) melakukan berbagai tugas kemanusiaan dan upaya pembangunan perdamaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Githigaro menjelaskan bahwa tanggapan segera terhadap kekerasan tersebut adalah memberikan bantuan kemanusiaan seperti dukungan makanan dan non-makanan kepada para korban.²⁶

Kemudian, dukungan psikososial diberikan untuk membantu mereka yang mengalami kehilangan orang yang dicintai dan penderitaan fisik serta emosional. Para pemimpin gereja dan pemangku kepentingan lainnya juga mengadakan forum komunitas untuk mencegah remaja terlibat dalam kekerasan. Sebagai bagian dari program penyembuhan dan rekonsiliasi, NCCCK menyediakan dukungan psikososial kepada korban kekerasan untuk membantu mereka pulih dari trauma.²⁷

Kemampuan agama untuk membawa perdamaian dapat dianalisis melalui dua pendekatan. *Pertama*, peran kelompok agama dalam konflik, seperti yang telah dibahas sebelumnya. *Kedua*, bagaimana agama dapat membantu menjaga perdamaian. Bagian ini mengeksplorasi bagaimana keyakinan agama dapat meningkatkan kebaikan terhadap umat manusia dan alam secara umum. Berbagai organisasi kemanusiaan menerapkan keyakinan agama sebagai dasar mereka, dan melalui penerapan ini, mereka dapat membawa perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai.²⁸

Sejak zaman kuno, masyarakat telah memanfaatkan keyakinan agama mereka untuk mendukung upaya mencapai perdamaian. Meskipun ada bukti bahwa agama bisa memicu konflik, agama juga berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk mengekspresikan aktivitas perdamaian mereka.

Martin Luther King Jr., dalam pidato penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian, mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu hari nanti setiap orang akan berlutut di hadapan Tuhan dan dihargai atas usaha mereka dalam

²⁶ Philemon Kipkogei Samoei, 'The Role Of Religious Organizations In Electoral Conflicts In The Horn of Africa Region: A Case Study Of NCCCK In Kenya's 2017 Election' (University of Nairobi, 2018).

²⁷ Nyongesa Michael Wafula, 'The Role Of The Church In Promoting Reconciliation In 2008-2013 Post-Election Violence Kenya', *Unpublished Thesis*. University Of Nairobi, Kenya, 2014.

²⁸ S Ayse Kadayifci-Orellana, 'Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution', *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 2009, 264–84.

mengatasi perang dan pertumpahan darah.²⁹ Dia mengutip kitab Mika 4:4 dari Alkitab, yang berbunyi, “*Singa dan anak domba akan berbaring bersama, dan masing-masing akan duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dan tidak ada yang akan takut.*”³⁰ Keyakinan ini menjadi motivasi utama bagi karya-karyanya.

Dalai Lama, dalam pidatonya di New Delhi di Smile Foundation, menekankan pentingnya menggabungkan pendidikan modern dengan pengetahuan kuno India untuk mencapai ketenangan pikiran. Dia berbicara tentang tanggung jawab universal dan kasih sayang, yang menurutnya, tidak hanya memengaruhi masa lalu, tetapi juga membantu membentuk masa depan yang lebih penuh kasih, bahagia, dan damai dibandingkan dengan abad sebelumnya.³¹ Pernyataan Dalai Lama ini memiliki dua aspek keagamaan: satu merujuk pada konsep budaya dan agama dari pengetahuan kuno India, dan yang lain berasal dari otoritas agama yang dijalkannya.

Efisiensi dan efektivitas agama dalam memasukkan dimensi perdamaian menjadi fokus penting dalam penyelesaian konflik. Menurut teori akademis tentang “*hubungan antara agama dan pembangunan perdamaian,*” agama dapat memupuk empati dan kasih sayang melalui ajarannya, serta menginspirasi pihak-pihak yang bertikai untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dan berdamai.³² Para pemimpin dan lembaga agama, yang dekat dengan masyarakat, lebih memahami dimensi konflik dan cara membawa perdamaian.

Agama memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik, tidak hanya melalui ajarannya, tetapi juga melalui penerapan fungsinya. Pesan-pesan keagamaan yang positif, serta individu yang memiliki otoritas, rasa hormat, dan karisma, sangat berharga dalam resolusi atau pengaruh konflik. Namun, penggunaan otoritas agama dalam penyelesaian konflik juga memiliki

²⁹ Martin Luther King Jr, ‘Nobel Peace Prize Acceptance Speech’, *Online*:< [Http://Www. Nobelprize. Org/Nobel_prizes/Peace/Laureates/1964/Kingacceptance_en. Html](http://www.nobelprize.org/Nobel_prizes/Peace/Laureates/1964/Kingacceptance_en.html)> Accessed on July, 10 (1964), 2015.

³⁰ Paul Haupt, ‘The Book of Micah’, *The American Journal of Semitic Languages and Literatures*, 27.1 (1910), 1–63.

³¹ John F Kennedy and Dalai Lama, ‘Those Who Make Peaceful Revolution Impossible Will Make Violent Revolution Inevitable’, 1962.

³² William T Dickens, ‘Frank Conversations: Promoting Peace Among the Abrahamic Traditions Through Interreligious Dialogue’, *Journal of Religious Ethics*, 34.3 (2006), 397–420.

risiko. Para pemimpin agama mungkin dianggap sebagai boneka oleh umatnya, sehingga kehilangan kredibilitas dan relevansi dalam penyelesaian konflik.

Penyelesaian Konflik melalui Dimensi Agama

Perdamaian dan rekonsiliasi adalah elemen kunci dalam identitas agama, menjadikannya komponen utama bagi pelaku agama dalam membangun perdamaian. Dalam agama Kristen, nilai-nilai utama yang mendasari rekonsiliasi meliputi pengampunan dan belas kasihan.³³ Kedua konsep ini dapat ditemukan dalam kitab suci, seperti Mazmur 85 dan ajaran Yesus Kristus dalam Injil. Umat Kristiani diajarkan untuk saling mengampuni agar mendapatkan pengampunan dari Tuhan, serta menunjukkan belas kasihan sebagaimana Tuhan telah berbelas kasih kepada mereka.³⁴

Dalam Islam, nilai-nilai fitrah dan suhl berperan penting dalam rekonsiliasi dan dapat ditemukan dalam hadis serta Al-Quran. Fitrah mengacu pada tanggung jawab individu untuk menegakkan perdamaian melalui perbuatan baik dan partisipasi dalam membangun kerukunan. Suhl, yang berarti rekonsiliasi, berjalan seiring dengan fitrah, mendorong masyarakat untuk memaafkan pelaku kesalahan dan mendamaikan mereka kembali demi terciptanya masyarakat yang harmonis.³⁵

Agama menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik, dengan mengarahkan orang untuk berbuat baik dan mendirikan organisasi kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan dimensi agama, penyelesaian konflik dapat menemukan titik terang karena agama memainkan peran penting dalam berbagai aspek konflik.

Institut Perdamaian Amerika Serikat (USIP) telah mendokumentasikan berbagai upaya penyelesaian konflik yang berhasil. Seminar dan diskusi meja bundar di Kashmir, misalnya, telah mempertemukan para pemimpin masyarakat sipil dengan mempertimbangkan keyakinan tradisional mereka

³³ Raymond G Helmick and Rodney Petersen, *Forgiveness & Reconciliation: Public Policy & Conflict Transformation* (Templeton Foundation Press, 2018).

³⁴ George Mlakuzhyil, 'Jesus Christ in the Gospels', in *Christianity* (Springer, 2024), pp. 498–510.

³⁵ Mary A Suhl, 'Grassroots Intellectualism: "International Youth Meeting Dachau" as a Case Study for Holocaust Education and Awareness through Para-Educational Activities', 2013.

terkait perdamaian dan isu-isu kehidupan positif.³⁶ Orang-orang dari berbagai latar belakang menghadiri seminar ini, membangun hubungan yang bermakna dengan para pemimpin lainnya.

Teknik mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk berunding telah diterapkan di berbagai negara. Di Irak, pendirian Institut Perdamaian Irak; di Nigeria, Pusat Mediasi Antaragama di bawah kepemimpinan Pastor Weyu dan Imam Mohammed Ashafa; serta di Sudan bersama Dewan Gereja Sudan Baru adalah beberapa contohnya.³⁷

Meskipun upaya ini telah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, hasil yang diharapkan belum tercapai karena kurangnya tindakan nyata. Perdamaian tidak hanya dapat dicapai melalui dialog, tetapi juga memerlukan tindakan nyata yang melibatkan persatuan dengan partai politik nasional dan internasional serta pihak-pihak lainnya.

Pusat Dialog Antaragama dan Antar Budaya Internasional Raja Abdullah Bin Abdulaziz (KAICIID) adalah organisasi yang diakui atas kesuksesannya dalam menyelesaikan berbagai konflik.³⁸ KAICIID mengkoordinasikan inisiatif lintas agama dan menciptakan Forum Dialog Antar Agama untuk Perdamaian di Nigeria, serta memainkan peran besar dalam melatih para pemimpin agama dan masyarakat sipil untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni antaragama.³⁹ Mereka juga telah membangun dialog antaragama dan jaringan perdamaian di Myanmar, mengembangkan panduan studi perdamaian, dan menilai kebutuhan masyarakat.

Prestasi KAICIID dalam penyelesaian konflik sangat banyak. Meski KAICIID dan USIP menggunakan teknik yang sama, KAICIID lebih berhasil

³⁶ Stuti Bhatnagar and Priya Chacko, 'Peacebuilding Think Tanks, Indian Foreign Policy and the Kashmir Conflict', in *Rising Powers and State Transformation* (Routledge, 2020), pp. 100–119.

³⁷ Dr Catherine Dale, *Operation Iraqi Freedom: Strategies, Approaches, Results, and Issues for Congress* (Congressional Research Service Washington DC, 2008).

³⁸ Ishanesu Sextus Gusha, 'KAICIID: An Emerging Significant Player in Global Interfaith and Development Initiatives', in *Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa* (Springer, 2022), pp. 65–80.

³⁹ Jocelyn Widmer, *Investing in Young Children for Peaceful Societies: Proceedings of a Joint Workshop by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; UNICEF; and the King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue* (National Academies Press, 2016).

karena mereka melibatkan pemerintah dalam pekerjaan mereka dan pendekatan mereka lebih berbasis agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi faktor kunci dalam penyelesaian konflik dan bahwa dimensi agama dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik.⁴⁰

Agama dan Konflik

Agama merupakan komponen utama dalam identitas individu dan kelompok, meskipun maknanya tidak tunggal. 'Aktor keagamaan' mencakup tokoh agama/spiritual arus utama, masyarakat adat, lembaga dan asosiasi, organisasi non-pemerintah (LSM), serta jaringan informal dan kelompok pemuda di tingkat komunitas.⁴¹ Aktor-aktor ini memainkan peran penting sebagai pemangku kepentingan utama dalam masyarakat di mana sering kali mereka lebih dipercayai dibandingkan aktor pemerintah sekuler.

Dalam tulisan ini, istilah 'aktor-aktor agama' akan digunakan untuk mencakup berbagai peran tersebut. Banyaknya konflik ideologi di dunia membuktikan bahwa agama tidak bisa diabaikan dalam kajian manajemen konflik.⁴²

Menurut Appleby, agama merupakan kesatuan budaya yang mampu membentuk identitas pribadi dan sosial serta sangat mempengaruhi pengalaman dan tindakan selanjutnya.⁴³ Campuran keyakinan dan nilai-nilai, kekuasaan pemimpin, rasa memiliki terhadap suatu kelompok, serta partisipasi atau hubungan seseorang dengan lembaga dan jaringan keagamaan membentuk identitas keagamaan.

Jejak Kekerasan dalam Sejarah Kristen

Sejarah gereja Kristen, terutama dari Abad Pertengahan hingga Renaisans, dipenuhi dengan konfrontasi kekerasan dan pertumpahan darah.

⁴⁰ Sarah L Markiewicz, 'Preaching to the Converted? Interfaith Dialogue vs. Interfaith Realities', *Emergent Religious Pluralisms*, 2019, 251–78.

⁴¹ Sinah Theres Kloß, 'Giving and Development: Ethno-Religious Identities and 'Holistic Development' in Guyana', in *Faith-Based Organizations in Development Discourses and Practice* (Routledge, 2019), pp. 113–38.

⁴² Shinde Kiran Ajit, 'Quest for Good Governance: Contribution and Potential of Religious Institutions as Stakeholders', in *Monash Governance Research Unit Conference*, 2004, XXVII, 1–15.

⁴³ R Scott Appleby, 'Religions, Human Rights and Social Change', in *The Freedom to Do God's Will* (Routledge, 2003), pp. 197–229.

Dari pergerakan reformasi radikal Martin Luther hingga konflik “Perang Suci,” perbedaan keyakinan agama sering kali berujung pada kekerasan.⁴⁴

Salah satu contoh paling mencolok adalah Perang Salib, yang dimulai setelah konferensi gereja pada tahun 1095.⁴⁵ Pada pertemuan tersebut, Paus Urbanus II menyerukan kepada para kesatria Franka untuk melakukan perjalanan ke Timur dengan dua tujuan utama: membebaskan umat Kristiani dari dominasi Islam dan merebut kembali Makam Suci di Yerusalem.⁴⁶

Konsep Perang Suci, yaitu berperang demi Gereja, menjadi semakin diterima dan bahkan dipandang sebagai hal yang positif. Pada pertengahan abad ke-9, Paus Leo IV mengumumkan bahwa siapa pun yang gugur dalam pertempuran untuk melindungi Gereja akan memperoleh pahala ilahi.⁴⁷

Beberapa tahun kemudian, Paus Yohanes VIII menyebut para pejuang dalam Perang Suci sebagai martir, dengan janji pengampunan dosa bagi mereka yang mati dalam pertempuran. Namun, Paus Nicholas I menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengangkat senjata untuk membayar dosa mereka kecuali untuk melawan kaum yang tidak setia.⁴⁸

Di benua Afrika, agama Kristen juga memainkan peran dalam memperburuk konflik. Perlu diingat bahwa di sebagian besar Afrika sub-Sahara, Kristen diperkenalkan pada masa kolonial. Meskipun konversi ke agama Kristen umumnya tidak dilakukan dengan kekerasan fisik, para misionaris dan para pengikutnya sering kali memanfaatkan kekuatan tersebut untuk kepentingan mereka.⁴⁹

Surat ini termasuk dalam koleksi kanonik Burchard dan Gratian, menggambarkan kesenjangan mendalam dalam konteks politik kolonial.

⁴⁴ Timothy J Lomperis, ‘Lutheranism and Politics: Martin Luther as a Modernizer, but for the Devil’, *Church, State, and Citizen: Christian Approaches to Political Engagement*, 2009, 35.

⁴⁵ Alan V Murray, ‘National Identity, Language and Conflict in the Crusades to the Holy Land, 1096–1192’, in *The Crusades and the Near East* (Routledge, 2010), pp. 123–46.

⁴⁶ Jonathan Riley-Smith, ‘History, the Crusades and the Latin East, 1095–1204: A Personal View’, in *Crusaders and Muslims in Twelfth-Century Syria* (Brill, 1993), pp. 1–17.

⁴⁷ Christopher Tyerman, *England and the Crusades, 1095-1588* (University of Chicago Press, 1996).

⁴⁸ Jonathan Riley-Smith, *The Oxford History of the Crusades* (Oxford University Press, USA, 2002).

⁴⁹ Terence O Ranger, ‘Religious Movements and Politics in Sub-Saharan Africa’, *African Studies Review*, 29.2 (1986), 1–70.

Dalam masyarakat Afrika pasca-kolonial, keyakinan dan praktik Kristen sering kali berperan penting dalam konflik dan kekerasan.⁵⁰

Studi mendalam mengenai Genosida Rwanda 1994 menunjukkan bagaimana berbagai gereja terlibat dalam kekerasan yang mengakibatkan pembantaian sekitar satu juta orang Tutsi. Penelitian Timothy Longman mengungkapkan bahwa banyak pembunuhan terjadi di gereja-gereja, yang berfungsi sebagai ladang pembantaian.⁵¹

Setelah pembunuhan Presiden Juvenal Habyarimana pada tahun 1994, banyak Tutsi bersembunyi di gereja Katolik dan Protestan, namun mereka tetap menjadi sasaran kekerasan oleh milisi Hutu, Interahamwe. Gereja-gereja ini bukan hanya menjadi lokasi pembantaian, tetapi banyak orang Kristen, termasuk staf gereja dan pemimpin awam, turut terlibat dalam kekejaman tersebut.⁵²

Para ekstremis Hutu bahkan memanfaatkan mitos Hamitik, yang menganggap Tutsi sebagai penakluk asing, untuk memperkuat kebencian terhadap mereka. Mitos ini digambarkan dengan membuang mayat ke sungai Nyabarongo yang mengalir menuju Ethiopia. Dalam konteks ini, beberapa pendeta Katolik Roma ikut serta dalam genosida sementara pejabat Katolik Rwanda tetap diam. Gereja-gereja Kristen, yang seharusnya bersikap netral, ternyata memberikan dukungan penting bagi genosida melalui sikap diam mereka.⁵³

Narasi tentang milisi yang menghadiri misa sebelum membunuh, serta beberapa pembunuh yang berhenti untuk berdoa di altar, menunjukkan bahwa mereka merasa tindakan mereka disetujui oleh ajaran gereja. Gereja-gereja di Rwanda memberikan dukungan yang signifikan bagi genosida, bukannya mengutuk kekejaman yang terjadi.⁵⁴

⁵⁰ Maria Zandt, *Situation Of Christians In Sub-Saharan Africa*. (Jstor, 2022).

⁵¹ Timothy Longman, 'Christian Churches in Post-Genocide Rwanda', *The Healing of Memories: African Christian Responses to Politically Induced Trauma*, 2018, 55.

⁵² G Caplan, 'The 1994 Genocide of the Tutsi of Rwanda', in *Centuries of Genocide* (Routledge, 2012), pp. 446–475.

⁵³ S Loumakis, 'Genocide and Religion in Rwanda in the 1990s', *The Global Impact of Religious Violence*, 2016, 47–83.

⁵⁴ P Denis, 'Grief and Denial among Rwandan Catholics in the Aftermath of the Genocide against the Tutsi', in *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, 2018, pp. 287–307.

Para pemimpin gereja, dengan tidak mengecam pogrom Tutsi dan menunjukkan kefanatikan anti-Tutsi, memberikan dukungan kepada rezim Hutu. Dukungan ini dianggap sebagai persetujuan terhadap pesan anti-Tutsi. Beberapa pendeta bahkan memikat Tutsi ke gereja untuk diserang oleh milisi. Dalam skenario ini, anggota gereja terlibat dalam kekerasan dan membenarkan pembunuhan sebagai tindakan defensif terhadap invasi Tutsi.

Islam dan Konflik

Menurut para ahli sejarah, kedatangan Islam di Afrika dimulai sebagai upaya pengungsi yang mencari perlindungan. Pada tahun 615-616, sekelompok umat Islam awal melarikan diri dari penganiayaan elit Mekah yang non-Muslim dan menemukan perlindungan di Kerajaan Kristen Aksum, yang kini merupakan bagian dari Ethiopia. Raja Aksum yang dermawan mengizinkan mereka untuk menjalankan ajaran mereka tanpa gangguan.⁵⁵

Pertemuan pertama antara Islam dan Kristen di Afrika pada abad ke-7 ini bisa dianggap sebagai fase yang damai. Namun, meskipun tampaknya bersejarah dan harmonis, hubungan antara Muslim dan Kristen di Afrika Sub-Sahara seringkali diwarnai oleh kecurigaan, ketegangan, konflik, dan kebencian yang lebih mendalam.⁵⁶

Saat ini, hampir separuh populasi Afrika mengidentifikasi diri sebagai Muslim, dan Muslim Afrika menyumbang hampir seperempat dari populasi Muslim global. Kehadiran Islam di benua ini bervariasi menurut wilayah, tergantung pada apakah umat Islam merupakan kelompok mayoritas atau minoritas di masyarakat tersebut.⁵⁷

Al-Qur'an dan Hadits Nabi (SAW) memberikan bimbingan untuk perdamaian, menekankan belas kasih, toleransi, dan kesabaran sambil mengecam ekstremisme dan kekerasan, sebagaimana tercermin dalam kehidupan praktis di Gereja Suci. Seperti di banyak bagian dunia lainnya, Islam di Afrika juga terhubung dengan berbagai gagasan, baik positif maupun negatif.⁵⁸

⁵⁵ D Nicolle, *The Great Islamic Conquests AD 632–750* (Bloomsbury Publishing, 2012).

⁵⁶ P G Riddell and P Cotterell, *Islam in Context: Past, Present, and Future* (Baker Books, 2003).

⁵⁷ A Hastings, *The Church in Africa, 1450-1950* (Clarendon Press, 1995).

⁵⁸ I M Lapidus, *Islamic Societies to the Nineteenth Century: A Global History* (Cambridge University Press, 2012).

Reformasi Islam

Gerakan reformasi Islam kontemporer sering kali mengaitkan asal-usulnya dengan periode awal Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an mendorong perubahan (islah), dan nabi Muhammad meramalkan munculnya pembaharu (mujaddid) di setiap abad untuk mereformasi agama Islam.

Tokoh-tokoh seperti Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (1058-1111) di Iran-Baghdad, Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyya (1263-1328) di Anatolia-Damaskus, Shah Wali Allah al-Dihlawi (1703-1762) di India, Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1792) dari Arab, dan 'Utsman dan Fodio (1754-1817) dari Afrika Barat adalah contoh ulama yang memimpin gerakan reformasi sesuai dengan prediksi ini. Mereka dan para reformis terkemuka lainnya menginginkan kembalinya Islam ke nilai-nilai teks suci, mengkritik tradisi dan hierarki agama yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip ini. Gerakan reformasi ini memberikan dampak signifikan terhadap pemikiran Islam.⁵⁹

Di Afrika, gerakan reformasi Islam bukanlah hal baru. Pada abad ke-20, gerakan reformasi muncul sebagai respons terhadap krisis modernitas dan globalisasi. Di banyak negara Afrika Sub-Sahara, seperti Nigeria Utara, Sudan, dan Zanzibar, gerakan ini, termasuk persaudaraan sufi, mendapatkan pengaruh sosial, agama, dan politik yang signifikan.⁶⁰

Gerakan reformasi ini seringkali, meskipun tidak selalu, berseberangan dengan tradisi keilmuan Islam yang ada dan bersikap kritis terhadap unsur-unsur tertentu dari negara kolonial sekuler maupun negara pasca-kolonial. Karena itu, gerakan reformasi sering kali menampilkan sikap anti-kemapanan.⁶¹

Namun, gerakan reformasi Islam di Afrika belum menyajikan model reformisme yang konsisten, mengingat pendekatan heterogen yang diterapkan oleh berbagai gerakan. Tujuan utama gerakan-gerakan ini adalah untuk hidup

⁵⁹ Rugar.

⁶⁰ P B Clarke, *New Religions in Global Perspective: Religious Change in the Modern World* (Routledge, 2004).

⁶¹ A Tayob, *Islamic Resurgence in South Africa: The Muslim Youth Movement* (Juta and Company Ltd, 1995).

sesuai dengan ideal Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad.⁶²

Oleh karena itu, dalam berbagai kondisi, pembaharuan (tajdid) dan reformasi (koreksi) sering melibatkan seruan untuk kembali ke dasar-dasar Islam. Gerakan ini menentang praktik-praktik yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran dan prinsip ideal Islam.⁶³

Reformasi Islam di Afrika mencakup spektrum yang luas, mulai dari reformisme liberal yang lebih menerima tatanan sosial saat ini, hingga fundamentalisme militeristik dan normatif seperti Wahhabi yang dianggap sebagai bentuk Islam paling murni. Gerakan reformasi ini mencerminkan ketegangan antara generasi muda yang terlatih dengan kelompok konservatif tradisional, upaya pemberdayaan umat Islam lokal dengan mengadopsi Islam global, serta respons terhadap modernitas Barat melalui identitas Islam global yang berbeda dari agama Kristen.⁶⁴

Afrika Sub-Sahara telah menyaksikan berbagai gerakan reformasi radikal yang berfokus pada pesan dan manusia, seperti jihad Usman dan Fodio di Nigeria (1754–1817) serta gerakan Mahdi Muhammad Ahmad di Sudan (1844–1885), yang keduanya dipengaruhi oleh karya al-Wahhab.⁶⁵ Gerakan-gerakan ini muncul pada masa prakolonial dan telah berkontribusi pada lahirnya kelompok Salafi-jihadi yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka.

Baru-baru ini, penurunan perdamaian di beberapa wilayah Afrika dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas jihad, yang dipelopori oleh kelompok Salafi-jihadi seperti Boko Haram di Nigeria, al-Shabaab di Somalia dan Kenya, Gerakan Monoteisme dan Jihad (MUJAO), serta al-Qaeda di Maghreb Islam (AQMI) di Mali dan sebagian Afrika Barat.⁶⁶

⁶² B A Roberson, 'The Shaping of the Current Islamic Reformation', *Mediterranean Politics*, 7.3 (2002), 1–19.

⁶³ S Taji-Farouki and B M Nafi, *Islamic Thought in the Twentieth Century* (London: I, 2004).

⁶⁴ S A Arjomand, 'Islam, Political Change and Globalization', *Thesis Eleven*, 76.1 (2004), 9–28.

⁶⁵ J O Voll, *From Saints and Renewers to Mahdi s and Proto-Nationalists* (The Wiley Blackwell History of Islam, 2018).

⁶⁶ S E Foley, *Shaykh Khalid and the Naqshbandiyya-Khalidiyya, 1776–2005* (Georgetown University, 2005).

Kelompok-kelompok ini bersikeras menggunakan “jihad pedang” untuk mendirikan negara Islam dengan merujuk pada penafsiran selektif teks-teks Al-Qur’an. Kompleksitas hubungan antara Islam dan kekerasan di Afrika Sub-Sahara terlihat jelas dari pengalaman al-Shabaab di Somalia, yang sejak awal berdirinya telah menganjurkan pembentukan negara yang diatur berdasarkan hukum Islam.⁶⁷

Selama perang saudara di Sudan, pemerintah Islam menggunakan konsep dan simbolisme Islam untuk membenarkan kekerasan terhadap warga dhimmi, yaitu penganut agama asli Afrika dan Kristen, melalui perang jihad. Penetapan ini disetujui secara agama pada tahun 1992, ketika ulama Islam mengeluarkan fatwa yang melegalkan jihad di Sudan Selatan. Sebagai hasilnya, pemerintah Islam Sudan melancarkan serangan militer terhadap Sudan Selatan, yang kemudian ditentang keras oleh Sudan Selatan.⁶⁸

Di Nigeria, ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen telah memperdalam permusuhan sosial dan memicu serangan fatal secara berkala. Ketegangan yang terjadi dalam dua dekade terakhir ini berakar pada sejarah dan kebijakan (pra-)kolonial, serta kemunculan gerakan-gerakan revivalis dan reformis pasca-kolonial yang terlibat dalam “perebutan ruang publik” dan menggunakan pengaruh politik di tengah ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik.⁶⁹

Pengenalan hukum Islam (syariah) di negara-negara mayoritas Muslim di Nigeria utara pada akhir tahun 1990-an semakin memperburuk ketegangan antara Muslim dan Kristen. Pada tahun 2003, hukum syariah telah dimasukkan dalam konstitusi dua belas negara bagian di wilayah utara, yang membuat umat Kristen merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Akibatnya, umat Kristen, khususnya Pentakosta, mulai mengorganisir perlawanan terhadap upaya Islamisasi Nigeria dan memperkuat upaya mereka untuk menjadikan Nigeria sebagai wilayah Kristen.⁷⁰

⁶⁷ Y M Choueiri, ‘Islamic Fundamentalism’, 2010.

⁶⁸ A S Roald and L Tønnessen, *Discrimination in the Name of Religious Freedom: The Rights of Women and Non-Muslims after the Comprehensive Peace Agreement in Sudan* (Chr. Michelsen Institute, 2007).

⁶⁹ I H Malik, ‘Islamic Discourse on Jihad, War and Violence’, *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 21.4 (1998), 47.

⁷⁰ A L Gamlem, ‘Islamic Discourse of Difference: A Critical Analysis of Maulana Mawdudi’s Texts on Kafirs and Dhimmis’, 2008.

Sejak tahun 1980-an, kelompok Salafi-jihadi seperti Boko Haram, yang menyerukan pembentukan negara Islam, telah menyebabkan kerusakan besar di Nigeria utara dan tengah. Di Mali, konflik tahun 2012 melibatkan gerakan Salafi-jihadi seperti AQMI dan MUJAO yang berusaha menciptakan kekhalifahan Islam. Kelompok-kelompok ini, termasuk Boko Haram, al-Shabaab, dan berbagai kelompok agama-politik lainnya, telah berhasil menguasai sebagian wilayah negara mereka masing-masing, mencerminkan upaya mereka untuk melakukan segregasi spasial.⁷¹

Di belahan dunia Afrika lainnya, pemimpin Salafi-jihadi menggunakan teks-teks Islam untuk merasionalisasi tindakan kekerasan mereka, menunjukkan kemampuan mereka dalam membingkai kekerasan dalam istilah Islam. Hal ini mendorong umat Islam moderat untuk maju dan melawan manipulasi pengetahuan Islam.⁷²

Di Kenya, misalnya, para pemimpin Muslim melalui organisasi seperti Dewan Tertinggi Muslim Kenya, Pusat Pengembangan Ihsan dan Pendidikan, serta Membangun Ketahanan terhadap Ekstremisme Kekerasan (BRAVE), telah meluncurkan program untuk melawan ideologi jihad. BRAVE, khususnya, memainkan peran penting dalam kampanye anti-jihadi melalui media dan platform media sosial dengan pesan-pesan anti-ekstremisme.⁷³

Agama dan Politik Identitas

Meskipun konsep 'identitas' umumnya diterapkan pada masyarakat, dalam konteks institusi etnis, agama, dan budaya yang berbeda, konsep ini dapat berfungsi sebagai identitas kolektif yang melibatkan kelompok, budaya, bahkan negara. Akibatnya, ketika seseorang melihat bahwa individu dengan identitas yang sama diperlakukan secara tidak adil, mereka bisa merasa dirugikan secara pribadi.⁷⁴

Kelompok-kelompok yang sering kali teridentifikasi sendiri dan terpolarisasi, baik di dalam maupun antar negara, dapat mengalami apa yang

⁷¹ Gamlem.

⁷² G M Davis, *Religion of Peace?: Islam's War Against the World* (WND Books, 2006).

⁷³ D E Arzi, 'The Role of Compulsion in Islamic Conversion: Jihad, Dhimma and Ridda', *Buff. Hum. Rts. L. Rev.*, 8 (2002), 15.

⁷⁴ Hans Mol, 'Religion and Identity A Dialectic Interpretation of Religious Phenomena', *Australian Association for the Study of Religions Book Series*, 2022, 16.

disebut sebagai bentrokan identitas. Malek berpendapat bahwa untuk terjadinya pertikaian antar kelompok, masing-masing pihak harus menetapkan identitas baik pada dirinya sendiri maupun lawan, sehingga tercipta perasaan “kita” versus “mereka.”⁷⁵

Namun, apa sebenarnya sumber utama identitas ini? Banyak identitas dibangun atas dasar cita-cita, keyakinan, atau kepentingan bersama, yang tidak hanya mencakup agama, tetapi juga filsafat politik, ras, kebangsaan, atau budaya. Ini tidak berarti bahwa identitas individu adalah kesatuan yang monolitik; melainkan, identitas seseorang adalah campuran unik dari berbagai elemen seperti budaya, keyakinan, ras, nasionalisme, jenis kelamin, dan usia. Nilai dan kompatibilitas elemen-elemen ini bervariasi tergantung pada waktu dan situasi. Dengan kata lain, identitas individu dan kolektif, yang terbuka untuk interpretasi, dibentuk oleh berbagai karakteristik dan pengalaman yang ada.⁷⁶

Dalam beberapa budaya, ras dan keyakinan bisa menjadi sumber identitas yang penting, sementara dalam budaya lain, ideologi politik dan nasionalisme mungkin lebih dominan. Beberapa analis melihat asal mula identitas sebagai fenomena yang tidak berubah, seperti keyakinan atau etnis, sedangkan yang lain menekankan bahwa semua identitas dikonstruksi secara sosial: orang memilih latar belakang dan warisan mereka, yang memungkinkan mereka untuk membedakan diri sebanyak mereka ingin.⁷⁷

Rasa identitas seringkali dapat memperburuk konflik yang intens dan destruktif. Beberapa analis merujuk pada apa yang disebut sebagai identitas 'destruktif', yang berarti jika suatu sumber identitas, seperti agama, etnis, atau kebangsaan, sangat penting bagi seseorang, maka ancaman terhadap identitas tersebut—baik nyata maupun imajiner—dapat memicu konflik.⁷⁸

Pola budaya tertentu dapat menimbulkan ketegangan sosial dengan mendorong kecenderungan untuk meremehkan atau menolak kelompok lain.

⁷⁵ M Buchardt, *Pedagogized Muslimness: Religion and Culture as Identity Politics in the Classroom* (Waxmann Verlag, 2014), xxvii.

⁷⁶ B E Heilman and P J Kaiser, 'Religion, Identity and Politics in Tanzania', *Third World Quarterly*, 23.4 (2002), 691–709.

⁷⁷ J Borup, 'Who Owns Religion? Intersectionality, Identity Politics, and Cultural Appropriation in Postglobal Buddhism', *Numen*, 67.2–3 (2020), 226–255.

⁷⁸ N A Hussain, 'Religion and Modernity: Gender and Identity Politics in Bangladesh', *Women's Studies International Forum*, 33.4 (2010), 325–333.

Ketika ideologi mempolaritas komunitas, konflik di antara mereka bisa menjadi hasilnya. Misalnya, komunitas yang percaya bahwa keyakinan mereka lebih unggul dibandingkan komunitas lain mungkin memandang komunitas yang memiliki keyakinan berbeda sebagai inferior.⁷⁹

Jika kelompok ini merasa terancam, mereka mungkin berusaha melindungi diri mereka dengan terlebih dahulu menyerang, yang pada gilirannya dapat memicu konflik lebih lanjut. Konflik berkepanjangan seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina mungkin merupakan hasil dari ancaman dan balasan yang berkelanjutan. Situasi ini dapat diperparah oleh perilaku politik, di mana pejabat mungkin mengeksploitasi identitas eksklusif untuk meraih keuntungan pribadi, memperkuat perasaan permusuhan dalam komunitas.⁸⁰

Kamrava berpendapat bahwa rasa identitas sangat memengaruhi bagaimana individu berperilaku politik dan memandang lingkungan politik mereka. Secara umum, tekanan dan ketegangan yang terkait dengan modernisasi dan globalisasi dapat memperkuat manifestasi identitas agama dan etnis di negara berkembang.⁸¹

Namun, pengaruh-pengaruh ini tidak secara otomatis mempengaruhi situasi budaya dan politik secara seragam. Sebaliknya, upaya membangun struktur politik modern dan ekonomi yang maju seringkali bertentangan dengan norma dan tradisi sosial pra-modern, yang dapat menyebabkan ketegangan agama atau etnis dalam komunitas.⁸²

Di sisi lain, prediksi konflik tidak bisa bergantung pada model fragmentasi sederhana. Sebagai contoh, meskipun Somalia mengalami ketegangan sosial yang parah meskipun homogen secara agama dan etnis, Tanzania dengan fragmentasi agama dan etnis yang tinggi tidak mengalami konflik yang sama. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mencapai kesatuan sosial yang dapat mengatasi perpecahan etnis atau agama

⁷⁹ Agus Supratikno, 'Reinforcing Indonesian National Identity Based on Inclusiveness of Pancasila as a Way to Deal with the Identity Politics in Indonesia', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9.6 (2022), 407–17.

⁸⁰ Borup.

⁸¹ Heilman and Kaiser.

⁸² P Weller, 'Identity, Politics, and the Future (s) of Religion in the UK: The Case of the Religion Questions in the 2001 Decennial Census', *Journal of Contemporary Religion*, 19.1 (2004), 3–21.

mungkin merupakan faktor penting dalam menjelaskan adanya atau tidak adanya perselisihan antar kelompok.⁸³

Singkatnya, fragmentasi agama dan/atau etnis dapat berkontribusi terhadap persaingan dan konflik dalam beberapa situasi, namun tidak dalam situasi lainnya. Ada hipotesis yang mungkin menyatakan bahwa negara dengan perpecahan agama dan/atau etnis yang signifikan cenderung mengalami stabilitas politik yang buruk dan memiliki potensi besar untuk konflik antar kelompok. Banyak negara berkembang menunjukkan fragmentasi agama yang mendalam, bahkan hingga perpecahan rasial dalam beberapa kasus.⁸⁴

Agama sering kali dianggap sebagai penyebab konflik di berbagai belahan dunia. Namun, potensi pemimpin agama dan organisasi keagamaan dalam mempromosikan perdamaian sering kali terabaikan. Meskipun kontribusi agama dalam menciptakan perdamaian baru-baru ini mulai mendapatkan perhatian, manfaatnya masih belum sepenuhnya diakui.

Ketiga agama Ibrahim, misalnya, memiliki dasar yang kuat untuk mempromosikan perdamaian. Contoh nyata dari peran agama dalam mediasi perdamaian telah ada sejak lama, seperti perjanjian perdamaian singkat yang terjadi pada tahun 1972 di Sudan, yang dimediasi oleh Dewan Gereja Dunia dan Konferensi Seluruh Afrika.

Gereja-gereja di Afrika Selatan telah lama memimpin perjuangan melawan apartheid dan transisi damai. Salah satu contoh sukses adalah mediasi yang dilakukan oleh Kelompok Sant'Egidio dari Roma untuk mengakhiri perang saudara di Mozambik pada tahun 1992.

Perdamaian antar agama sering kali muncul sebagai solusi efektif terhadap pelecehan agama, terutama di tengah meningkatnya konflik dan apa yang disebut Appleby sebagai “ambivalensi terhadap hal-hal yang sakral.” Akademisi, negara, dan organisasi nirlaba semakin menghargai peran agama dalam menciptakan perdamaian. Contohnya adalah Kesepakatan Jumat Agung tahun 1998 di Irlandia Utara, di mana Pastor Alex Reid berhasil membujuk

⁸³ E Fiddian-Qasmiyeh and Y M Qasmiyeh, ‘Muslim Asylum-Seekers and Refugees: Negotiating Identity, Politics and Religion in the UK’, *Journal of Refugee Studies*, 23.3 (2010), 294–314.

⁸⁴ P S Sangren, ‘Anthropology and Identity Politics in Taiwan: The Relevance of Local Religion’, in *Religion and the Formation of Taiwanese Identities* (New York: Palgrave Macmillan US, 2003), pp. 253–287.

John Hume dari Partai Sosial Demokrat dan Partai Buruh, serta Gerry Adams dari Sinn Fein untuk memulai dialog perdamaian. Pendeta Protestan Roy Magee juga memainkan peran penting dalam menggalang dukungan untuk gencatan senjata pada tahun 1994.

Kisah inspiratif lainnya adalah Pendeta James Wuye dan Imam Mohammed Ashafa, yang berperang di pihak yang berseberangan dalam konflik agama pada tahun 1992. Setelah mengalami kerugian pribadi yang mendalam, mereka menyadari bahwa kedua agama mereka sebenarnya mendukung perdamaian.

Pada tahun 1995, mereka mendirikan Pusat Mediasi Antar Agama dan berkomitmen untuk bekerja sama membangun persatuan antar agama. Upaya mereka telah berhasil mendorong rekonsiliasi di Kaduna, Nigeria, dan pada November 2004, mereka kembali menunjukkan keterampilan mereka dalam menyelesaikan konflik di Yelwa-Nshar.

Pembawa perdamaian agama adalah individu atau kelompok yang berupaya menyelesaikan perselisihan antar kelompok dan menciptakan perdamaian. Keberhasilan mereka seringkali bergantung pada beberapa faktor, termasuk cakupan regional atau transnasional, fokus pada perdamaian tanpa kekerasan, dan hubungan baik dalam situasi konflik.

Coward dan Smith menyebut usaha ini sebagai “pembangunan perdamaian agama,” yang dilakukan untuk mengatasi konflik dan membangun sistem sosial yang berlandaskan toleransi dan non-kekerasan. Meskipun peran pemimpin agama sering kali diabaikan, mereka memiliki potensi besar dalam proses perdamaian, karena agama sering kali menjadi bagian dari solusi dalam rekonstruksi sosial.

Salah satu contoh terkenal adalah Sant’Egidio, sebuah LSM Katolik internasional yang didirikan pada tahun 1968 di Italia. Dengan sekitar 50.000 anggota di 70 negara, Sant’Egidio terlibat dalam berbagai upaya perdamaian global. Meskipun awalnya fokus pada pelayanan bagi masyarakat miskin, Sant’Egidio telah memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik di banyak negara Afrika, seperti Mozambik, Nigeria, dan Kamboja, serta di negara-negara lain seperti Kolombia, Guatemala, dan Kosovo. Melalui pendekatan yang berbasis pada amal, intervensi kemanusiaan, dan dialog antar agama, Sant’Egidio terus berkontribusi pada upaya perdamaian di tingkat internasional.

Peran Organisasi Keagamaan dalam Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian

Contoh yang mencolok dari peran komunitas keagamaan dalam penciptaan perdamaian adalah Sant'Egidio, sebuah organisasi Katolik internasional yang didirikan pada tahun 1968 di Italia. Sant'Egidio awalnya berfokus pada pelayanan masyarakat miskin di Italia, namun seiring berjalannya waktu, organisasinya berkembang dan kini memiliki sekitar 50.000 anggota di 70 negara. Meskipun Sant'Egidio diakui secara resmi oleh Gereja Katolik, ia beroperasi secara independen dan memiliki karakter sebagai organisasi awam yang didorong oleh nilai-nilai keagamaan.⁸⁵

Sant'Egidio terlibat aktif dalam berbagai inisiatif perdamaian internasional sejak awal tahun 1980-an, dengan tujuan utama meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antar kelompok yang bertikai. Organisasi ini telah memainkan peran kunci dalam pembangunan perdamaian di negara-negara yang dilanda perang saudara seperti Mozambik, Nigeria, dan Kamboja. Sant'Egidio juga terlibat dalam upaya perdamaian di negara-negara lain seperti Aljazair, Burundi, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Sierra Leone, Kolombia, Guatemala, dan Kosovo. Dalam setiap kasus, negara-negara ini mengalami perselisihan serius antar kelompok, sering kali diperburuk oleh penurunan efektivitas pemerintah pusat.⁸⁶

Sant'Egidio beroperasi dengan pendekatan yang menggabungkan amal, intervensi kemanusiaan, dan dialog antar agama. Mereka lebih banyak terlibat dalam konflik yang bersifat non-agama, tetapi tetap berfokus pada upaya penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Upaya mereka menunjukkan bahwa meskipun konflik bersifat internasional, dampak positif dari intervensi berbasis agama dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses perdamaian global.⁸⁷

⁸⁵ N H W Hegertun, 'Faith-Based Mediation?: Sant'Egidio's Peace Efforts in Mozambique and Algeria', 2010.

⁸⁶ J Holmsen, 'Believe It or Not: The New Face of Religion in International Affairs: A Case Study of Sant'Egidio', 2018.

⁸⁷ L E Johnston, 'Signposts for an Ethic of Peacemaking: Reading "Gaudium et Spes"', in *In Light of Yves Congar and the Community of Sant'Egidio (Doctoral Dissertation (Boston College, 2008))*.

Dengan demikian, peran organisasi keagamaan seperti Sant'Egidio dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktor agama dalam upaya rekonsiliasi. Mereka membuktikan bahwa agama, ketika digunakan secara konstruktif, dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mengatasi ketegangan dan memfasilitasi dialog antar kelompok yang berseteru. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pemimpin dan organisasi keagamaan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di dunia yang penuh dengan konflik.⁸⁸

Antara tahun 1989 dan 1992, salah satu pencapaian paling menonjol dalam upaya perdamaian Sant'Egidio adalah keberhasilannya mengakhiri perang saudara yang telah menghancurkan Mozambik sejak pertengahan 1970-an. Uskup Agung Beira, Don Jaime Goncalves, yang sudah lama mengenal Sant'Egidio dan kinerjanya sejak masa-masa awal di Roma, memuji organisasi ini atas kemampuannya menyatukan pemerintah dan pemberontak Perlawanan Nasional Mozambik (RENAMO).⁸⁹

Upaya internasional sebelumnya dalam menghentikan konflik tersebut gagal, namun Sant'Egidio berhasil membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Proses negosiasi ini memakan waktu berbulan-bulan, tetapi akhirnya Sant'Egidio mampu tidak hanya mendekati pemimpin RENAMO, tetapi juga meyakinkan pejabat pemerintah Mozambik untuk duduk bersama mereka.⁹⁰

Keberhasilan Sant'Egidio dalam mediasi ini dapat dikaitkan dengan citra mereka yang netral dan ramah dari perspektif kemanusiaan, dengan satu tujuan utama: mengakhiri perang saudara dan mempromosikan perdamaian di Mozambik. Organisasi ini dikenal tidak memiliki agenda politik atau ekonomi,

⁸⁸ R S Appleby, 'Building Sustainable Peace: The Roles of Local and Transnational Religious Actors. Religious Pluralism, Globalization, and World Politics', 2008, pp. 125–154.

⁸⁹ M Barbato, C Franco, and B Le Normand, 'Is There a Specific Ambivalence of the Sacred? Illustrations from the Apparition of Medjugorje and the Movement of Sant'Egidio', *Politics, Religion & Ideology*, 13.1 (2012), 53–73.

⁹⁰ W A Raharjo, 'Ethical Issues in Religiously Affiliated Disputes: Sant'Egidio's Mediation in Mozambique and Algeria', *Politics and Humanism*, 1.2 (2022), 52–65.

dan sikap adil serta netral mereka selama negosiasi semakin memperkuat kepercayaan kedua belah pihak.⁹¹

Sant'Egidio, sebagai LSM, mampu mengadakan pertemuan antara RENAMO dan pemerintah tanpa memberi kesan bahwa pemberontak RENAMO setara dengan rezim yang berkuasa. Selain itu, mereka juga memiliki keuntungan berupa pengetahuan tentang kekurangan dalam diplomasi internasional, yang memungkinkan mereka mengakses keterampilan politik unik dari berbagai pihak.⁹²

Tim mediasi Sant'Egidio terdiri dari Uskup Agung Beira, Don Jaime Goncalves, seorang anggota parlemen Italia dan mantan diplomat, serta dua pemimpin utama Sant'Egidio. Upaya ini mendapat pujian tidak hanya dari PBB tetapi juga dari sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Italia, Zimbabwe, dan Kenya. Setelah perundingan berhasil pada tahun 1992, PBB mengambil alih tanggung jawab untuk menegakkan perjanjian perdamaian. Selama tiga dekade terakhir, Mozambik telah stabil, dengan Partai FRELIMO memenangkan beberapa pemilu dan RENAMO bertindak sebagai oposisi politik utama.⁹³

Secara keseluruhan, mediasi Sant'Egidio di Mozambik menunjukkan bagaimana organisasi berbasis agama dengan kemampuan yang memadai dapat memainkan peran unik dalam mediasi konflik. Mereka membangun reputasi netralitas dan toleransi, memanfaatkan keterampilan mereka sendiri serta jaringan organisasi lain untuk menyatukan pihak-pihak yang bertikai.⁹⁴

Dampak nyata dari mediasi Sant'Egidio dalam berbagai situasi konflik sangat mengesankan. Selain peran penting mereka dalam Perjanjian Damai Mozambik pada tahun 1992, mereka juga berkontribusi pada proses

⁹¹ A Bartoli, 'NGOs and Conflict Resolution', in *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 2009, pp. 392–411.

⁹² R M Rocca, 'Sant'egidio's Diplomacy in Crisis Areas', in *Italy's Foreign Policy in the Twenty-First Century* (Routledge, 2014), pp. 130–147.

⁹³ Mohammed Abu-Nimer, 'Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding', *Journal of Peace Research*, 38.6 (2001), 685–704.

⁹⁴ J P Lederach and R S Appleby, 'Strategic Peacebuilding: An Overview', in *Strategies of Peace: Transforming Conflict in a Violent World*, 2010, pp. 19–44.

perdamaian di Guatemala, yang berakhir dengan Perjanjian Perdamaian pada Desember 1996.⁹⁵

Di Kosovo, mereka berpengaruh dalam kembalinya anak-anak Albania ke sekolah. Meskipun dampak keterlibatan mereka di Kongo masih belum sepenuhnya dievaluasi, Sant'Egidio terbukti berhasil dalam memediasi konflik, mendorong dialog antaragama, serta perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi.⁹⁶

Pengamatan tentang pembangunan perdamaian berbasis keyakinan mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan Sant'Egidio, terutama di Afrika. Grup ini membangun reputasi melalui kejujuran dan dedikasi mereka dalam berbagai program sosial non-partisan, dari bantuan kemanusiaan internasional hingga dukungan langsung untuk kelompok rentan. Sant'Egidio juga memanfaatkan hubungan antara bantuan kemanusiaan dan proses politik secara produktif, seperti yang terlihat di Mozambik di mana mereka terlibat dengan gereja-gereja Kristen sebelum memainkan peran mediasi yang lebih konstruktif pada tahun 1990.⁹⁷

Sant'Egidio tidak mengejar pengaruh politik atau ekonomi pribadi, tetapi mengandalkan jaringan teman yang berpengaruh untuk perdamaian. Komitmen mereka terhadap persahabatan membantu mereka membangun hubungan dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah, serta mengelola jaringan besar yang melibatkan berbagai pemain politik, diplomatik, dan gereja.⁹⁸

Mediator Sant'Egidio berhasil karena pengetahuan mendalam tentang bahasa dan budaya masyarakat yang berkonflik, akses informasi langsung, dan keahlian politik. Mereka juga fokus pada konflik yang terlupakan dan tidak terpengaruh oleh tenggat waktu atau tekanan politik jangka pendek.⁹⁹

⁹⁵ C Simone, 'Italy and the Community of Sant'Egidio in the 1990s. 'Coopetition' in Post-Cold War Italian Foreign Policy?', 2017.

⁹⁶ A Posada-Téllez, *Making Peace with God: What Place for Religion in United Nations Mediation?* (International Peacekeeping, 2024).

⁹⁷ Silvestri and Mayall.

⁹⁸ A Stensvold, I Vik, and C., 'Religious Peacemakers on the International Scene: Hopes and Motivations', *People Building Peace II: Successful Stories of Civil Society*, 16.3 (2018), 9–22 .,

⁹⁹ K B Harpviken and H E Røislien, 'Faithful Brokers? Potentials and Pitfalls of Religion in Peacemaking', *Conflict Resolution Quarterly*, 25.3 (2008), 351–373.

Kesimpulannya, meskipun pembelajaran dari pengalaman Sant'Egidio dapat diterapkan pada organisasi berbasis agama maupun sekuler, perbedaan terletak pada motivasi berbasis keyakinan dan otoritas moral yang diberikan kepada mereka. Sant'Egidio percaya bahwa perdamaian muncul melalui dialog dan pemahaman, bukan hanya dedikasi terhadap hubungan pribadi dengan mereka yang membutuhkan.¹⁰⁰

Konflik dan Kerja Sama Antar Komunitas Keagamaan di Nigeria

Persaingan antara Muslim dan Kristen mungkin merupakan salah satu isu politik paling mendalam di Nigeria. Secara umum, agama telah memainkan peran signifikan dalam konflik yang menghantui Nigeria sejak tahun 1960-an. Saat itu, misionaris dan pendukung agama seringkali terlibat dalam pertentangan yang mematikan, berupaya merebut jiwa umat dalam permainan zero-sum.¹⁰¹

Ketegangan meningkat pada 1980-an, ketika umat Kristen merasa wilayah utara yang mayoritas Muslim memperoleh kekuasaan politik dan kekayaan ekonomi yang tidak adil. Keputusan pemerintah Nigeria pada 1986 untuk bergabung dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang melibatkan negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran dengan pandangan yang saling bertentangan, menambah ketegangan.¹⁰²

Banyak warga Kristen khawatir bahwa keanggotaan OKI akan merusak status sekuler Nigeria dan melemahkan posisi mereka. Sementara itu, pendukung Muslim berpendapat bahwa keanggotaan Nigeria di OKI tidak berbeda dengan status negara dalam Persemakmuran yang dikepalai oleh Inggris, yang secara hukum Kristen Protestan.¹⁰³

Ketegangan ini meletus menjadi konflik politik yang mengakibatkan protes anti-Kristen di berbagai daerah di utara Nigeria pada awal tahun 1987,

¹⁰⁰ A Kelleher and M Johnson, 'Religious Communities as Peacemakers: A Comparison of Grassroots Peace Processes in Sudan and Northern Ireland', *Civil Wars*, 10.2 (2008), 148–172.

¹⁰¹ Ekpenyong Nyong Akpanika, 'Religious and Political Crises in Nigeria: A Historical Exploration', 2017.

¹⁰² E O Davies and S A Egbuchu, 'Dialogue as an Effective Mechanism for Resolving Religious Conflict in Nigeria', *Advance Journal of Education and Social Sciences*, 4.4 (2019).

¹⁰³ I Osaretin and E Akov, 'Ethno-Religious Conflict and Peace Building in Nigeria: The Case of Jos, Plateau State', *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2.1 (2013), 349–360.

serta kembali terjadi pada Mei dan Oktober 1991. Dalam periode antara 1987 dan 1993, lebih dari 3.000 orang tewas dalam bentrokan antara Kristen dan Muslim, termasuk sekitar 1.000 orang dalam pertempuran sengit di Mei 1992 antara komunitas Katolik Kristen dan Muslim Hausa serta Fulani.¹⁰⁴

Gereja-gereja dibakar, dan kekerasan menimpa kedua belah pihak. Pemerintahan militer yang menghindari perdebatan politik publik menjadi latar belakang kekerasan ini, menyebabkan kemarahan umat Islam dialihkan pada masalah agama karena larangan partai politik dan ketiadaan badan legislatif. Hal ini menyebabkan banyak Muslim mengadopsi sikap fundamentalis dan Kristen melakukan tindakan balasan, memperburuk ketegangan.¹⁰⁵

Sejak awal 1990-an, konflik antaragama yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Nigeria. Negara bagian Kaduna di utara merupakan salah satu yang paling parah terkena dampak. Selama tahun 1990-an, Nigeria mengalami kekerasan agama yang merenggut lebih dari 10.000 nyawa, dengan Kaduna sebagai pusat kekerasan tersebut.¹⁰⁶

Pada tahun 1995, untuk merespons situasi ini, didirikan sebuah badan amal yang bertujuan mendorong dialog antaragama, Forum Dialog Muslim-Kristen (MCDF). Forum ini merupakan hasil upaya dua mantan rival, James Movel Wuye, seorang pendeta Kristen, dan Muhammad Nurayn Ashafa, seorang imam Muslim. Keduanya, yang pernah terlibat dalam konflik sengit, berkomitmen untuk menjauh dari kekerasan dan militansi, dan sebaliknya mempromosikan non-kekerasan, persatuan, dan hubungan baik antar komunitas mereka.¹⁰⁷

Pendeta dan Imam: Bereaksi terhadap Konflik

¹⁰⁴ P Ilo, 'Faith-Based Organisations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of the Christian Association of Nigeria (CAN)', *Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective*, 9.2 (2015), 9.

¹⁰⁵ I A Akanji, 'Towards a Theology of Conflict Transformation: A Study of Religious Conflict in Contemporary Nigerian Society', 2011.

¹⁰⁶ E M Uka, 'Ethnic, Religious and Communal Conflict in Nigeria: Implications for Security', *Bassey Andah Journal*, 1.1 (2008), 1–17.

¹⁰⁷ Shedrack Gaya Best and Carole Rakodi, 'Violent Conflict and Its Aftermath in Jos and Kano, Nigeria: What Is the Role of Religion?', 2011.

Pada tahun 2003, mereka juga terdaftar sebagai mahasiswa di School for International Training (SIT) di Vermont dan menulis bahwa agama saat ini sering digunakan untuk menyebabkan konflik, bukan sebagai sumber penyembuhan atau kedamaian. Hal ini, menurut mereka, telah menyebabkan penderitaan, kebencian, dan diskriminasi.¹⁰⁸

Pada bulan Maret 2003, MCDF bersama Institut Perdamaian AS mengadakan lokakarya dialog lima hari di Kaduna, melibatkan pemimpin pemuda dari komunitas Kristen dan Muslim di 30 negara bagian Nigeria. Lokakarya ini bertujuan untuk mendukung kerja Dewan Antar-Agama Nigeria dan merencanakan lebih banyak pertemuan antaragama di wilayah lain di Nigeria.¹⁰⁹

Meskipun awalnya para peserta saling menyalahkan atas kekerasan agama, mereka akhirnya menyepakati pernyataan konsensus 17 poin yang mencakup rekomendasi seperti saling mencintai tanpa syarat, menunjukkan niat baik, dan mendidik anggota kelompok agama mengenai nilai dan cita-cita keyakinan orang lain. Untuk memberikan keadilan bagi individu yang terus menggunakan kekerasan agama, diperlukan kerja sama dengan pemerintah.¹¹⁰

Pusat Mediasi Antar-Iman di Nigeria

Pusat Mediasi Antar-Iman, yang didirikan oleh Pendeta Evangelis James Movel Wuye dan Imam Istaz Muhammad Nurayn Ashafa, berfokus pada mediasi dan fasilitasi dialog antara pemuda, perempuan, pemimpin agama, dan pemerintah. Tujuan utama pusat ini adalah menanamkan dan memupuk budaya saling menghormati serta mengakui kekayaan warisan budaya, sejarah, dan agama masing-masing.¹¹¹

Dengan pendekatan ini, pusat tersebut bertujuan untuk mempromosikan kerukunan beragama dan hidup berdampingan secara damai. Selain itu, pusat ini berfungsi sebagai sumber daya untuk intervensi, mediasi, dan mitigasi konflik serta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pusat ini memanfaatkan

¹⁰⁸ D B Cozzens, *The Changing Face of the Priesthood: A Reflection on the Priest's Crisis of Soul* (Liturgical Press, 2000).

¹⁰⁹ P F Lennon, *The Experience of Role Conflict in Priest-Therapists* (Duquesne University, 1969).

¹¹⁰ N C Everist, *Church Conflict: From Contention to Collaboration* (Abingdon Press, 2004).

¹¹¹ M Saleh, 'Interfaith Mediation Centre in Promoting Peace in Bauchi State, Nigeria', *African Social Science and Humanities Journal*, 3.4 (2022), 182–192.

ajaran Islam dan Kristen sebagai alat untuk memajukan keadilan sosial, kesetaraan, penyembuhan, dan perdamaian.¹¹²

Mereka juga berupaya menciptakan mekanisme bagi pemuda dan perempuan yang terdampak krisis etnis dan agama untuk mengelola konflik dan mengatasi kemiskinan. Imam Ashafa, sebagai contoh, seorang pengkhotbah Islam, mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di antara berbagai kelompok agama di Nigeria dan Afrika Barat. Ia menjangkau kaum muda yang terpinggirkan melalui pendidikan mengenai ajaran Al-Quran dan nilai-nilai Islam.¹¹³ Dalam mengatasi krisis etno-agama, ia terlibat dalam mediasi dan bekerja sama dengan kelompok akar rumput, LSM, dan lembaga pemerintah.

Kegiatan Pembangunan Perdamaian

Pusat Mediasi Antar-Iman aktif dalam berbagai inisiatif mediasi perdamaian di Nigeria. Imam Ashafa, salah satu pendiri pusat, berperan sebagai penggagas perjanjian perdamaian antara kelompok Muslim dan Kristen di Negara Bagian Kaduna, serta mediator dalam perselisihan etnis dan agama di Zangon Kataf. Bersama Pendeta Wuye, ia menerima Tanenbaum Peacemakers in Action Award pada tahun 2000 atas kontribusinya dalam pembangunan perdamaian. Mereka juga menerbitkan buku.¹¹⁴

Pendeta dan Imam: Bereaksi terhadap Konflik

Pada tahun 1999, yang menjadi panduan bagi manajemen konflik dan rekonsiliasi berdasarkan ajaran Alkitab dan Alquran. Selain pekerjaan mediasi, Imam Ashafa mengajarkan nilai-nilai Islam dan praktik perdamaian kepada pemuda Muslim, serta mengusulkan kebijakan untuk mengatur perilaku ulama dan dokumen perjanjian perdamaian. Ia juga memberikan masukan tentang

¹¹² M.U.S.A. Saleh, 'Influence of Interfaith Mediation Centre in the Management of Conflict in Bauchi State Nigeria: 1960-2015', 2020.

¹¹³ O O Isola, 'Inter-Faith Conflict Mediation Mechanisms and Peacebuilding in Nigeria', 2014.

¹¹⁴ P C Nweke, 'Religious Peacebuilding in Nigeria', in *Religion in War and Peace in Africa* (Routledge, 2020), pp. 16–23.

pelatihan guru dan siswa mengenai pentingnya pemahaman agama antar kelompok.¹¹⁵

Dampak dan Tantangan

Kunjungan lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat seperti guru dan siswa akan memberikan gambaran lebih jelas tentang hasil kegiatan Imam Ashafa dan Pendeta Wuye. Secara umum, upaya mereka dihargai dan diakui baik di tingkat lokal maupun internasional.¹¹⁶

Imam Ashafa menerima Ansarhdeen Islamic Merit Award pada tahun 1999 dan Tanenbaum Peacemakers in Action Award pada tahun 2000. Kontribusi utamanya terhadap perdamaian mencakup penyembuhan, reformasi perilaku, mediasi, serta memfasilitasi persatuan dan dialog antara komunitas Kristen dan Muslim.¹¹⁷

Namun, Imam Ashafa menghadapi berbagai kesulitan, seperti kurangnya kesadaran mengenai ruang lingkup perdamaian dan tuduhan bahwa upayanya hanya untuk keuntungan finansial atau dukungan politik. Beberapa pihak juga menganggap bahwa upayanya berfungsi untuk memasukkan agama baru atau mendukung lembaga donor, dan mengkritik dukungannya terhadap negara-negara Barat. Imam Ashafa juga harus menghadapi penafsiran Al-Quran yang salah untuk tujuan tertentu.¹¹⁸

Secara keseluruhan, pengalaman di Nigeria menunjukkan bahwa upaya untuk menginspirasi kerjasama damai antara kelompok agama yang bersaing sangat mungkin berhasil jika dikelola dengan baik. Namun, penyelesaian perselisihan agama yang lebih luas sering kali memerlukan intervensi pemerintah yang berkelanjutan dan dedikasi terhadap pembangunan manusia, seperti mengatasi kemiskinan.¹¹⁹

¹¹⁵ M A Ojo and F T Lateju, 'Christian-Muslim Conflicts and Interfaith Bridge-building Efforts in Nigeria', *The Review of Faith & International Affairs*, 8.1 (2010), 31–38.

¹¹⁶ E A Jah and D K Mabas, 'Inter-Faith Dialogue, Peace Building and Conflict Transformation in Nigeria', *Wukari International Studies Journal*, 6.2 (2022), 22–22.

¹¹⁷ A F Olowo, 'A Discourse on Inter-Religion Tension in a Pluralized Nigeria: Examining the Role of Interfaith Dialogue as a Panacea', 2021.

¹¹⁸ E A Babagario, 'Education and Interfaith Development in Northern Nigeria', in *Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa* (Cham: Springer International Publishing, 2022), pp. 255–272.

¹¹⁹ D O Iweze, 'Boko Haram Insurgency, Interfaith Dialogue, and Peacebuilding in Kano: Examining the Kano Covenant', *African Conflict & Peacebuilding Review*, 11.1 (2021), 32–54.

Pengaruh Agama terhadap Keadilan Transisi

Secara umum, kontribusi agama terhadap keadilan transisi sering kali menghasilkan perdamaian dan keadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa kontribusi ini terjadi dalam masyarakat sipil tanpa keterlibatan pemerintah langsung, sementara yang lainnya terjadi selama konflik, bukan setelahnya.¹²⁰

Para pemimpin agama sering kali terlibat dalam mediasi antara pemerintah dan oposisi, kerja sama antara pemimpin agama yang berbeda, serta membangun 'zona damai' dan mendidik masyarakat tentang penyelesaian konflik. Mereka juga aktif dalam upacara rekonsiliasi dan membangun persahabatan.¹²¹

Di Afrika, misalnya, gereja-gereja Katolik dan Protestan di Chili dan Brasil telah menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan menyampaikan informasi ini kepada komisi kebenaran setelah transisi demokrasi. Di Guatemala, Uskup Agung Juan Gerardi dari Gereja Katolik meluncurkan Proyek Pemulihan Memori Sejarah (REMHI) yang mengesankan. Tokoh-tokoh agama juga telah melobi pemerintah di Afrika Selatan, Rwanda, Sierra Leone, dan Mozambik untuk membentuk komisi kebenaran.¹²²

Ketika lembaga-lembaga ini terbentuk, para pemimpin agama sering kali terlibat dalam operasi mereka, memberikan dukungan logistik dan memasukkan ide rekonsiliasi ke dalam wacana publik. Namun, di beberapa negara seperti Rwanda, gereja-gereja tidak berperan signifikan dalam upaya tingkat negara bagian untuk mengatasi masa lalu, meskipun mereka telah memberikan pernyataan pertobatan.¹²³

Pendekatan keyakinan terhadap keadilan transisi sering kali berfokus pada hal-hal pribadi seperti membangun hubungan dan mengubah pikiran dan hati. Hal ini merupakan ciri khas dan aset penting dalam pendekatan teologis,

¹²⁰ J Piereder, 'The Imam and the Pastor: Attempts at Peace in Nigeria Using Interfaith Dialogue', *Laurier Undergraduate Journal of the Arts*, 1.1 (2014), 71–85.

¹²¹ E A Babagario, 'Interfaith Education and the Quest for Peacebuilding in Northern Nigeria', 2019.

¹²² D Iweze, 'The Role of Religious Leaders in Fostering Inter-Faith Dialogue Amid Bokco Haram Insurgency in Kano, Northern Nigeria', *Journal of Central and Eastern European African Studies*, 2.1 (2022).

¹²³ D Iweze.

baik dalam praktik maupun teori. Seperti yang dicatat oleh John Paul Lederach, rekonsiliasi melibatkan pertobatan, permintaan maaf, penyembuhan permusuhan, dan tema-tema lain yang ditemukan dalam teologi rekonsiliasi.¹²⁴

B. Konflik Agama

Konflik agama merupakan fenomena yang kompleks dan mendalam, yang dapat didefinisikan sebagai pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda. Secara etimologis, kata “konflik” berasal dari bahasa Latin “conflictus,” yang berarti benturan atau pertempuran. Dalam konteks sosial, konflik ini mencakup pertentangan yang muncul akibat perbedaan pendapat, nilai, atau kepentingan, di mana konflik agama sering kali bersifat ideologis dan emosional, berakar pada keyakinan, nilai, dan praktik yang dianut oleh masing-masing kelompok. Menurut Johan Galtung, seorang ahli konflik, konflik agama dapat terjadi ketika perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan menghasilkan ketegangan sosial. Ia berpendapat bahwa konflik ini seringkali bersifat struktural, di mana ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pengakuan menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok agama.

Sejarah mencatat banyak contoh konflik agama, salah satunya adalah Perang Salib yang terjadi antara abad ke-11 hingga ke-13. Perang ini merupakan serangkaian konflik bersenjata antara umat Kristen Eropa dan umat Islam di Timur Tengah, yang dipicu oleh keinginan umat Kristen untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Islam. Selain itu, konflik agama dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti faktor ideologis, di mana setiap agama memiliki keyakinan, doktrin, dan nilai-nilai yang dianggap benar oleh pengikutnya. Ketika ajaran atau praktik suatu agama dianggap mengancam atau bertentangan dengan agama lain, konflik sering kali muncul. Contohnya, ketegangan antara Kristen dan Islam seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai konsep ketuhanan dan penyelamatan.

Faktor sosial dan budaya juga berkontribusi dalam munculnya konflik agama. Perbedaan budaya, tradisi, dan norma sosial sering kali menyebabkan

¹²⁴ J Hundu, ‘The Role of Theological Librarians in Fostering Interfaith Dialogue in Nigeria’, *Theological Librarianship*, 17.1 (2024), 1–9.

kesalahpahaman dan stereotip negatif antaragama. Dalam banyak kasus, konflik ini diperburuk oleh diskriminasi sosial dan ekonomi yang dialami oleh kelompok agama tertentu. Misalnya, konflik antara komunitas Hindu dan Muslim di India seringkali dipicu oleh perbedaan budaya dan identitas yang saling bertentangan. Selain itu, politik memainkan peran penting dalam konflik agama. Politisi kadang-kadang memanfaatkan perbedaan agama untuk menggalang dukungan atau mencapai tujuan politik tertentu. Di Timur Tengah, konflik antara kelompok Sunni dan Syiah seringkali dipolitisasi oleh pemerintah yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Ketidakadilan ekonomi dan distribusi sumber daya yang tidak merata juga dapat menjadi pemicu konflik agama. Ketika kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, ketegangan dapat muncul. Contoh nyata dapat dilihat di Nigeria, di mana konflik antara komunitas Muslim dan Kristen seringkali dipicu oleh persaingan untuk mendapatkan akses terhadap tanah dan sumber daya lainnya. Dampak dari konflik agama sangat signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Ketegangan antaragama sering kali menciptakan perpecahan dalam masyarakat, mengarah pada diskriminasi, pengucilan, dan kekerasan. Dalam banyak kasus, komunitas yang terlibat dalam konflik agama mengalami trauma kolektif yang berpengaruh pada hubungan sosial mereka.

Dari sisi ekonomi, konflik agama dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana banyak orang kehilangan mata pencaharian mereka. Negara-negara yang mengalami konflik agama berkepanjangan, seperti Afghanistan dan Somalia, sering kali mengalami kehancuran ekonomi akibat ketidakstabilan dan kekerasan. Di tingkat politik, konflik agama dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Ketika agama digunakan sebagai alat politik, hal ini dapat memperburuk ketegangan dan menghasilkan kekerasan yang meluas. Dalam beberapa kasus, konflik agama bahkan dapat menyebabkan perang saudara, seperti yang terjadi di Suriah.

Namun, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik agama. Salah satunya adalah melalui dialog antaragama, yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan toleransi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Inisiatif ini bisa melibatkan pertemuan antara pemimpin agama, diskusi publik, dan program pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai bersama. Selain itu, pendidikan yang

menekankan toleransi dan pemahaman antaragama juga merupakan langkah penting dalam mencegah konflik. Kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kerukunan dan pengertian antaragama dapat membantu membentuk generasi yang lebih toleran dan inklusif.

Organisasi masyarakat sipil juga dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik agama. Dengan mengadvokasi hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial, organisasi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua komunitas agama. Inisiatif yang dipimpin oleh kelompok lintas agama dapat membantu rehabilitasi komunitas pasca-konflik. Terakhir, kebijakan pemerintah yang inklusif dan adil dapat mengurangi ketegangan agama. Pemerintah perlu menciptakan ruang bagi semua kelompok agama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa hak-hak semua komunitas dijunjung tinggi. Dengan demikian, penyelesaian konflik agama memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan perdamaian dan kohesi sosial yang berkelanjutan.

C. Teori Pembangunan Sosial

Bagian ini disusun berdasarkan dua perspektif berbeda dalam memahami pembangunan sosial: teori dan penelitian. Menurut Bowlby, keterikatan bayi dengan pengasuhnya merupakan landasan bagi semua perkembangan sosial di masa depan.¹²⁵ Keterikatan ini bersifat biologis dan bertujuan untuk memastikan bahwa bayi dan anak-anak mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup hingga mereka mampu berfungsi secara mandiri.

Ainsworth, menemukan empat kategori keterikatan yang berbeda: keterikatan aman (sekitar 65%), keterikatan menghindar-tidak aman (sekitar 20%), keterikatan cemas-ambivalen (sekitar 10%), dan keterikatan disorganisasi-disorientasi (sekitar 5%).¹²⁶ Menurut Ainsworth, pola

¹²⁵ J Bowlby, 'The Bowlby-Ainsworth Attachment Theory', *Behavioral and Brain Sciences*, 2.4 (1979), 637–638.

¹²⁶ K N Levy and S J Blatt, 'Attachment Theory and Psychoanalysis: Further Differentiation within Insecure Attachment Patterns', *Psychoanalytic Inquiry*, 19.4 (1999), 541–575.

keterikatan yang berkembang pada masa bayi dan balita cukup stabil sepanjang hidup.¹²⁷

Penelitian Sroufe terhadap anak-anak yang menghadiri perkemahan musim panas pada usia 10 tahun menunjukkan bahwa anak-anak dengan ikatan yang aman cenderung memiliki lebih banyak teman dan keterampilan sosial yang lebih baik.¹²⁸ Studi *cross-sectional* Engles menunjukkan bahwa anak usia 15-18 tahun dengan keterikatan orang tua yang baik memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan kompetensi yang lebih tinggi dalam mengembangkan persahabatan dan hubungan romantis.¹²⁹

Ainsworth juga menemukan bahwa anak dengan keterikatan cemas-ambivalen berisiko tinggi mengalami masalah perilaku di kemudian hari, termasuk perilaku agresif. Data ini menunjukkan pentingnya memberikan kesempatan kepada sepertiga anak-anak yang belum mengembangkan keterikatan yang aman untuk memperbaiki hubungan keterikatan yang asli atau membangun keterikatan di luar rumah, mungkin melalui interaksi dengan guru atau mentor.¹³⁰

Erikson menyumbangkan teori penting lainnya tentang pembangunan sosial melalui teori psikososial perkembangan kepribadian, yang menekankan interaksi antara domain sosial dan emosional. Erikson menyoroti pentingnya seseorang menyelesaikan serangkaian konflik di mana hubungan interpersonal memainkan peran penting.¹³¹

Pada masa bayi, konflik utama adalah antara Kepercayaan dan Ketidakpercayaan. Erikson berhipotesis bahwa bayi akan mengembangkan rasa percaya melalui interaksi dengan pengasuh yang hangat, siap sedia, dan

¹²⁷ S Malik and others, 'Using an Attachment-Informed Framework in the Clinical Care of Children and Adolescents: A Review of Attachment Theory and Its Impact on Developmental Psychopathology', *Psychiatric Annals*, 51.7 (2021), 300–315.

¹²⁸ L A Sroufe, 'Attachment and Development: A Prospective, Longitudinal Study from Birth to Adulthood', *Attachment & Human Development*, 7.4 (2005), 349–367.

¹²⁹ R C Engles and others, 'Parental Attachment and Adolescents' Emotional Adjustment: The Associations with Social Skills and Relational Competence', *Journal of Counseling Psychology*, 48.4 (2001), 428.

¹³⁰ P M Crittenden and M D Ainsworth, '14 Child Maltreatment and Attachment Theory', in *Child Maltreatment: Theory and Research on the Causes and Consequences of Child Abuse and Neglect*, 1989, pp. 432–463.

¹³¹ T N Crawford and others, 'The Course and Psychosocial Correlates of Personality Disorder Symptoms in Adolescence: Erikson's Developmental Theory Revisited', *Journal of Youth and Adolescence*, 33.5 (2004), 373–387.

responsif. Sebaliknya, interaksi dengan pengasuh yang negatif atau tidak responsif akan menyebabkan bayi mengembangkan rasa ketidakpercayaan.¹³²

Keberhasilan dalam tahap ini memungkinkan anak menghadapi tahap berikutnya pada masa balita, yaitu Otonomi versus Rasa Malu dan Keraguan. Pada tahap ini, anak yang telah mengembangkan dasar kepercayaan akan lebih mungkin merasa mandiri dan mengendalikan perilaku serta lingkungannya sendiri.¹³³

Tahap-tahap berikutnya, yaitu Inisiatif versus Rasa Bersalah dan Industri versus Inferioritas, sangat penting bagi para pendidik. Pada usia dini, anak mulai terlibat dalam pendidikan formal dan harus belajar mengintegrasikan minat mereka dalam eksplorasi pribadi dan penggunaan imajinasi dengan kerja sama dalam tugas kelompok.¹³⁴

Pada usia sekolah dasar, tugas mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan pribadi dengan kepentingan dan kebutuhan orang lain menjadi lebih kompleks. Anak-anak harus belajar mengikuti peraturan, menyelesaikan tugas dengan benar, mengambil sudut pandang orang lain, dan bekerja sama dalam proyek kelompok. Kegagalan dalam tahap ini dapat membuat anak merasa tidak mampu bertindak sendiri atau mengembangkan rasa rendah diri, tidak produktif, dan tidak kompeten secara sosial.¹³⁵

Vygotsky, seorang ahli teori terkenal dalam pembangunan sosial dan pendidikan, berpendapat bahwa fungsi kognitif berhubungan dengan dunia eksternal atau sosial.¹³⁶ Ia melihat anak sebagai magang yang dibimbing oleh orang dewasa dan teman sebaya yang lebih kompeten dalam dunia sosial.

¹³² J C Malone and others, 'Midlife Eriksonian Psychosocial Development: Setting the Stage for Late-Life Cognitive and Emotional Health', *Developmental Psychology*, 52.3 (2016), 496.

¹³³ M Syed and K C McLean, 'Erikson's Theory of Psychosocial Development', 2017.

¹³⁴ S Seligman and R S Shanok, 'Subjectivity, Complexity and the Social World Erikson's Identity Concept and Contemporary Relational Theories', *Psychoanalytic Dialogues*, 5.4 (1995), 537-565.

¹³⁵ G T Sorell and M J Montgomery, 'Feminist Perspectives on Erikson's Theory: Their Relevance for Contemporary Identity Development Research', *Identity: An International Journal of Theory and Research*, 1.2 (2001), 97-128.

¹³⁶ J R Tudge and P A Winterhoff, 'Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the Relations between the Social World and Cognitive Development', *Human Development*, 36.2 (1993), 61-81.

Vygotsky menjelaskan bahwa anak belajar secara sistematis dan logis melalui dialog dan interaksi dengan penolong yang terampil dalam zona perkembangan proksimal (ZPD). Batas bawah ZPD adalah aktivitas yang dapat dilakukan anak sendiri tanpa bantuan, sedangkan batas atas ZPD adalah hasil belajar yang belum dapat dicapai anak meskipun dengan bantuan.¹³⁷

Vygotsky juga memperkenalkan konsep scaffolding, yakni proses dimana guru secara bertahap mengurangi bantuan seiring dengan kemampuan anak yang meningkat. Guru akan terus terlibat dalam tahap awal pengajaran dan secara bertahap mengurangi dukungan ketika anak menunjukkan penguasaan sebagian keterampilan atau tugas.¹³⁸

Bandura, mengidentifikasi tiga kategori pengaruh terhadap pengembangan kompetensi sosial: perilaku yang diamati anak-anak dan remaja di rumah atau budaya mereka, faktor kognitif seperti harapan keberhasilan, dan faktor sosial seperti iklim kelas dan sekolah.¹³⁹

Model determinisme timbal balik Bandura menyatakan bahwa ketiga pengaruh ini saling berkaitan dan setiap perubahan pada satu faktor akan mempengaruhi faktor lainnya.¹⁴⁰ Misalnya, keyakinan anak terhadap diri dan kompetensinya dapat mempengaruhi perilaku sosial dan lingkungan kelas, yang pada gilirannya akan mempengaruhi efikasi diri anak.¹⁴¹ Banyak peneliti mendukung pandangan timbal balik ini tentang perkembangan diri.

Sebut saja Bronfenbrenner, memberikan wawasan mendalam mengenai dampak lingkungan terhadap perkembangan manusia melalui teori ekologi yang menyatakan bahwa manusia berkembang dalam serangkaian tiga sistem lingkungan.¹⁴² Pada inti teorinya adalah mikrosistem, yang mencakup

¹³⁷ I LEARNING, 'Vygotsky and Sociocultural Approaches to Teaching and Learning', *Handbook of Psychology, Educational Psychology*, 7 (2012), 117.

¹³⁸ A L Brown, K E Metz, and J C Campione, 'Social Interaction and Individual Understanding in a Community of Learners: The Influence of Piaget and Vygotsky', in *Piaget Vygotsky* (Psychology Press, 2013), pp. 145–170.

¹³⁹ A Bandura and others, 'Self-efficacy Beliefs as Shapers of Children's Aspirations and Career Trajectories', *Child Development*, 72.1 (2001), 187–206.

¹⁴⁰ A Bandura, 'Adolescent Development from an Agentic Perspective', *Self-Efficacy Beliefs of Adolescents*, 5.1–43 (2006).

¹⁴¹ A Bandura, 'Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning', *Educational Psychologist*, 28.2 (1993), 117–148.

¹⁴² U Bronfenbrenner, 'Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives', *Adolescents and Their Families*, 2013, 1–20.

lingkungan di mana individu menghabiskan sebagian besar waktunya. Sekolah dan ruang kelas dianggap sebagai mikrosistem yang penting bagi perkembangan sosial anak-anak. Selain itu,¹⁴³

Bronfenbrenner menekankan pentingnya makrosistem yang mencakup faktor-faktor luas seperti peralihan dari era pertanian ke era industri hingga era informasi. Ia juga menyoroiti mesosistem sebagai penghubung antara berbagai mikrosistem, seperti hubungan antara pengalaman keluarga dan sekolah, serta sebagai penafsir makrosistem bagi individu.¹⁴⁴

Karya Bronfenbrenner mendukung pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara keluarga dan sekolah dalam perkembangan sosial anak. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan anak untuk bergaul dengan teman sebaya adalah prediktor terbaik adaptasi orang dewasa, bukan prestasi akademik atau kecerdasan.¹⁴⁵

Wentzle menemukan bahwa perilaku prososial dan antisosial berhubungan signifikan dengan nilai akademik dan preferensi guru.¹⁴⁶ Anak yang dapat menyesuaikan diri secara sosial lebih mungkin sukses secara akademis. Caprara, mencatat bahwa agresi dan perilaku maladaptif lainnya mengurangi keberhasilan akademik dengan 'merusak upaya akademik dan menciptakan kondisi yang mengasingkan secara sosial' bagi anak yang agresif.¹⁴⁷

Penelitian lain menunjukkan bahwa keterlambatan perkembangan sosial pada masa kanak-kanak meningkatkan risiko perilaku maladaptif seperti antisosial, kriminalitas, dan penggunaan narkoba di kemudian hari. Kazdin

¹⁴³ U Bronfenbrenner, 'Ecological Models of Human Development', *International Encyclopedia of Education*, 3.2 (1994), 37–43.

¹⁴⁴ U Bronfenbrenner and M., 'Recent Advances in Research on the Ecology of Human Development. Development as Action in Context: Problem Behavior and Normal Youth Development', *Eastern Economic Journal*, 13.1 (1986), 287–309 .

¹⁴⁵ M Crawford, 'Ecological Systems Theory: Exploring the Development of the Theoretical Framework as Con-Ceived by Bronfenbrenner', *J Pub Health Issue Pract*, 4.2 (2020), 170.

¹⁴⁶ K R Wentzel, 'Does Being Good Make the Grade? Social Behavior and Academic Competence in Middle School', *Journal of Educational Psychology*, 85.2 (1993), 357.

¹⁴⁷ M P Eisner and T Malti, 'Aggressive and Violent Behavior', *Handbook of Child Psychology and Developmental Science: Socioemotional Processes*, 3 (2015), 794–841.

mencatat bahwa korelasi antara agresi pada usia prasekolah dan usia 10 tahun lebih tinggi dibandingkan korelasi antara IQ dan agresi.¹⁴⁸

Studi terhadap siswa usia pertengahan kanak-kanak dan remaja menunjukkan bahwa keterampilan sosial yang diperoleh pada pendidikan awal berkaitan dengan keterampilan sosial dan kinerja akademik sepanjang usia sekolah. Malecki dan Elliot menemukan bahwa keterampilan sosial dapat memprediksi kinerja akademik saat ini dan masa depan.¹⁴⁹ Mitchell dan Elias menemukan bahwa prestasi akademik di kelas tiga paling erat kaitannya dengan kompetensi sosial di kelas dua.¹⁵⁰

Capara dan koleganya menemukan bahwa perubahan prestasi di kelas delapan dapat diprediksi dengan mengukur kompetensi sosial anak di kelas tiga. Di tingkat sekolah menengah, Scales et al. mengukur 'aset perkembangan' siswa (hubungan positif, peluang, keterampilan, nilai-nilai, dan persepsi diri) dan hubungannya dengan prestasi akademik.¹⁵¹

Siswa kelas tujuh, delapan, dan sembilan yang memiliki 'aset perkembangan' lebih tinggi memiliki IPK lebih tinggi di kelas sepuluh hingga dua belas dibandingkan mereka yang memiliki aset lebih sedikit. Temuan ini mendukung bahwa fokus pada perkembangan sosial dan emosional akan mendorong pencapaian akademik di sekolah menengah.

Studi oleh Herbert-Myers, menggambarkan kompleksitas pengembangan kompetensi sosial. Mereka menemukan bahwa keterhubungan sosial, kepatuhan, dan ketidakpatuhan terhadap permintaan teman sebaya diprediksi oleh keterampilan bahasa yang terjadi secara bersamaan, sementara impulsivitas dan kurangnya perhatian penting untuk memahami toleransi terhadap frustrasi dengan teman sebaya.¹⁵² Bahasa dan keterampilan yang

¹⁴⁸ A E Kazdin, 'Problem Solving and Parent Management in Treating Aggressive and Antisocial Behavior', 1996.

¹⁴⁹ C K Malecki and S N Elliot, 'Children's Social Behaviors as Predictors of Academic Achievement: A Longitudinal Analysis', *School Psychology Quarterly*, 17.1 (2002), 1.

¹⁵⁰ M J Elias and N M Haynes, 'Social Competence, Social Support, and Academic Achievement in Minority, Low-Income, Urban Elementary School Children', *School Psychology Quarterly*, 23.4 (2008), 474.

¹⁵¹ P C Scales, 'Building Students' Developmental Assets to Promote Health and School Success', *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 74.2 (2000), 84–88.

¹⁵² W Huitt and C Dawson, 'Social Development: Why It Is Important and How to Impact It', *Educational Psychology Interactive*, 20.1 (2011), 80–100.

digunakan dalam permainan pada usia tiga tahun berhubungan langsung dengan kompetensi bahasa dan keterampilan perhatian pada usia delapan tahun.¹⁵³ Kesimpulan mereka adalah bahwa keterampilan sosial dan bahasa awal mempengaruhi kompetensi sosial di kemudian hari melalui cara langsung dan tidak langsung.

Selain itu, perlu kiranya penulis sampaikan di sini teori dan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan sosial, dengan menyoroti beberapa isu penting. *Pertama*, kecerdasan sosial dan kompetensi sosial, meski didefinisikan beragam oleh para ahli teori dan peneliti, keduanya mengacu pada beberapa komponen utama seperti pandangan diri, kognisi sosial, kesadaran sosial, pengaturan diri, serta keterampilan sosial.¹⁵⁴

Kedua, pandangan diri individu, diformulasikan dalam konteks lingkungan sosial yang dihadapi, berperan sebagai elemen penting dalam pengembangan kompetensi sosial, beragam sesuai dengan situasi sosial yang dihadapi oleh individu.¹⁵⁵

Ketiga, Hubungan kompleks antara perkembangan sosial, perkembangan sosial awal dan kompetensi dasar yang menyertainya tidak selalu berhubungan secara linier dengan perkembangan sosial berikutnya. pendekatan sistem memberikan kerangka terbaik untuk memahami dan mempengaruhi perkembangan kompetensi sosial, baik dari sudut pandang individu maupun lingkungan tempat perkembangan itu terjadi.¹⁵⁶

Penelitian mengenai intervensi sosial dan emosional pada masa kanak-kanak awal menunjukkan potensi positif dalam mempengaruhi perilaku sosial maladaptif. Hemmeter, Ostrosky, dan Fox merangkum bahwa hasil intervensi

¹⁵³ T Mortimore and A Zsolnai, 'Inclusive Education and Social Competence Development', in *Unpublished Academic Paper* (Hungary: Faculty of Arts, Institute of Education, University of Szeged, 2015).

¹⁵⁴ G Fink and M Yolles, 'Understanding Normative Personality And Its Intelligences', In *Iaccm 10 Th Annual Conference And 3 Rd Cems Ccm/Iaccm Doctoral Workshop, University Of Ruse, Bulgaria-2011 Cultural Aspects Of Cross-Border Cooperation: Cometences And Capabilities*, P. 82.

¹⁵⁵ Q Song and Q Wang, 'Mother-Child Reminiscing about Peer Experiences and Children's Peer-related Self-views and Social Competence', *Social Development*, 22.2 (2013), 280-299.

¹⁵⁶ P J LaFreniere and L A Sroufe, 'Profiles of Peer Competence in the Preschool: Interrelations between Measures, Influence of Social Ecology, and Relation to Attachment History', *Developmental Psychology*, 21.1 (1985), 56.

dini mencakup penurunan agresi, peningkatan hubungan dengan teman sebaya, keberhasilan akademis, serta pengendalian diri yang lebih baik.¹⁵⁷

Mempengaruhi Perkembangan Sosial

Pengembangan awal kompetensi sosial terjadi di rumah dan dimulai dari keterikatan bayi dengan pengasuh utama. Kualitas interaksi orang tua-bayi memainkan peran penting dalam perkembangan keterikatan yang berkualitas. Kepekaan pengasuh terhadap kebutuhan psikologis dan perilaku bayi menjadi faktor utama. Bukti menunjukkan bahwa kepekaan ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga bisa dipelajari.¹⁵⁸

Saat bayi berkembang menjadi balita dan memasuki masa kanak-kanak awal, dimensi lain seperti kehangatan orang tua dan batasan perilaku mulai menjadi penting. Brooks-Gunn, menekankan bahwa keterampilan ini tidak berkembang secara otomatis pada semua orang tua, sehingga pendidikan keluarga harus menjadi bagian dari program pengembangan anak usia dini.¹⁵⁹

Penelitian terkini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial-emosional (SEL) pada anak-anak prasekolah hingga kelas satu sangat penting bagi perkembangan sosial. Otak anak yang masih berkembang dan interaksi sosial pertama mereka di luar rumah menjadi faktor krusial. Program SEL sering kali berfokus pada kesiapan belajar di lingkungan formal, namun kritikus berpendapat bahwa sekolah tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran keluarga dan masyarakat.¹⁶⁰

Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph, dan Strain mengadvokasi pendekatan seluruh sekolah dalam pengembangan kompetensi sosial dan emosional anak. Model mereka berbentuk piramida dengan kegiatan yang dirancang untuk

¹⁵⁷ S A Denham and K M Zinsser, 'Social and Emotional Learning during Early Childhood', *Encyclopedia of Primary Prevention and Health Promotion*, 2014, 925–935.

¹⁵⁸ Y M Caldera and E W Lindsey, 'Coparenting, Mother-Infant Interaction, and Infant-Parent Attachment Relationships in Two-Parent Families', *Journal of Family Psychology*, 20.2 (2006), 275.

¹⁵⁹ K Magnuson and H Schindler, 'Supporting Children's Early Development by Building Caregivers' Capacities and Skills: A Theoretical Approach Informed by New Neuroscience Research', *Journal of Family Theory & Review*, 11.1 (2019), 59–78.

¹⁶⁰ K L Bierman and M Motamedi, 'Social and Emotional Learning Programs for Preschool Children', in *Handbook of Social and Emotional Learning: Research and Practice*, 2015, pp. 135–151.

seluruh pemangku kepentingan di bagian bawah dan intervensi individual di bagian atas, tingkatan ini meliputi:

1. Membangun hubungan positif dengan anak, keluarga, dan rekan kerja.
2. Merancang lingkungan yang mendukung di sekolah dan kelas.
3. Mengajarkan kesadaran dan keterampilan sosial-emosional.
4. Mengembangkan intervensi individual untuk anak-anak dengan tantangan perilaku spesifik.¹⁶¹

Brooks-Gunn menyarankan bahwa sekolah harus memiliki komponen pendidikan orang tua dalam program anak usia dininya.¹⁶² Hattie menemukan bahwa lingkungan rumah dan keterlibatan orang tua dengan sekolah adalah dua dari variabel paling signifikan dalam memprediksi prestasi akademik anak.¹⁶³

Berbagai peneliti seperti Epstein dan Sanders, Henderson dan Mapp, serta Roehlkepartain, Benson, dan Sesma menyimpulkan bahwa hubungan yang positif antara rumah, sekolah, dan komunitas menciptakan iklim sosiokultural yang kondusif bagi berbagai hasil perkembangan yang diinginkan.¹⁶⁴

Lingkungan yang Mendukung Perkembangan Sosial

Meskipun lingkungan rumah memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan sosial, Sroufe menunjukkan bahwa kualitas interaksi sosial setelah masa bayi dapat mengubah pengalaman keterikatan awal.¹⁶⁵ Lingkungan belajar yang aman dan mendukung dianggap penting oleh siswa.

¹⁶¹ S Reaves and others, 'The Need for Performance Standards in Preschools: Stealing Shamelessly from Comprehensive School Mental Health Literature', *Perspectives on Early Childhood Psychology and Education*, 6.2 (2022), 9.

¹⁶² J Brooks-Gunn and L B Markman, 'The Contribution of Parenting to Ethnic and Racial Gaps in School Readiness', *The Future of Children*, 2005, 139–168.

¹⁶³ I S Song and J Hattie, 'Home Environment, Self-Concept, and Academic Achievement: A Causal Modeling Approach', *Journal of Educational Psychology*, 76.6 (1984).

¹⁶⁴ M S Nabukeera, 'The Role Of A Teacher In Developing And Implementing A Holistic Model In Youth Personality Development At Higher Education', 2018.

¹⁶⁵ L A Sroufe and others, 'Placing Early Attachment Experiences in Developmental Context', in *Attachment from Infancy to Adulthood: The Major Longitudinal Studies*, 2005, pp. 48–70.

Bub menyebutkan bahwa anak-anak memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan sedikit masalah perilaku ketika berada di kelas prasekolah, kelas satu, dan tiga yang lebih mendukung secara emosional daripada hanya berfokus pada akademis.¹⁶⁶

Program yang fokus pada perkembangan sosial juga mencakup pembelajaran sosial emosional (SEL). Pendukung SEL tidak mengurangi fokus pada pembelajaran akademis, tetapi mengadvokasi kurikulum yang seimbang antara pembelajaran akademik dan sosial/emosional.¹⁶⁷ Penelitian menunjukkan bahwa fokus pada SEL dapat membantu pembelajaran akademik dan meningkatkan nilai ujian akademik.

Wang, Haertel, dan Walberg menemukan bahwa 8 dari 11 kategori paling berpengaruh yang memprediksi peningkatan pembelajaran akademik berkaitan dengan faktor sosial dan emosional seperti interaksi sosial, iklim kelas, dan hubungan dengan teman sebaya.¹⁶⁸ Elias mendukung temuan tersebut, menyatakan bahwa ketika sekolah memperhatikan keterampilan sosial dan emosional siswa, prestasi akademik meningkat, perilaku bermasalah menurun, dan kualitas hubungan meningkat.¹⁶⁹

Ryan dan Patrick menemukan bahwa ketika siswa merasa didorong untuk berinteraksi dan membantu teman sekelas, melihat kelas sebagai tempat yang menghargai ide mereka, serta memiliki guru yang pengertian dan suportif, mereka cenderung menerapkan pola pembelajaran yang lebih adaptif.¹⁷⁰ Tindakan sederhana seperti menyapa siswa di pintu dengan menyebutkan namanya, memasang hasil karya siswa, memberikan pujian, dan

¹⁶⁶ K L Bub, K McCartney, and J B Willett, 'Behavior Problem Trajectories and First-Grade Cognitive Ability and Achievement Skills: A Latent Growth Curve Analysis', *Journal of Educational Psychology*, 99.3 (2007), 653.

¹⁶⁷ K A Schonert-Reichl, 'Social and Emotional Learning and Teachers', *The Future of Children*, 2017, 137–155.

¹⁶⁸ M C Wang, G D Haertel, and H J Walberg, 'Fostering Educational Resilience in Inner-City Schools', *Publication Series*, 4, 1997.

¹⁶⁹ Elias and Haynes.

¹⁷⁰ A M Ryan and H Patrick, 'The Classroom Social Environment and Changes in Adolescents' Motivation and Engagement during Middle School', *American Educational Research Journal*, 38.2 (2001), 437–460.

mengirimkan catatan positif kepada orang tua dapat mempengaruhi iklim kelas secara signifikan.¹⁷¹

Mengintegrasikan Kompetensi Akademik dan Sosial

Pengembangan kompetensi sosial di sekolah dapat dilakukan dengan empat pendekatan utama:

1. Mengintegrasikan fokus pada pengembangan sosial dalam metode pengajaran tradisional.
2. Mengembangkan pembelajaran akademik yang menekankan pengembangan kompetensi sosial.
3. Mengembangkan pendekatan holistik dengan koneksi ke kurikulum dan penilaian yang mencakup pembangunan sosial sebagai salah satu domain utama.
4. Mengajarkan keterampilan sosial secara langsung.¹⁷²

Pendekatan Think-Pair-Square-Share yang melibatkan interaksi sosial siswa dalam setiap langkah pembelajaran.¹⁷³ Proyek seperti CASEL dan Lesson Planet menyediakan berbagai sumber daya untuk rencana pembelajaran yang mendukung pengembangan sosial emosional.¹⁷⁴

Metode seperti sistem 4MAT oleh McCarthy (2000) dan program *Character through the Arts* oleh Leonard Bernstein mengintegrasikan pengembangan kompetensi sosial dengan pembelajaran akademik.¹⁷⁵ Pendekatan ini menekankan interaksi sosial dan pendekatan konstruktivis dalam setiap langkah pembelajaran. Program ini mengintegrasikan

¹⁷¹ T K Smith, F Connolly, and C Pryseski, *Positive School Climate: What It Looks like and How It Happens. Nurturing Positive School Climate for Student Learning and Professional Growth* (Baltimore Education Research Consortium, 2014).

¹⁷² I Tomory, 'Cooperative Methods and Development of Social Competence in Training of Technical Teachers', *Int. J. Eng. Pedagog*, 10.5 (2020), 49–61.

¹⁷³ M A Yaqin, S E Indriwati, and H Susilo, 'Think-Pair-Square Learning: Improving Student's Collaborative Skills and Cognitive Learning Outcome on Animal Diversity Course', *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 4.2 (2018), 135–142.

¹⁷⁴ J Bridgeland, M Bruce, and A Hariharan, *The Missing Piece: A National Teacher Survey on How Social and Emotional Learning Can Empower Children and Transform Schools. A Report for CASEL* (Civic Enterprises, 2013).

¹⁷⁵ B A Gueldner, L L Feuerborn, and K W Merrell, *Social and Emotional Learning in the Classroom: Promoting Mental Health and Academic Success* (Guilford Publications, 2020).

keterampilan yang terkait dengan pandangan holistik tentang perkembangan manusia, mirip dengan yang dianjurkan oleh CASEL dan Narvaez

Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan pentingnya mengembangkan sistem manajemen kelas yang mendukung pengajaran yang dipilih, serta perlunya kurikulum yang seimbang antara pengembangan akademik dan sosial/emosional untuk mencapai hasil perkembangan yang optimal.¹⁷⁶

Ada berbagai program yang menggunakan pendekatan holistik untuk mengembangkan anak-anak dan remaja, tidak hanya dalam pengembangan pelajaran dan unit, tetapi juga dalam menilai kompetensi di berbagai domain. Program “*Habits of Mind*” yang dikembangkan oleh Costa dan Kallick menggambarkan 16 kebiasaan pikiran yang perlu dikembangkan oleh anak-anak dan remaja.¹⁷⁷ Beberapa di antaranya terkait dengan kompetensi dalam domain emosional (dengarkan dengan pemahaman dan empati, merespons dengan keajaiban dan kekaguman, dan menemukan humor) dan domain sosial (berpikir dan berkomunikasi dengan kejelasan dan presisi; berpikir secara saling tergantung).

Salah satu pendekatan berbasis sekolah paling lengkap adalah program *International Baccalaureate* (IB), yang intinya mencakup profil pelajar dengan sembilan atribut yang diinginkan. Profil ini mencakup atribut sosial (komunikator dan berpikiran terbuka), diri (seimbang dan reflektif), kognitif (berpengetahuan dan pemikir), afektif (peduli), konatif (pengambil risiko), dan moral (berprinsip).¹⁷⁸

Mengajarkan Keterampilan Sosial Secara Langsung

Ketika keterampilan sosial perlu diajarkan secara langsung untuk mempersiapkan siswa bekerja dalam kelompok kooperatif. Departemen Pendidikan di Contra Costa County, California menyediakan sumber yang bagus dengan pelajaran yang mencakup berbagai topik, termasuk keterampilan

¹⁷⁶ E Müller and others, ‘Using Integrated Arts Programming to Facilitate Social and Emotional Learning in Young Children with Social Cognition Challenges’, *Early Child Development and Care*, 2019.

¹⁷⁷ K Alexander and P Vermette, ‘Implementing Social and Emotional Learning Standards by Intertwining the Habits of Mind with the CASEL Competencies’, *Excelsior: Leadership in Teaching and Learning*, 12.1 (2019), 4.

¹⁷⁸ M Hayden, ‘The International Baccalaureate (IB) and International Education’, in *The International Baccalaureate Diploma Programme* (Routledge, 2006), pp. 39–58.

dasar seperti memperkenalkan diri, membaca bahasa tubuh, keterampilan sosial di kelas seperti mendengarkan dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok, keterampilan berinteraksi dengan teman sebaya, dan keterampilan berinteraksi dengan orang dewasa.¹⁷⁹

Organisasi Wings for Kids juga menyediakan pelajaran sampel untuk pengembangan kompetensi sosial, seperti mengekspresikan emosi, menjadi sadar sosial, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mengatasi kemarahan dan stress. Sumber daya lainnya tersedia dari Teacher Vision yang menawarkan pelajaran yang mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional dengan konten akademik.¹⁸⁰

Merancang pelajaran yang membahas pengembangan keterampilan sosial dan emosional harus dilakukan dalam konteks lingkungan belajar yang mendukung. Norris mengemukakan bahwa mengembangkan program manajemen kelas di seluruh sekolah yang berfokus pada keterampilan sosial dan emosional adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah ini.¹⁸¹

Manajemen kelas tidak hanya menetapkan iklim untuk belajar, tetapi juga merupakan tempat di mana kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional terlihat paling langsung.¹⁸² Proses ini harus dilihat sebagai upaya jangka panjang yang melibatkan pelatihan guru, keterlibatan orang tua, dan pengembangan sistematis serta praktik keterampilan oleh anak-anak.

Guru menemukan bahwa dengan meluangkan waktu untuk mengajarkan keterampilan sosial dan emosional secara langsung, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menangani masalah manajemen kelas dan lebih banyak waktu untuk mengajarkan konten akademik. Zins mengemukakan bahwa ada hubungan erat antara pembelajaran sosial dan emosional dengan

¹⁷⁹ I Oberman, *Challenged Schools, Remarkable Results: Three Lessons from California's Highest Achieving High Schools. A Report on Findings from Year Two of the California Best Practices Study Conducted by Springboard Schools* (Springboard Schools, 2005).

¹⁸⁰ J E Grusec, 'Socialization Processes in the Family: Social and Emotional Development', *Annual Review of Psychology*, 62.1 (2011), 243–269.

¹⁸¹ J A Norris, 'Looking at Classroom Management through a Social and Emotional Learning Lens', *Theory into Practice*, 42.4 (2003), 313–318.

¹⁸² Taufikin Taufikin and others, 'Praktik Kewirausahaan Di Madrasah Ibtida'iyah Negeri 1 Kota Bandung', *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.32332/elementary.v8i1.4590>>.

keberhasilan akademik.¹⁸³ Contoh yang baik dari pengajaran keterampilan ini adalah program *Conscious Discipline* yang dikembangkan oleh Bailey. Program ini didasarkan pada dua prinsip utama: (1) disiplin kelas harus difokuskan pada pengembangan komunitas daripada hanya mematuhi aturan, dan (2) otak manusia terstruktur untuk memproses informasi dengan cara tertentu.¹⁸⁴

Dalam perspektif ini, penting untuk fokus pada pengembangan pemikiran, emosi, konatif, dan keterampilan sosial siswa. Program ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tujuh kekuatan: persepsi, persatuan, perhatian, kehendak bebas, cinta, penerimaan, dan niat. Guru dan siswa bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengembangkan kekuatan-kekuatan ini.

Meski sekolah berupaya menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pengembangan keterampilan sosial bagi semua siswa, selalu ada anak-anak dan remaja yang memerlukan dukungan tambahan, terutama mereka yang mengalami masalah mental, emosional, atau perilaku. Siswa dengan gangguan spektrum autisme (ASD) atau gangguan emosi dan perilaku (EBD) seringkali memerlukan pendekatan yang lebih khusus.¹⁸⁵

White, Keonig, dan Scahill menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk membantu siswa-siswa ini mengembangkan kompetensi sosial.¹⁸⁶ Penelitian Winner meninjau tiga teori yang menjelaskan defisit pada anak-anak dengan ASD yang mempengaruhi perkembangan sosial mereka: teori koherensi pusat, teori disfungsi eksekutif, dan teori pikiran.

1. Teori Koherensi Pusat: Anak-anak dengan ASD seringkali fokus pada detail konkret sehingga mereka kesulitan menghubungkannya dengan gambaran yang lebih besar.

¹⁸³ J E Zins and others, 'The Scientific Base Linking Social and Emotional Learning to School Success', *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 17.2-3 (2007), 191-210.

¹⁸⁴ B Bailey, 'Conscious Discipline', 2003.

¹⁸⁵ E Clinton, 'Comorbidity of Autism Spectrum Disorders and Emotional/Behavioral Disorders: Towards Improved Diagnostic Procedures, Instructional Programming, and Personnel Preparation', *Journal on Educational Psychology*, 9.4 (2016), 38-43.

¹⁸⁶ S Williams White, K Keonig, and L Scahill, 'Social Skills Development in Children with Autism Spectrum Disorders: A Review of the Intervention Research', *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37 (2007), 1858-1868.

2. Teori Disfungsi Eksekutif: Anak-anak ini mungkin kesulitan menciptakan struktur organisasi yang fleksibel dan memprioritaskan tugas-tugas sehari-hari.
3. Teori Pikiran: Anak-anak dengan ASD mungkin kesulitan memahami dan melacak apa yang diketahui atau dipikirkan orang lain selama interaksi sosial.¹⁸⁷

Dalam tinjauan literatur tentang pengajaran keterampilan sosial kepada siswa dengan EBD, Maag menemukan bahwa meskipun banyak penelitian telah dilakukan, ada perbedaan antara mengembangkan keterampilan sosial (praktik perilaku spesifik) dan kompetensi sosial (kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan serta bekerja dalam kelompok). Maag menyimpulkan bahwa pengembangan keterampilan sosial tidak selalu berarti pengembangan kompetensi sosial.¹⁸⁸

Intervensi yang ditinjau oleh Maag mencakup berbagai teori pembelajaran seperti pengondisian operan (latihan, penguatan), pemrosesan informasi (penetapan tujuan, pemecahan masalah), pengamatan (pemodelan), dan kognitif sosial (diskusi kelompok, pemantauan diri, evaluasi diri).¹⁸⁹

Efektivitas Intervensi Keterampilan Sosial pada Siswa

Secara umum, meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi keterampilan sosial hanya memiliki dampak moderat terhadap perilaku siswa dengan gangguan emosional dan perilaku (EBD) dengan ukuran efek sebesar 0,35. Kesimpulannya adalah bahwa dampak pelatihan keterampilan sosial pada siswa EBD berkisar dari “mengecewakan hingga optimis secara hati-hati”. Saran terbaik untuk guru adalah mengembangkan intervensi yang sangat terarah untuk setiap individu, berdasarkan defisit utama yang perlu mereka

¹⁸⁷ Y Kimhi, Y Mirsky, and N Bauminger-Zviely, ‘The Role of Theory of Mind, Executive Functions, and Central Coherence in Reading Comprehension for Children with ASD and Typical Development’, *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2024, 1–16.

¹⁸⁸ J W Maag, ‘Promoting Social Skills Training in Classrooms: Issues for School Counselors’, *The School Counselor*, 42.2 (1994), 100–113.

¹⁸⁹ J W Maag, ‘Integrating Consultation into Social Skills Training: Implications for Practice’, *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 3.3 (1992), 233–258.

atasi. Keberhasilan yang dicapai akan sebanding dengan intervensi yang dirancang oleh para ahli.¹⁹⁰

Pendidik yang tertarik mengembangkan kompetensi sosial siswa harus menyeimbangkan tuntutan sekolah untuk bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang diukur dengan tes akademik standar dan memperhatikan aspek perkembangan siswa lainnya. Namun, penekanan pada akademik telah mengurangi waktu untuk bidang lain seperti seni dan musik, serta istirahat, yang penting bagi perkembangan sosial dan emosional siswa.¹⁹¹ Oleh karena itu, orang tua, pendidik, dan masyarakat harus memastikan upaya untuk mengembangkan kompetensi sosial siswa dilakukan dengan akuntabilitas dan didukung oleh bukti yang terukur dan dievaluasi secara sistematis.

Gresham memberikan contoh tujuan bernilai sosial yang menjadi perhatian masyarakat, orang tua, dan pendidik, seperti kehadiran sekolah, rujukan disiplin, dan suspensi sekolah. Faktor-faktor terkait nonschool seperti interaksi dengan penegakan hukum dan perilaku berisiko rendah juga relevan. Indikator-indikator ini berguna untuk mengevaluasi kesehatan mental dan kesejahteraan komunitas, namun kurang sensitif dalam mengevaluasi program berbasis sekolah jangka pendek.¹⁹²

Ada berbagai instrumen standar yang telah digunakan untuk menilai keterampilan dan kompetensi sosial. Contoh instrumen tersebut termasuk Kuisisioner Usia dan Tahapan (ASQ), Bagian Emosional Sosial ASQ (ASQ: SE), Tes Skrining Perkembangan Denver, dan Evaluasi Status Perkembangan Orang Tua (PED).¹⁹³

Instrumen-instrumen ini terutama digunakan untuk skrining awal guna mengidentifikasi anak-anak yang berisiko. Penggunaan instrumen ini sering kali diinstruksikan oleh pemerintah negara bagian dan lokal untuk

¹⁹⁰ J A Gersib and S Mason, 'A Meta-Analysis of Behavior Interventions for Students with Emotional-Behavioral Disorders in Self-Contained Settings', *Behavioral Disorders*, 48.4 (2023), 269–283.

¹⁹¹ D Kahan, 'Recess, Extracurricular Activities, and Active Classrooms: Means for Increasing Elementary School Students' Physical Activity', *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 79.2 (2008), 26–39.

¹⁹² F M Gresham and others, 'Screening, Assessment, Treatment, and Outcome Evaluation of Behavioral Difficulties in an RTI Model', *Exceptionality*, 21.1 (2013), 19–33.

¹⁹³ Gresham and others.

mengidentifikasi anak-anak yang mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan sosial dan emosional mereka.¹⁹⁴

Namun, meskipun instrumen-instrumen tersebut bermanfaat dalam menggambarkan karakteristik siswa saat memasuki sekolah, mereka tidak dirancang untuk menilai perubahan perkembangan sosial dan emosional anak selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, instrumen ini memiliki keterbatasan dalam menilai perkembangan kompetensi sosial secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa instrumen penyaringan ini tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria dalam penilaian kesiapan sekolah anak.¹⁹⁵

Sebaiknya, instrumen ini digunakan bersama dengan pendekatan lain, seperti observasi di lingkungan alami, untuk meningkatkan validitas keputusan penempatan. Selain itu, instrumen-instrumen ini harus dikelola oleh personel yang terlatih dan berkualifikasi untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan dan analisis data.¹⁹⁶

Dalam penelitian tentang kompetensi sosial dan emosional untuk anak-anak dan remaja usia K-12, terdapat tiga penilaian standar yang sering digunakan, yaitu: Skala Perilaku Sosial Sekolah (SSBS2), Skala Perilaku Sosial Rumah dan Komunitas (HCSBS), dan Sistem Peringkat Keterampilan Sosial (SSR). Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengevaluasi kompetensi sosial dan perilaku antisosial dari perspektif yang berbeda, baik dari sudut pandang guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri.¹⁹⁷

HCSBS adalah instrumen yang dirancang untuk digunakan oleh orang tua dan pengasuh dan terdiri dari dua subskala utama: kompetensi sosial dan perilaku antisosial. Penelitian yang dilakukan oleh Sion dan Jenvey menunjukkan perbedaan penilaian antara orang tua dan guru, di mana orang

¹⁹⁴ K L Lane, F M Gresham, and T E O'Shaughnessy, 'Serving Students with or At-Risk for Emotional and Behavior Disorders: Future Challenges', *Education and Treatment of Children*, 2002, 507–521.

¹⁹⁵ D Osher and others, 'A Comprehensive Approach to Promoting Social, Emotional, and Academic Growth in Contemporary Schools', *Best Practices in School Psychology*, 4 (2008), 1263–1278.

¹⁹⁶ R O Welsh, 'Overlooked Exclusionary Discipline: Examining Placement in Alternative Schools, Expulsions, and Referrals to Hearing in an Urban District', *Educational Policy*, 36.3 (2022), 550–586.

¹⁹⁷ S Prince-Embury, D H Saklofske, and A K Vesely, 'Measures of Resiliency', in *Measures of Personality and Social Psychological Constructs* (Academic Press, 2015), pp. 290–321.

tua cenderung menilai anak-anak mereka lebih tinggi pada kompetensi sosial dan lebih rendah pada perilaku antisosial dibandingkan dengan penilaian guru. Hal ini menjadi tantangan penting ketika pendidik berusaha berkomunikasi dengan orang tua mengenai perilaku anak-anak mereka di sekolah.¹⁹⁸

SSR, yang dikembangkan oleh Gresham dan Elliott, terdiri dari tiga kuesioner terpisah untuk guru, orang tua, dan siswa dengan keterampilan membaca kelas tiga.¹⁹⁹ Instrumen ini mencakup tiga subskala utama: keterampilan sosial, perilaku bermasalah, dan kompetensi akademik. Penelitian yang dilakukan oleh McKown menunjukkan bahwa tingkat keterampilan SEL (kesadaran nonverbal, makna sosial, dan penalaran sosial) adalah prediktor yang baik dari skor pada subskala kompetensi sosial SSR.²⁰⁰

Sistem Peningkatan Keterampilan Sosial (SSIS), yang dikembangkan oleh Gresham dan Elliott, adalah pengganti SSR dan dirancang untuk meningkatkan penilaian kompetensi sosial dan intervensi berbasis sekolah.²⁰¹ Selain itu, Inisiasi-Respons Penilaian (IRA) merupakan proses observasi perilaku kelas yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kompetensi sosial siswa saat terlibat dalam tugas pembelajaran kooperatif.

Dengan menggunakan berbagai instrumen ini, peneliti dan pendidik dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kompetensi sosial dan emosional anak-anak dan remaja, serta merancang intervensi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan mereka.

Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data mengenai perilaku kelas melalui proses yang terstandarisasi. Selama periode delapan minggu, siswa kelas satu direkam saat mereka terlibat dalam empat kegiatan berbeda dua kali. Video yang diambil kemudian dikodekan berdasarkan keterlibatan

¹⁹⁸ Mandi L Burnette and others, 'Pathways from Harsh Parenting to Adolescent Antisocial Behavior: A Multidomain Test of Gender Moderation', *Development and Psychopathology*, 24.3 (2012), 857–70.

¹⁹⁹ James Clyde Diperna and Robert J Volpe, 'Self-report on the Social Skills Rating System: Analysis of Reliability and Validity for an Elementary Sample', *Psychology in the Schools*, 42.4 (2005), 345–54.

²⁰⁰ Nathalie Catherine Marie Berard, 'Executive Function, Social Emotional Learning, and Social Competence in Autism Spectrum Disorder' (Faculty of Graduate Studies and Research, University of Regina, 2014).

²⁰¹ Michael James Vance, *Examination of the Relationship between Specific Classes of Social Skill Behaviors and Academic Competence on the Social Skills Improvement System Rating-Scales* (Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, 2012).

anak dalam empat kategori interaksi sosial: (1) frekuensi interaksi sosial (apakah interaksi tersebut diarahkan pada tujuan atau non-tujuan), (2) bantuan/mendorong/fasilitatif (HEF), (3) tingkat keterlibatan tugas secara keseluruhan (ON/Off-Task atau Kooperatif), dan (4) perilaku negatif (lemah atau kuat).²⁰²

Skor dari kategori-kategori ini dibandingkan dengan Skala Perilaku Sosial Sekolah (SSB) yang dikembangkan oleh Merrell. Dari data perilaku, empat skor ringkasan dikembangkan.²⁰³ Penulis melaporkan bahwa “korelasi antara skor IRA dan SSB” umumnya sejalan dengan harapan terhadap SSB dan subskalanya, namun mereka mencatat bahwa interpretasi korelasi ini sulit dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Keuntungan dari mengembangkan protokol observasi untuk keterampilan sosial dan kompetensi sosial adalah guru yang dilatih sebagai pengamat menjadi lebih peka terhadap perilaku spesifik yang mereka amati. Dengan mengembangkan video interaksi sosial standar dari anak-anak dan remaja, dan menggunakan video tersebut untuk melatih pendidik, metode ini bisa menjadi cara yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang valid dan andal mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan penting terkait kompetensi sosial.

Namun, perbandingan instrumen yang digunakan untuk menilai keterampilan sosial dan kompetensi sosial menunjukkan bahwa, menurut Caldarella dan Merrell, tiga dimensi (hubungan sejawat, manajemen diri, keberhasilan akademik) tercakup sekitar setengah dari waktu, sementara dua dimensi lainnya (kepatuhan dan pernyataan) tercakup sekitar sepertiga dari waktu. Variasi perilaku spesifik dalam dimensi-dimensi ini juga sangat beragam.²⁰⁴

²⁰² Kelli D Cummings, Ruth A Kaminski, and Kenneth W Merrell, ‘Advances in the Assessment of Social Competence: Findings from a Preliminary Investigation of a General Outcome Measure for Social Behavior’, *Psychology in the Schools*, 45.10 (2008), 930–46.

²⁰³ Anne Arnesen and others, ‘Validation of the Elementary Social Behaviour Assessment: Teacher Ratings of Students’ Social Skills Adapted to Norwegian, Grades 1–6’, *Emotional and Behavioural Difficulties*, 23.1 (2018), 39–54.

²⁰⁴ Paul Caldarella and Kenneth W Merrell, ‘Common Dimensions of Social Skills of Children and Adolescents: A Taxonomy of Positive Behaviors’, *School Psychology Review*, 26.2 (1997), 264–78.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaksana proyek untuk secara cermat membandingkan perilaku spesifik yang dinilai oleh instrumen dengan perilaku yang relevan dalam proyek tersebut, guna memastikan adanya kesesuaian yang cukup. Ada kemungkinan bahwa perubahan dalam pengetahuan sosial, sikap, keterampilan, dan kompetensi sosial tidak selalu tercermin dalam proses penilaian.

Warnes, Sheridan, Geske, dan Warnes juga memberikan peringatan penting mengenai penggunaan penilaian standar untuk mempelajari perilaku sosial. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi keterampilan sosial yang penting bagi siswa kelas dua dan lima.²⁰⁵ Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perilaku sosial yang dianggap penting dapat berubah dalam waktu yang singkat.

Pembangunan sosial muncul sebagai sub-bidang khusus dalam studi pembangunan pada tahun 1950-an meskipun akhirnya dapat dilacak pada kegiatan dan program pembangunan lokal di negara-negara yang baru merdeka.²⁰⁶ Negara-negara di benua Asia dan Afrika, seperti India, yang sebelumnya dikenal sebagai negara berkembang atau dunia ketiga, merupakan contoh awal dari fokus pada pembangunan sosial.

Midgley mencatat bahwa pada tahun 1960-an, intensitas inisiatif pembangunan ini semakin meningkat. Di negara-negara tersebut, telah diakui secara luas bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai dengan pembangunan sosial. Mengingat sejarah kolonial dan eksploitasi sosial-ekonomi yang dialami negara-negara ini, peran aktif negara dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat penting.²⁰⁷

Partha Chatterjee mengemukakan bahwa dalam kerangka politik perwakilan, negara pembangunan harus berperan sebagai pengalokasi pusat

²⁰⁵ Efrosini Kalyva and Ioannis Agaliotis, 'Developing the Social Skills of Students with Disabilities through Peer Tutoring: Implications for Inclusion', *AT Heatherton and VA Walcott, Handbook of Social Interactions in the 21 St Century*, 2009, 193–215.

²⁰⁶ Vidu Soni, 'Chapter II "Public Administration" to "Good Governance" in Developing Countries: The Evolution of a Sub-Field in Political Science', *Governing Development across Cultures: Challenges and Dilemmas of an Emerging Sub-Discipline in Political Science*, 2006, 67.

²⁰⁷ James Midgley, 'Growth, Redistribution, and Welfare: Toward Social Investment', *Social Service Review*, 73.1 (1999), 3–21.

untuk melegitimasi otoritas politiknya.²⁰⁸ Dengan demikian, pembangunan sosial harus sejalan dengan pembangunan ekonomi, karena tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan seluruh masyarakat.

Selain itu, penekanan pada pembangunan sosial semakin besar setelah Perang Dunia II, saat Jepang dan negara-negara Eropa sedang memulihkan diri dari kehancuran dan keruntuhan ekonomi akibat perang.²⁰⁹ Oleh karena itu, pembangunan sosial terus berkembang sebagai proses yang berkelanjutan. James Midgley membagi proses pembangunan sosial menjadi tiga tahap: *pertama*, situasi sosial yang ingin diubah; *kedua*, proses pembangunan sosial itu sendiri; dan *ketiga*, tujuan akhir yang ingin dicapai melalui pembangunan sosial.²¹⁰

Untuk memahami pembangunan sosial dengan lebih mendalam, penting untuk melihat dua paradigma teoritis dominan dalam pembangunan: teori modernisasi dan teori ketergantungan. Teori modernisasi muncul setelah Perang Dunia II, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara adidaya utama.²¹¹ Pada saat yang sama, dekolonisasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menghadapi tantangan besar, di mana negara-negara baru merdeka dan ‘terbelakang’ harus berjuang untuk mencapai pembangunan sambil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan yang baru diperoleh.

Menurut para ahli teori modernisasi, masyarakat modern dianggap lebih produktif dibandingkan dengan masyarakat non-modern. Smelser, seperti yang diungkapkan oleh So, berpendapat bahwa masyarakat modern mengalami diferensiasi struktural, di mana struktur yang kompleks dan multifungsi dibagi menjadi berbagai struktur khusus yang masing-masing menjalankan satu

²⁰⁸ Ashwani Saith, ‘Development on the Periphery: Exit and Exile’, in *Cambridge Economics in the Post-Keynesian Era: The Eclipse of Heterodox Traditions* (Springer, 2022), pp. 765–843.

²⁰⁹ Charles S Maier, ‘The Politics of Productivity: Foundations of American International Economic Policy after World War II’, *International Organization*, 31.4 (1977), 607–33.

²¹⁰ James Midgley, ‘The Theory and Practice of Developmental Social Work’, *Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work*, 2010, 3–28.

²¹¹ Ulrich Herbert, ‘Europe in High Modernity. Reflections on a Theory of the 20th Century’, *Journal of Modern European History*, 5.1 (2007), 5–21.

fungsi tertentu.²¹² Sebagai contoh, keluarga telah mengalami perubahan besar dari peran tradisionalnya; kini, keluarga berfungsi sebagai unit inti yang lebih kecil, sementara fungsi-fungsi awalnya telah diambil alih oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Rostow mengemukakan teori lima tahap modernisasi, yang mencakup masyarakat tradisional, kondisi pra-lepas landas, proses lepas landas, dorongan menuju kedewasaan, dan masyarakat dengan konsumsi massal yang tinggi.²¹³ Bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang melalui Marshall Plan dan Alliance for Progress di Amerika Latin terinspirasi oleh model modernisasi Rostow. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa modernisasi merupakan proses Eropaisasi (atau Amerikanisasi) yang bersifat homogenisasi secara bertahap, tidak dapat diubah, panjang, dan progresif.

Teori ketergantungan, yang muncul pada 1950-an, merupakan gabungan dari gagasan neo-Marxis dan teori ekonomi Keynes.²¹⁴ Andre Gunder Frank menyatakan bahwa “keterbelakangan adalah kondisi yang ditandai dengan proses kemunduran yang berkelanjutan”. Frank dan ilmuwan sosial lainnya, seperti Walter Rodney, mengembangkan teori ketergantungan Neo-Marxis yang menyatakan bahwa “eksploitasi terus-menerus terhadap negara-negara berkembang oleh negara-negara industri kaya menyebabkan daerah-daerah tersebut mengalami lebih banyak keterbelakangan”.²¹⁵ Kedua paradigma penting ini menyoroti ‘pembangunan yang terdistorsi’ yang terjadi akibat kesenjangan antara masyarakat.

James Midgley menjelaskan bahwa pembangunan yang terdistorsi berarti “pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pembangunan sosial menciptakan ketidakseimbangan yang serius antara kemakmuran

²¹² Neil J Smelser and Seymour Martin Lipset, ‘Social Structure, Mobility and Development’, in *Social Structure and Mobility in Economic Development* (Routledge, 2018), pp. 1–50.

²¹³ Walt Whitman Rostow, *Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present: With a Perspective on the next Century* (Oxford University Press, 1992).

²¹⁴ Ingrid Harvold Kvangraven, ‘Dependency Theory: Strengths, Weaknesses, and Its Relevance Today’, in *A Modern Guide to Uneven Economic Development* (Edward Elgar Publishing, 2023), pp. 147–70.

²¹⁵ Andre Gunder Frank, ‘The Development of Underdevelopment’, in *Imperialism* (Routledge, 2023), pp. 26–36.

ekonomi dan kesejahteraan sosial.²¹⁶ Di banyak negara, masalah utamanya bukanlah kurangnya pembangunan ekonomi, melainkan bahwa pembangunan ekonomi tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk”. Oleh karena itu, esensi dari pembangunan sosial adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Namun, teori modernisasi dan pembangunan sering kali mempromosikan cita-cita Barat secara luas, yang menimbulkan tantangan bagi kekhasan masyarakat non-Barat di Asia dan Afrika. Midgley menekankan perlunya memahami konsep pembangunan sosial dari perspektif non-Barat dan memberikan perhatian lebih pada kondisi budaya lokal untuk menjadikan pembangunan sebagai proses yang benar-benar inklusif.²¹⁷

Secara ringkas, pembangunan sosial muncul dalam konteks negara-negara yang baru merdeka pasca-Perang Dunia II, di mana model modernisasi menciptakan ‘pembangunan yang terdistorsi’ yang mencerminkan ketidakseimbangan antara kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial, baik antar negara maupun di dalam negara.²¹⁸

Model modernisasi Barat sering kali mengaitkan pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi atau Produk Domestik Bruto, menganggap bahwa pembangunan sosial memerlukan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam ketergantungan dan keterbelakangan dibandingkan negara-negara maju, yang merupakan kritik mendasar terhadap teori modernisasi.

Perbedaan sosial antara masyarakat non-Barat dan masyarakat Barat maju belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsep pembangunan sosial non-Barat agar dapat mencakup kondisi budaya lokal secara lebih menyeluruh, sehingga pembangunan dapat menjadi proses yang benar-benar inklusif. Perbedaan

²¹⁶ James O Midgley, ‘Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare’, 1995.

²¹⁷ Mel Gray, “‘Think Globally and Locally, Act Globally and Locally’”: A New Agenda for International Social Work Education”, in *Routledge International Handbook of Social Work Education* (Routledge, 2016), pp. 3–13.

²¹⁸ Hemant Shah, ‘Race, Mass Communication, and Modernization: Intellectual Networks and the Flow of Ideas’, in *Anti-Racism and Multiculturalism* (Routledge, 2017), pp. 21–54.

antara masyarakat Barat dan non-Barat terlihat jelas dalam proses pembangunan sosial yang, menurut James Midgley, melibatkan tiga tahap.

Pertama, situasi sosial yang ada yang ingin diubah; *kedua*, proses pembangunan sosial itu sendiri; dan *ketiga*, hasil akhir dari proses tersebut. Setelah fenomena pembangunan sosial dirumuskan secara teoritis, kita dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk memahami dan mendefinisikan pembangunan sosial.²¹⁹

Midgley mendefinisikan pembangunan sosial sebagai “proses perubahan sosial terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam konteks proses pembangunan yang dinamis dan kompleks.” Ia memahami pembangunan sosial sebagai strategi inklusif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat dalam konteks yang lebih luas.²²⁰

Midgley juga menyoroti berbagai pendekatan terhadap pembangunan sosial, termasuk pendekatan statistik yang diusulkan oleh Myrdal, yang melibatkan perencanaan sosial sebagai pendekatan top-down. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.²²¹

Pendekatan ekonomi liberal menekankan peran pasar dalam pencapaian pembangunan sosial dengan mengintegrasikan masyarakat ke dalam kegiatan ekonomi berbasis pasar, seperti yang dibahas oleh de Soto. Pawar, menyajikan berbagai definisi tentang pembangunan sosial dan menjelaskan berbagai pendekatan yang ada.

1. Pembangunan Sosial sebagai Perencanaan Sistematis dan Inklusif: Midgley mendefinisikan pembangunan sosial yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi sebagai “proses perubahan sosial terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi yang dinamis.” Ini

²¹⁹ James E Midgley and Leverett Davis Jr, ‘Calculation by a Moment Technique of the Perturbation of the Geomagnetic Field by the Solar Wind’, *Journal of Geophysical Research*, 68.18 (1963), 5111–23.

²²⁰ James Midgley and Christian Aspalter, ‘Developmental Social Policy: Theory and Implementation’, in *Development and Social Policy* (Routledge, 2016), pp. 44–72.

²²¹ James Midgley, ‘Social Investment: Concepts, Uses and Theoretical Perspectives’, in *Social Investment and Social Welfare* (Edward Elgar Publishing, 2017), pp. 13–32.

mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.²²²

2. Pembangunan Sosial sebagai Perubahan Struktural: Pathak menggambarkan pembangunan sosial sebagai konsep komprehensif yang melibatkan perubahan struktural besar dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup reorganisasi sistem ekonomi dan sosial, perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, serta perubahan dalam sikap dan adat istiadat masyarakat.²²³ Perspektif *New Social Development* (NSD) menawarkan pandangan menarik dengan fokus pada transformasi masyarakat pasca-material dan pembangunan identitas manusia, komunitas, dan bangsa.
3. Pembangunan Sosial sebagai Aspek Pembangunan yang Manusiawi: Pembangunan sosial sangat penting karena menekankan aspek pembangunan yang manusiawi. Paiva menyoroti dua dimensi utama dari pembangunan sosial: kapasitas masyarakat untuk terus bekerja demi kesejahteraan mereka, dan pengembangan lembaga-lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia pada semua tingkat, terutama yang paling bawah.²²⁴
4. Aspalter dan Singh mendefinisikan pembangunan sosial sebagai perubahan terencana dan terarah yang memungkinkan masyarakat mencapai kebahagiaan, kepuasan, dan kehidupan damai yang lebih besar.²²⁵ Pembangunan sosial juga dipandang sebagai proses partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dimensi integratif merujuk pada penguatan ikatan sosial dan persaudaraan antar manusia. Sharma mendefinisikan pembangunan sosial sebagai “peningkatan tatanan sosial yang normatif dan integratif.” Dalam

²²² James Midgley, ‘Diffusion and the Development of Social Policy: Evidence from the Third World’, *Journal of Social Policy*, 13.2 (1984), 167–84.

²²³ Pathik Pathak, ‘Ethopolitics and the Financial Citizen’, *The Sociological Review*, 62.1 (2014), 90–116.

²²⁴ Paula Cristina Pelli Paiva and others, ‘Development and Validation of a Social Capital Questionnaire for Adolescent Students (SCQ-AS)’, *PLoS One*, 9.8 (2014), e103785.

²²⁵ Christian Aspalter, ‘On the Notions of Development and Evolution: A Concluding Note’, in *Super Inequality: Theoretical Essays in Economics and Social Policy* (Springer, 2023), pp. 111–22.

konteks India, Sharma mengidentifikasi tiga konsep pembangunan sosial. *Pertama*, sebagai peningkatan kesejahteraan sosial; *kedua*, sebagai transformasi menuju masyarakat yang lebih egaliter; dan *ketiga*, sebagai peningkatan tatanan sosial yang normatif dan integratif.²²⁶

Dengan demikian, Sharma melihat pembangunan sosial sebagai perbaikan pada dua aspek utama—normatif dan integratif—dalam pembangunan masyarakat memperingatkan bahwa “pandangan yang salah tentang pembangunan sosial muncul dari pemisahan antara individu dan masyarakat, atau antara masyarakat dan individu yang membentuknya.” Secara singkat, pembangunan sosial mencakup proses yang lebih luas yang melibatkan aspek ekonomi, perubahan struktural, dan akhirnya, aspek kemanusiaan. Ini adalah proses integral yang meningkatkan kapasitas individu dan mereorientasikan lembaga-lembaga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.²²⁷

Ciri-ciri penting dan dimensi utama pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan fenomena kompleks yang telah berkembang melalui berbagai faktor dan mengalami perubahan serta kesinambungan. Memahami karakteristik dan dimensi pembangunan sosial membantu kita memahami ruang lingkungannya. James Midgley telah membahas karakteristik penting pembangunan sosial.

1. Pembangunan sosial dipandang sebagai proses yang bertujuan menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.
2. Pembangunan sosial bersifat progresif karena bertujuan memperbaiki kondisi sosial yang ada melalui program, tindakan, dan kebijakan sosial.
3. Proses pembangunan sosial tidak sederhana karena melibatkan transformasi berbagai aspek masyarakat. Oleh karena itu, proses ini bersifat multifaset dan melibatkan berbagai dimensi.

²²⁶ Aashna Sharma and Gurparkash Singh, ‘Conceptualizing Corporate Social Responsibility Practice: An Integration of Obligation and Opportunity’, *Social Responsibility Journal*, 18.8 (2022), 1393–1408.

²²⁷ Alexandra Titz, Terry Cannon, and Fred Krüger, ‘Uncovering “Community”’: Challenging an Elusive Concept in Development and Disaster Related Work’, *Societies*, 8.3 (2018), 71.

4. Tujuan pembangunan sosial memerlukan intervensi dari agen eksternal, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Gerakan terorganisir dan upaya konsolidasi tindakan membantu mewujudkan pembangunan sosial.
5. Kesejahteraan sosial seluruh rakyat adalah tujuan akhir dari pembangunan sosial. Bagi para pendukungnya, pembangunan masyarakat dianggap belum lengkap sampai kesejahteraan sosial terjamin, dan pembangunan holistik hanya tercapai jika manfaat ekonomi digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
6. Pembangunan sosial juga produktif karena berdampak positif pada pembangunan ekonomi masyarakat.
7. Pembangunan sosial memiliki pandangan universal karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua orang dan menghilangkan hambatan partisipasi dalam proses pembangunan.
8. Pembangunan sosial bertujuan menyediakan kondisi sosial yang lebih baik, melindungi martabat masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial.
9. Pembangunan sosial berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mencapainya.
10. Pembangunan sosial melengkapi pembangunan ekonomi karena tujuannya adalah mencapai pembangunan holistik.
11. Pembangunan sosial mendukung keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang adil, serta meningkatkan modal sosial.
12. Pembangunan sosial bertujuan mencapai masyarakat egaliter dengan kesetaraan dalam akses dan alokasi sumber daya serta peluang.
13. Pembangunan sosial merupakan sarana untuk pengembangan holistik yang meningkatkan kemampuan individu untuk menentukan masa depan mereka sendiri, menjadikan individu sebagai agen perubahan sosial.²²⁸

Dengan ciri-ciri tersebut, kita dapat mengidentifikasi dimensi utama pembangunan sosial, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan sandang. Selain itu, kebutuhan akan pendidikan

²²⁸ James Midgley, 'Welfare and Social Development', *The SAGE Handbook of Social Work*, 2012, 94–107.

berkualitas, air dan sanitasi, layanan kesehatan, transportasi umum, dan fasilitas listrik semakin penting. Menjamin makanan bergizi bagi anak-anak dan remaja serta kesejahteraan fisik dan mental mereka juga penting. Dimensi tanggung jawab moral juga terkait dengan pembangunan sosial, dengan menanamkan semangat moral dalam diri manusia untuk memberi kembali kepada masyarakat dan meningkatkan karakter anggota masyarakat.²²⁹

Dalam masyarakat di mana manfaat pembangunan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir orang, sering terlihat perbedaan kelas, gaya hidup yang berbeda antara pedesaan dan perkotaan, serta kesenjangan ekonomi yang mencolok. Pembangunan sosial berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dengan mengurangi ketimpangan di antara anggota masyarakat.²³⁰ Hal ini melibatkan penyediaan kesempatan yang setara di semua lapisan masyarakat dan mendukung gagasan pembangunan holistik. Pembangunan sosial juga bertujuan meningkatkan etos kreatif dan budaya masyarakat dengan mengintegrasikan mereka lebih erat dengan lingkungan mereka.

Dalam bidang ekologi, pembangunan ekonomi seringkali terlalu fokus pada ekstraksi sumber daya tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Sebaliknya, pembangunan sosial berusaha menyelaraskan aspek ekonomi dengan dimensi ekologis. Untuk memenuhi kebutuhan dan membawa perubahan positif dalam kehidupan semua orang, lembaga-lembaga ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta sikap individu berperan penting. Mereka memerlukan perubahan melalui kebijakan yang mendorong inovasi dalam struktur dan fungsinya.²³¹

Oleh karena itu, pembangunan sosial mencakup dimensi sosial, ekonomi, psikologis, budaya, moral, politik, dan ekologis, bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan secara menyeluruh dengan menyeimbangkan keuntungan material dan dampak non-materialnya. Pembangunan sosial adalah sarana untuk mencapai pembangunan holistik, bukan sekadar tujuan

²²⁹ David T. Risser, 'The Social Dimension of Moral Responsibility: Taking Organizations Seriously', *Journal of Social Philosophy*, 27.1 (1996), 189–207.

²³⁰ Oleksandr Dluhopolskyi and Alina Zhukovska, 'Inclusive Development as an Instrument to Overcome Economic Inequality and Discrimination', *ECONOMICS-Innovative and Economics Research Journal*, 11.1 (2023), 11–27.

²³¹ R. Michael M'Gonigle, 'Ecological Economics and Political Ecology: Towards a Necessary Synthesis', *Ecological Economics*, 28.1 (1999), 11–26.

akhir. Proses ini rumit dan sering kali tidak berjalan lancar, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat.

Pembangunan sosial melibatkan berbagai aspek yang tidak selalu tercapai dengan mudah. Faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat pencapaian tersebut mencakup perluasan pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, komitmen politik, serta upaya untuk memajukan kesejahteraan sosial, mendorong kesetaraan, dan melindungi hak asasi manusia.²³²

Perubahan positif dalam perilaku masyarakat, seperti peningkatan kesadaran lingkungan dan pendidikan, juga berkontribusi pada pembangunan sosial. Namun, tantangan termasuk ketidaktahuan, buta huruf, kurangnya kemauan politik, dan diskriminasi berbasis kasta, kelas, bahasa, etnis, dan gender menghambat proses ini. Stereotip dan prasangka sosial serta perilaku konservatif juga menjadi penghalang bagi pembangunan sosial yang bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat.

Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, pembangunan sosial mulai diakui sebagai bidang penting dalam perencanaan dan pembangunan. Kontribusi Amartya Sen dalam ekonomi kesejahteraan mengembalikan perhatian pada dimensi manusiawi dan etis dalam tantangan ekonomi. Manusia sebagai agen perubahan utama memerlukan peningkatan kemampuan individu agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang diinginkan, sehingga perluasan pilihan menjadi prasyarat penting pembangunan. Konsepsi pembangunan sebagai kebebasan mengarah pada perluasan cakupan pembangunan, menjadikan pembangunan sosial bagian integral.²³³

Pembangunan sosial sangat penting dalam masyarakat modern karena memungkinkan orang dengan keyakinan atau nilai yang berbeda untuk hidup berdampingan.²³⁴ Pengakuan legitimasi agama lain membutuhkan apresiasi

²³² Bronwyn E Becker and Suniya S Luthar, 'Social-Emotional Factors Affecting Achievement Outcomes among Disadvantaged Students: Closing the Achievement Gap', *Educational Psychologist*, 37.4 (2002), 197–214.

²³³ Arturo Escobar, 'Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements', *Social Text*, 31/32, 1992, 20–56.

²³⁴ Maykel Verkuyten, Kumar Yogeeswaran, and Levi Adelman, 'Intergroup Toleration and Its Implications for Culturally Diverse Societies', *Social Issues and Policy Review*, 13.1 (2019), 5–35; David DeFranza and others, 'Religion and Reactance to COVID-19 Mitigation Guidelines.', *American Psychologist*, 76.5 (2021), 744.

dari pemeluk agama, terutama di kalangan generasi muda.²³⁵ Hal ini dikarenakan kaum muda masih bisa terbawa oleh berbagai paham keagamaan, termasuk yang radikal.²³⁶ Begitu banyak gerakan keagamaan radikal yang mengandalkan semangat dan kemampuan anak muda.²³⁷

Sementara itu, kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia membutuhkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, dan kesejahteraan.²³⁸ Hal ini sering terganggu karena munculnya pemicu sosial yang membuat suatu bangsa menjadi bermasalah.²³⁹ Radikalisme, ekstremisme, kekerasan, dan terorisme dipandang banyak pihak sebagai hal yang menimbulkan konflik di masyarakat.²⁴⁰

²³⁵ Nuha Albadi, Maram Kurdi, and Shivakant Mishra, 'Are They Our Brothers? Analysis and Detection of Religious Hate Speech in the Arabic Twittersphere', in *2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)* (IEEE, 2018), pp. 69–76; Robert W Hefner, 'Islam and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Critical Juncture Analysis', *The Review of Faith & International Affairs*, 18.2 (2020), 1–17.

²³⁶ Rita Augestad Knudsen, 'Measuring Radicalisation: Risk Assessment Conceptualisations and Practice in England and Wales', *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 12.1 (2020), 37–54; Patricia Hannam and Gert Biesta, 'Religious Education, a Matter of Understanding? Reflections on the Final Report of the Commission on Religious Education', *Journal of Beliefs & Values*, 40.1 (2019), 55–63.

²³⁷ Robert Jay Lifton, *Losing Reality: On Cults, Cultism, and the Mindset of Political and Religious Zealotry* (The New Press, 2019); Lionel Corbett, *Psyche and the Sacred: Spirituality beyond Religion* (Routledge, 2019).

²³⁸ Iryna Melnyk and others, 'Verbal Markers of the Concept of Peace: Psycholinguistic and Lexical Analyses', 2020; Kresbinol Labobar, 'The Advantage of Peace Theology towards Exclusive, Inclusive, and Pluralist Theology for Realizing Religious Community in Indonesia', *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 2.2 (2020), 122–43.

²³⁹ Mukhammadolim Mukhammadsidiqov, 'The Importance of Regulating the Relationship between the State and Religion in Ensuring the Stability of Society', *The Light of Islam*, 2020.2 (2020), 12–17.

²⁴⁰ Lee Jerome and Alex Elwick, 'Teaching about Terrorism, Extremism and Radicalisation: Some Implications for Controversial Issues Pedagogy', *Oxford Review of Education*, 46.2 (2020), 222–37; Daniela Pisoiu and others, 'Factors of Individual Radicalization into Extremism, Violence and Terror—the German Contribution in a Context', *International Journal of Conflict and Violence (IJCV)*, 14 (2020), 1–13; Neil Ferguson and James W McAuley, 'Radicalization or Reaction: Understanding Engagement in Violent Extremism in Northern Ireland', *Political Psychology*, 41.2 (2020), 215–30.

Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, ada klaim kebenaran yang dilakukan oleh kelompok agama.²⁴¹ Klaim ini biasanya memicu persaingan, radikalisme, ekstremisme, kekerasan, intoleransi, dan terorisme.²⁴² Hal itu menjadi penyebab situasi yang kurang kondusif yang ditandai dengan perpecahan dan konflik agama.²⁴³ Penderitaan ini tidak akan berhenti sampai orang-orang merasakan pentingnya kebersamaan.²⁴⁴

Landasan teoritis penelitian mengenai peran agama dalam pemulihan pasca-konflik di Poso, Sulawesi Tengah, dapat dibangun dengan mengkaji keterkaitan antara agama, konflik, dan pembangunan perdamaian, serta peran organisasi keagamaan dalam proses-proses tersebut. Perspektif teoretis utama meliputi:

1. Agama sebagai pemicu konflik. Agama dapat menjadi idiom konflik yang dominan, dengan ketegangan ekonomi, etnis, dan agama yang diperburuk oleh tindakan lawan politik yang mendorong dan mengeksploitasi kekerasan. Teori agama sebagai pemicu konflik menunjukkan bahwa identitas agama dapat menjadi idiom konflik yang dominan, dengan ketegangan ekonomi, etnis, dan agama yang diperburuk oleh tindakan lawan politik yang mendorong dan mengeksploitasi kekerasan.²⁴⁵ Di Poso, Sulawesi Tengah, konflik dipicu oleh faktor-faktor tersebut sehingga berujung pada spiral kekerasan.²⁴⁶

²⁴¹ Robert Mejia, Kay Beckermann, and Curtis Sullivan, 'White Lies: A Racial History of the (Post) Truth', *Communication and Critical/Cultural Studies*, 15.2 (2018), 109–26.

²⁴² Endis Firdaus, 'The Learning of Religious Tolerance among Students in Indonesia from the Perspective of Critical Study', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (IOP Publishing, 2018), CXLV, 12032; Daniel W Snook and others, 'Dominant Predictors of Violent versus Non-Violent Terrorist Roles among US Muslim Converts', *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 2022, 1–21.

²⁴³ David C Dollahite, Loren D Marks, and Hilary Dalton, 'Why Religion Helps and Harms Families: A Conceptual Model of a System of Dualities at the Nexus of Faith and Family Life', *Journal of Family Theory & Review*, 10.1 (2018), 219–41; C Vieten and D Lukoff, 'Spiritual and Religious Competencies in Psychology.', *American Psychologist*, 2022.

²⁴⁴ Francisco Soares and I Ketut Sudarsana, 'Religious Harmony Among Senior High School Students Multicultural Education Case Study in the Cova-Lima District of East Timor', *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 2.1 (2018), 154–62.

²⁴⁵ Best and Rakodi.

²⁴⁶ Human Rights Watch, *Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi* (Human Rights Watch, 2002), XIV.

2. Agama sebagai alat pembangunan perdamaian. Nilai-nilai dan norma-norma agama dapat membawa sumber daya sosial, moral, dan spiritual ke dalam proses pembangunan perdamaian.²⁴⁷ Dalam kasus Poso, para pemimpin dan organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam mendorong rekonsiliasi dan kohesi sosial.²⁴⁸
3. Persimpangan agama dan politik: Di Indonesia, agama dan politik sering kali saling terkait, dan banyak partai berbasis agama bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Persimpangan ini dapat mempengaruhi dinamika konflik dan pemulihan pasca-konflik, seperti yang terlihat pada kasus Poso.²⁴⁹
4. Peran organisasi berbasis agama: Organisasi berbasis agama semakin mengambil peran aktif dalam pembangunan perdamaian di masyarakat yang rentan dan terkena dampak konflik.²⁵⁰ Dalam kasus Poso, organisasi keagamaan telah terlibat dalam proses pembangunan perdamaian, memanfaatkan pengaruh dan sumber daya mereka untuk mendorong rekonsiliasi dan kohesi sosial.
5. Kepercayaan sosial dan pemulihan pasca-konflik: Kepercayaan sosial merupakan komponen mendasar dari modal sosial, yang dapat dilemahkan setelah terjadinya konflik kekerasan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana tingkat kepercayaan sosial telah berkembang di masyarakat Poso setelah hampir dua dekade hidup damai, memberikan wawasan mengenai dampak jangka panjang konflik terhadap dinamika sosial.²⁵¹

Dengan mengkaji perspektif teoretis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran agama dalam pemulihan pasca-konflik di Poso, Sulawesi Tengah, dan implikasinya terhadap kebijakan dan praktik dalam konteks serupa.

²⁴⁷ Githigaro.

²⁴⁸ Pulubuhu and others.

²⁴⁹ Watch, XIV.

²⁵⁰ Lorraine V Aragon, 'Development Strategies, Religious Relations, and Communal Violence in Central Sulawesi, Indonesia: A Cautionary Tale', in *Development Strategies, Identities, and Conflict in Asia* (Springer, 2013), pp. 153–82.

²⁵¹ Pulubuhu and others.

D. Peran Pemerintah dalam Konflik Agama

Peran (*role*) diartikan sebagai fungsi, lakon, dan “pola perilaku yang diharapkan secara sosial yang biasanya ditentukan oleh status seseorang dalam masyarakat tertentu” (*a socially expected behavior pattern usually determined by an individual's status in a particular society*).²⁵² Dari definisi di atas, peran dikaitkan dengan status. Di situ peran adalah sesuatu yang menempel secara wajar pada status. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Peran” adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.²⁵³

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Kemudian, jika konsep peran tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan. Secara ringkas, Kaufman (dalam Thoha, 1995: 101) menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat.

Menurut Siagian (2009:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan

²⁵² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/role> diakses tanggal 27 Mei 2017.

²⁵³ <http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip> diakses tanggal 27 Mei 2017.

untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Davey (1998: 21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, yaitu:

- a. Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2009: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator. Di sini peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan agar tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi hal itu dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator. Dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan

perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor. Sebagai pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Peran pemerintah juga dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator (Blakely, 1989: 78-81). Berikut adalah penjelasannya:

- a. Wirausaha (*entrepreneur*). Sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga

untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di masyarakat.

- b. Koordinator. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Melakukan sinergi dengan dunia usaha dan industri media digital, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. Stimulator. Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan pemerintah untuk menarik masyarakat untuk lebih serius lagi dalam melakukan usaha.

Untuk kepentingan penelitian ini, fungsi atau peran yang paling ditekankan dari pemerintah adalah peran pembangunan. Dengan pembangunan, seperti dikatakan Siagian (2009) pemerintah melakukan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan (*growth*) dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Bratakusumah, 2004).

Pembangunan, pada dasarnya, merupakan tugas pemerintah. Seperti dikatakakan oleh oleh Parsudi Suparlan dalam tulisannya tentang “Kebudayaan dan Pembangunan” (1986), pembangunan itu adalah serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek, yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.

Pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang menjadikan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Inayatullah, 1967).

Dari segi pelaksanaannya, pembangunan adalah jenis perubahan sosial di mana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik (Rogers dan Shoemaker, 1971).

Dari segi mentalitas, Kleinjans (1975) mengatakan bahwa pembangunan merupakan pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru yang pada akhirnya bukan soal teknologi atau GNP, tetapi tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.

Sedangkan dari segi partisipasi masyarakat, Rogers (1985) mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah meluasnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) oleh mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu tidak lepas dari proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun para pelaku usaha.

Pada prakteknya, pembangunan adalah salah satu di antara tugas dari negara. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini.

Untuk mencapai cita-cita ini, pemerintahan Orde Baru mempunyai tahapan-tahapan pembangunan yang disebut dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Cita-cita tersebut terus berlanjut sampai era Reformasi (pasca kejatuhan Soeharto). Namun, tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial itu “rupanya justeru makin jauh dan terpisah dengan keadaan objektif yang sungguh-sungguh diperlukan rakyat untuk perubahan.” (Abdurrahman dalam *Gatra*, 6 Desember 2006). Datanya menurut catatan Bank Dunia, sekitar 109 juta orang (49% dari penduduk Indonesia) hidup dalam kemiskinan (Praginanto dalam *Gatra*, 24 Januari 2007).

Jelaslah bahwa pembangunan itu merupakan hal yang cukup rumit dan sulit untuk diterapkan sesuai dengan pelbagai teori yang ada. Pembangunan adalah masalah pengalaman bangsa-bangsa yang dapat didialogkan mengenai kesuksesan dan kegagalannya. Dengan kata lain, pembangunan ini dapat juga diperbandingkan dengan negara-negara lain, karena proses pembangunan ini adalah proses saling belajar dari para pengelola negara. Untuk itu, dilangsungkanlah pertemuan-pertemuan internasional, yang terutama

disponsori oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Dari sini, muncullah apa yang dinamakan “Tujuan Pembangunan Milenium” atau *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.²⁵⁴

Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua.
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Menurunkan Angka Kematian Anak.
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia di mana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Pada gilirannya, MDGs ini dikoreksi dan direvisi. Maka muncul “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” atau *Sustainable Development Goals*.

²⁵⁴ <http://www.un.org/millenniumgoals/news.shtml> tentang MDGs diakses tanggal 27 Mei 2017.

Sustainable Development Goals yang disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal ini terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. Pemberantasan kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Pengentasan kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan yang sehat. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas. Menjamin pendidikan yang adil dan berkualitas, serta mendukung kesempatan untuk belajar dengan stabil di sepanjang hidup untuk semua orang tanpa kecuali.
5. Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7. Energi Yang Bersih dan Murah. Menjamin akses pada energi yang murah, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk semua, dimana terdapat pekerjaan yang layak bagi yang membutuhkannya.
9. Industri, inovasi, infrastruktur. Membangun infrastruktur yang tahan perubahan, mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, dan membantu inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan. Mengurangi kesenjangan dalam sebuah negara dan antara negara-negara.
11. Kota-kota dan komunitas yang berkelanjutan. Menciptakan kota-kota yang aman untuk semua, tahan terhadap perubahan, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung-jawab. Menjamin konsumsi dan mendukung pola-pola produksi yang berkelanjutan.
13. Beraksi untuk iklim. Mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kedamaian dan keadilan. Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
15. Kemitraan untuk pengembangan yang lestari. Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.²⁵⁵

Modernisasi menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring keberhasilan negara dunia kedua. Negara dunia ketiga juga tidak luput dari sentuhan modernisasi ala Barat tersebut. Berbagai

²⁵⁵ <http://www.un.org/sustainabledevelopment/> tentang SDGs diakses tanggal 27 Mei 2017.

program bantuan dari negara maju untuk negara dunia berkembang dengan mengatasnamakan sosial dan kemanusiaan semakin meningkat jumlahnya. Namun demikian, kegagalan pembangunan ala modernisasi di negara dunia ketiga menjadi sebuah pertanyaan serius untuk dijawab. Beberapa ilmuwan sosial dengan gencar menyerang modernisasi atas kegagalannya ini. Modernisasi dianggap tidak ubahnya sebagai bentuk kolonialisme gaya baru, bahkan Dube (1988) menyebutnya seolah musang berbulu domba.

Karenanya, sebagai kritik, muncullah pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan *basic needs* dan pendekatan *people centered development*.

- a) Pendekatan *basic needs*. Pendekatan ini berusaha melakukan koreksi terhadap pendekatan pertumbuhan. *Basic needs* meliputi: *shelter, food, health, infra structure, dan education*. Menurut pendekatan ini setiap usaha pembangunan harus memenuhi *basic needs* tersebut melalui pelayanan dan fasilitas sosial. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dominan, sehingga memperbesar ketergantungan masyarakat pada pemerintah dan pada hakekatnya dapat merendahkan martabat manusia.
- b) Pendekatan *people centered development*. Pendekatan ini merupakan penyempurnaan atau koreksi dari pendekatan sebelumnya. Disini pembangunan masyarakat harus diartikan sebagai pembangunan untuk mewujudkan "*self sustaining capacity*," artinya masyarakat mempertahankan kelangsungannya oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan mengubah peranan masyarakat dari penerima pasif menjadi anggota masyarakat yang aktif dalam pembangunan.

Oleh karena itu, muncul konsep pembangunan berbasis masyarakat atau apa yang disebut pengembangan masyarakat (*community development*). Di sini, konsep *Community Development* dipandang sebagai pembangunan alternatif yang komprehensif dan berbasis komunitas. Pembangunan masyarakat bertujuan mengembangkan tingkat kehidupan dan mempunyai cakupan seluruh komunitas. Arthur Dunham (1971) menyatakan bahwa *community development* adalah upaya-upaya terorganisasi untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan kemampuan orang untuk berpartisipasi, mengatur sendiri dan mengintegrasikan kegiatan dalam urusan-urusan masyarakat.

Pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini, masyarakat adalah partisipan sekaligus pemetik hasil pembangunan. Pengembangan masyarakat ada kalanya dipandang sebagai kebalikan dari pendekatan pengembangan *top-down* yang segalanya ditentukan dari luar komunitas.

Dalam pendekatan pengembangan masyarakat yang biasanya membentuk organisasi-organisasi masyarakat, seperti ditulis Kindervatter (1979: 46), yang memiliki komponen-komponen:

- a. Berorientasi pada kebutuhan, baik material maupun non-material.
- b. Memanfaatkan kesejatan (*indigenous*) masyarakat setempat termasuk visi dan misinya tentang masa depan.
- c. Mandiri, yang berarti mendasarkan pada kekuatan dan sumberdaya yang dimilikinya.
- d. Bersifat ekologis, yang memanfaatkan sumber daya secara rasional dan penuh kesadaran.
- e. Didasarkan pada transformasi struktural, yang berarti adanya perubahan dalam relasi sosial, kegiatan ekonomi dan struktur kekuasaan.

Dalam konteks ini, *community development* mencakup 5 elemen, yaitu: (a) fokusnya pada seluruh kebutuhan masyarakat, (b) dorongan swadaya sebagai dasar dan keseluruhan program, (c) bantuan teknis dari pemerintah atau organisasi lainnya berupa tenaga petugas, perlengkapan atau keuangan, (d) memadukan berbagai keahlian demi kepentingan masyarakat, dan (e) perencanaan dan penyusunan program berdasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tujuan utama dari *Community Organization* adalah pengembangan 'harga diri' (*dignity*) dan kepuasan berpartisipasi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, tetapi dari kedua istilah tersebut dapat diambil satu konsep yang sama yaitu sebagai proses yang memfokuskan perhatian kepada aktivitas lokal. Di bawah ini terdapat beberapa definisi tentang pembangunan masyarakat, diantaranya yang dikemukakan oleh Dunham (1971), "*Community Development can be tentatively defined as a process designed to create conditions of economic and social progress for the whole community with its active participation and the fullest possible reliance upon the community's initiative.*"

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lebih merujuk kepada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan partisipasi aktif yang didasari inisiatif masyarakat. Dalam kenyataannya, pembangunan masyarakat seharusnya tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta tetap terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang bertumpu pada rakyat, tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya (Hikmat, 2000).

Definisi lain yang diterima secara luas dikemukakan oleh PBB :

Istilah “*Community Development*” menunjukkan digunakannya berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat-masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan perpaduan diantara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat lokal yang diorganisasi. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer (Suharto, 2005).

Ada empat arah di dalam memahami pembangunan masyarakat, yaitu sebagai suatu *proses, metode, program* dan sebagai suatu *gerakan* (Hardcastle, 2004).

Community development sebagai suatu metode merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, sebagai pedoman atau arah untuk bekerja sama supaya dapat mencapai tujuan menekankan pada beberapa tujuan khusus. Perencanaan-pusat, pengembang-pengembang ekonomi, dan para profesional yang mewakili berbagai bidang, memandang pengembangan masyarakat akan membantu masyarakat untuk mencapai secara nyata tujuan-tujuan yang diinginkan mereka.

Community development sebagai suatu program, merupakan serangkaian prosedur yang berisikan tentang berbagai aktivitas dengan membawa prosedur-prosedur aktivitas yang dipandang baik atau sempurna. Sebagai gambaran adalah pelaksanaan sejumlah proyek-proyek kecil sebagai basis untuk program-program pengembangan yang lebih luas.

Perubahan ekonomi komunitas oleh Lindell dan Perry (2001) didefinisikan sebagai proses yang didalamnya warga masyarakat lokal membentuk organisasi dan membangun kemitraan yang terkait satu sama lain dengan bisnis yang menguntungkan. Dalam pengembangan ekonomi komunitas; makin banyak orang yang terlibat akan menunjukkan perubahan komunitas, makin banyak pula organisasi yang bertindak dan berupaya mendorong keinginan dan cita-cita komunitas secara keseluruhan.

Ada beberapa karakteristik program pengembangan ekonomi komunitas yang efektif yaitu (Lindell dan Perry, 2001):

1. Bersifat multifungsi dengan strategi yang komprehensif untuk berbagai kegiatan yang berjalan, sehingga berbeda dengan proyek-proyek pengembangan ekonomi individu atau upaya-upaya perbaikan komunitas.
2. Mengintegrasikan atau memadukan tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan-tujuan sosial untuk revitalisasi komunitas yang lebih jauh.
3. Mendasarkan operasinya pada prinsip memberdayakan lebih banyak penduduk melalui tata laksana pengembangan organisasi dan komunitasnya secara keseluruhan.
4. Prosesnya diarahkan pada hasil analisis dari perencanaan strategis yang berbeda dengan taktik oportunistik dan tidak sistematis.
5. Menggunakan pendekatan manajemen keuangan yang dijalankan dunia bisnis guna membangun pemilikan asset dan mendapatkan dukungan mitra finansial lain yang beragam.
6. Bersifat publik baik untuk entitas yang berorientasi keuntungan maupun berorientasi publik, watak publik menjadi fokus perhatian program.

BAB III KASUS KONFLIK AGAMA: PENGALAMAN DI POSO SULAWESI TENGAH

A. Konflik di Kabupaten Poso

Konflik Poso terdiri dari beberapa fase, *pertama* konflik terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso, meskipun terjadi kekacauan ketika truk-truk membawa kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dalam kerusuhan. Menurut pendukung teori provokator, kekerasan dimulai setelah pengumuman Arief Patanga pada 13 Desember 1998, yang menyatakan tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebagai Bupati Poso, membuka peluang bagi beberapa kandidat yang ambisius²⁵⁶. Fase ini bersamaan dengan pecahnya kekerasan dan unjuk rasa di seluruh Indonesia setelah kejatuhan Orde Baru.



(Sumber: Quora, 21/07/2024)

Konflik Pada malam Natal 24 Desember 1998, yang kebetulan bersamaan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia menikam seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi dari pihak menyatakan korban melarikan diri ke masjid setelah ditikam, sementara versi Muslim menggambarkan serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Para tokoh agama dari kedua belah pihak kemudian sepakat bahwa alkohol menjadi sumber masalah dan

²⁵⁶ Roma Tressa, 'Policy Network Dalam Kebijakan Kontra Radikalisme Di Kabupaten Poso', *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11.1 (2020), 30–42.

pemilihan di DPRD Poso. Beberapa kandidat, termasuk Patiro dan Damsyik Ladjalani, dicoret, menyisakan tiga calon. Muin Pusadan dari Partai Golkar terpilih sebagai Bupati Poso dalam pemilihan yang ketat pada Oktober 1999, meskipun hasilnya mengecewakan bagi pendukung Muslim dan Protestan.²⁵⁹

Setelah periode damai selama lebih dari satu tahun, peristiwa politik dan hukum pada bulan April 2000 menyebabkan ketegangan kembali muncul. Fase *kedua* konflik berlangsung di sepanjang garis pertempuran yang sama dengan fase sebelumnya. Persidangan saudara mantan bupati Agfar Patanga dimulai, sementara pengusaha lokal bernama Aliansa Tompo didakwa dalam kasus korupsi terkait dana program kredit pedesaan.²⁶⁰ Dana tersebut digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen yang terkait, memaksa penundaan kedua kasus tersebut.

Selain itu, posisi tertinggi kedua di Poso sedang dipertimbangkan, dan persaingannya sangat ketat. Sebuah surat kabar yang diterbitkan pada 15 April berisi pernyataan oleh Chaelani Umar, anggota DPRD provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, yang memprediksi terjadinya lebih banyak kekerasan jika mantan calon bupati Damsik Ladjalani tidak dipilih.

Pada hari berikutnya, seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda memperlihatkan luka di lengannya sebagai bukti. Sebagai balasan, pihak Muslim memulai pertarungan dengan pemuda yang kemudian berubah menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari, rumah-rumah umat di dekat terminal bus dan di Lombogia dibakar, Kapolres Poso akhirnya meminta bantuan pasukan Brigade Mobil (BRIMOB) dari Palu.²⁶¹

Kemudian pada 17 April, anggota BRIMOB menembaki massa, menewaskan dua orang dan melukai delapan orang lainnya. Pembakaran rumah dan gereja di Lombogia terjadi setelah penguburan korban. Gubernur Paliudju kemudian memenuhi tuntutan sejumlah demonstran Muslim, yang menuntut agar Ladjalani menerima posisi sekwilda, agar kasus melawan Agfar Patanga ditutup dan Kapolres dipecat, lalu pasukan BRIMOB dikirim kembali ke Palu. Pangdam Wirabuana akhirnya mengirim 600 tentara, dan pertempuran mereda.

²⁵⁹ Tampudu, 2021

²⁶⁰ Uksan.

²⁶¹ Basilica D Putranti and Y Tri Subagya, 'Jerat Bantuan, Jerit Pengungsi'.

Polisi mengumumkan berakhirnya tahap kedua pada 3 Mei 2000. Selama fase ini, kedua belah pihak mulai membedakan diri dengan mengenakan ikat kepala dan ban lengan berwarna. Para pejuang dikenal sebagai pasukan merah, sementara kelompok Muslim sebagai pasukan putih. Meskipun agama tetap menjadi faktor penting, konflik ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial, etnis, dan ekonomi, sehingga menyederhanakan konflik dengan menyebut mereka sebagai pejuang Protestan atau Muslim berisiko terlalu menyederhanakan situasi.²⁶²

Hanya tiga minggu setelah fase kedua berakhir, fase *ketiga* dimulai oleh beberapa pengamat dianggap sebagai yang terbesar dan terparah. Periode ini ditandai dengan gelombang serangan balasan oleh kelompok terhadap warga Muslim. Selain bentrokan langsung, terjadi juga penculikan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak terlibat. Wawancara oleh *Human Rights Watch* menegaskan bahwa migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo menjadi korban utama, meskipun kelompok etnis dan suku lain juga mengalami dampaknya.²⁶³

Pada awal Mei muncul berita bahwa banyak pemuda yang mengungsi telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok radikal di Kelei. Pasukan yang terlibat dalam fase ini disebut sebagai “kelelawar merah” dan “kelelawar hitam”. Kelelawar hitam, yang mengenakan topeng mirip ninja, disebut-sebut menargetkan warga Muslim di Kayamanya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di Lombogia. Pasukan ini dikabarkan dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran Katolik dari Flores yang sebelumnya telah dipenjara atas kasus pembunuhan. Seorang tokoh bernama Adven Lateka juga disebut-sebut sebagai otak di balik kekerasan tersebut.²⁶⁴

Lalu tepat pada 23 Mei kelompok bersenjata yang mengenakan topeng ninja membunuh seorang polisi dan dua warga Muslim, kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik. Setelah negosiasi dengan polisi, mereka akhirnya melarikan diri ke perbukitan di belakang gereja, sementara gereja tersebut dibakar. Pertempuran terjadi di seluruh kota, terutama di Sayo, di mana banyak orang terluka akibat panah dan lemparan batu.

²⁶² Yakobus and Th.

²⁶³ Uksan.

²⁶⁴ Uksan.

Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Di antara peristiwa yang paling terkenal adalah serangan terhadap Desa Sintuwu Lemba, juga dikenal sebagai Kilo Sembilan. Wanita dan anak-anak ditangkap, beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual, sementara warga Muslim lainnya dibunuh secara brutal. Pesantren Walisongo menjadi tempat perlindungan, tetapi juga menjadi target serangan.²⁶⁵ Banyak warga Muslim dibunuh dengan senjata api dan parang, dan mayat-mayat mereka dibuang ke Sungai Poso. Kematian akibat serangan tersebut diperkirakan mencapai ratusan orang.

B. Kondisi Umum Pasca Konflik

Setelah kekerasan mereda, Mabes Polri di Jakarta mulai bergerak dengan membentuk Komando Lapangan Operasi. Dari Jakarta, kebijakan diimplementasikan melalui berbagai operasi militer di Poso yang diberi sandi operasi. Pada tahun 2000, Operasi Sadar Maleo diluncurkan dengan dukungan dari Badan Kendali Operasi (BKO) Polres Poso. Satuan TNI yang terlibat meliputi Batalyon Infanteri 711/Raksatama Poso, Batalyon Infanteri 726/Tamalatea Makassar, Batalyon Infanteri 721/Makassau Palopo, dan Batalyon Zeni Tempur 8 Makassar. Sementara itu, satuan kepolisian termasuk Brimob Polres Pare-Pare, Brimob Polres Makassar, Perintis, dan Satuan Intel Polda Sulawesi Tengah.²⁶⁶



(Sumber: Datatempo, 21/07/2024)

²⁶⁵ Uksan.

²⁶⁶ Muhamad Haripin, *Intelijen Dan Keamanan Nasional Di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

Operasi militer dan polisi berlanjut dengan Operasi Sintuwu Maroso yang diperpanjang setiap tahun, termasuk pada pertengahan April 2004. Dalam operasi ini, berbagai satuan TNI dan Polri, seperti Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, dan lainnya, berpartisipasi. Pasukan gabungan ini ditempatkan di 142 pos penjagaan, membentang dari Desa Tumora hingga perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan, di Desa Mayo. Dalam kekerasan dan kerusuhan antara masyarakat dan Islam di Poso, kedua belah pihak didukung oleh massa dari luar kota. Masyarakat Muslim dibantu oleh orang-orang dari Ampana dan Parigi, sementara masyarakat diperkuat oleh orang-orang Lage dari desa-desa seperti Sepe dan Silanca.²⁶⁷

Dalam hal milisi Islam, sejumlah organisasi seperti Jemaah Islamiyah, Mujahidin KOMPAK, Laskar Jundullah, dan lainnya terlibat. Sedangkan milisi, seperti Brigade Manguni dan Laskar Kristus, turut ambil bagian dalam konflik tersebut. Namun, milisi sulit diidentifikasi dengan jelas. Selain itu, Angkatan Muda Sintuwu Maroso (ANSIMAR) juga merupakan salah satu kelompok yang terorganisir di kalangan. Tentang jumlah korban, hal ini menjadi sensitif dan politis. *Human Rights Watch* mencatat bahwa kedua belah pihak menderita banyak korban selama kerusuhan. Namun, upaya untuk menentukan jumlah korban yang tepat terhambat oleh banyak faktor, termasuk kurangnya investigasi independen dan medan yang kompleks. Sebagian besar laporan mengindikasikan kematian dalam ratusan, dengan korban terutama terjadi selama kerusuhan ketiga pada Mei dan Juni 2000.²⁶⁸

Pada masa konflik tersebut terjadi juga pengungsian massal, masyarakat melarikan diri ke daerah dengan mayoritas agama yang mereka anut, seperti Muslim yang pergi ke Palu dan yang melarikan diri ke Tentena dan Napu. Namun, setelah penandatanganan Deklarasi Malino, beberapa pengungsi mulai kembali ke rumah mereka, meskipun terjadi kekerasan sporadis yang menghambat upaya pemulihan. Kondisi kesehatan dan kesejahteraan pengungsi menjadi perhatian, dengan masalah gizi, kesehatan mental, dan kesehatan fisik menjadi masalah utama.

²⁶⁷ Uksan.

²⁶⁸ Yakobus and Th.

BAB IV KONFLIK AGAMA DAN ETNIS: KONTRIBUSINYA TERHADAP KEKERASAN DAN KERUSUHAN SOSIAL

A. Sejarah Panjang Ketegangan

Poso memiliki sejarah panjang ketegangan antarumat beragama, terutama antara Kristen dan Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti migrasi penduduk, perebutan sumber daya alam, dan perbedaan budaya.²⁶⁹ Ketegangan ini semakin diperparah oleh provokasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang kacau.

Di Poso, terdapat empat tahap eskalasi kerusuhan yang mengarah pada konflik jangka panjang. Tahap *pertama* dimulai dengan perilaku dan pernyataan yang sangat provokatif di ibu kota, memicu ketegangan agama yang merambat ke daerah sekitarnya.²⁷⁰ Keseimbangan jumlah antara dua kelompok agama utama di wilayah tersebut memicu perasaan kesetaraan, mendorong mereka untuk berjuang demi kepercayaan agama masing-masing.

Pernyataan dari seorang pejabat pemerintah Poso menguatkan persepsi ini, menyebabkan kelompok-kelompok pemuda saling menghina dan bersaing untuk wilayah, terutama di kota yang dianggap otoritas oleh pemuda Kristen.²⁷¹ Konflik ini menghasilkan tindakan kekerasan, termasuk penganiayaan terhadap pemuda Muslim.

Tahap *kedua* melihat penyebaran konflik dari ibu kota ke daerah lain, diperparah oleh mobilisasi massa dari kedua kelompok agama serta pendukung mereka dari wilayah-wilayah sekitar seperti Donggala.²⁷² Ketegangan mencapai titik kritis, mempercepat mobilisasi massa yang semakin meluas,

²⁶⁹ Sri Yunanto and Angel Damayanti, 'Religion and Power: Comparing Political Landscape in the Religious Conflicts in Poso and Maluku', *Advances in Politics and Economics*, 5.1 (2021), 99–114.

²⁷⁰ Daniel L Shapiro, 'Reconciliation Systems Design: A Systematic Approach to Collective Healing in Post-Conflict Societies', *Harv. Negot. L. Rev.*, 26 (2020), 193.

²⁷¹ Supratikno.

²⁷² Riska Gustiana, Taufik Hidayat, and Achmad Fauzi, 'Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Suatu Kajian Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.6 (2022), 657–66.

seperti yang dinyatakan oleh seorang perwira militer. Massa dari berbagai distrik datang dengan senjata tradisional seperti pedang dan tombak, memperburuk eskalasi konflik.

Tahap *ketiga* dicirikan oleh ketidakaturan sipil dan kerusuhan massa yang melibatkan kekerasan ekstrem, termasuk penggunaan senjata api. Situasi ini menyebabkan peningkatan dramatis dalam jumlah kematian, dengan beberapa korban tewas akibat luka-luka dari senjata tajam dan bentuk kekerasan fisik lainnya.²⁷³

Keempat, ketidakaturan ini berakar dari ketidakpahaman antara kedua belah pihak, di mana perselisihan antarpribadi direformulasikan menjadi konflik agama antara umat Muslim dan Kristen. Pada awalnya, pertikaian antara seorang pemuda Kristen dan seorang pemuda Muslim membesar menjadi bentrokan komunal antara dua kelompok agama utama, menghasilkan kerusuhan berbasis agama.²⁷⁴

Karenanya terdapat empat pola kerusuhan. Pola pertama dan kedua terjadi karena adanya prasangka antar-agama yang memuncak dalam konflik pada Desember 1998 dan April 2000. Kedua insiden tersebut menyoroti perbedaan regional dan kekuasaan antara kelompok-kelompok tersebut, dengan masing-masing merasa dominan. Perkembangan prasangka agama dipercepat oleh peristiwa pada Mei 2000, Juli 2001, dan November 2001.²⁷⁵ Konflik terbuka ini menandakan perang saudara berbasis agama, di mana kekuatan prasangka agama mendorong setiap kelompok untuk mengeliminasi yang lain. Politik identitas agama diperburuk oleh kekerasan tanpa ampun, termasuk terhadap perempuan dan anak-anak.

²⁷³ Gustiana, Hidayat, and Fauzi.

²⁷⁴ Angel Damayanti, 'Inter Religions Conflict and Christian Radical Movement in Poso and Ambon', 2011.

²⁷⁵ Tressa.



(Sumber: BBC, 21/07/2024)

Kekuatan spiritual tumbuh melalui solidaritas kelompok dan pesan yang menegaskan perbedaan ideologi antara Muslim dan Kristen. Konflik agama ini telah menjadi semakin intens dan meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam intensitasnya, kekejaman konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa. Dari segi luasnya, konflik ini mencerminkan perbedaan regional dan identitas antara kedua kelompok agama. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan di Poso.

Konflik di Poso telah meninggalkan trauma psikologis dan kenangan pahit yang mendalam di komunitasnya. Konflik ini tidak hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga memperdalam perpecahan sosio-kultural dan ideologis di antara mereka.²⁷⁶ Pada saat yang sama, solidaritas dalam kelompok-kelompok itu sendiri semakin diperkuat melalui penekanan isu pendatang versus penduduk asli. Kompleksitas situasi ini diperumit oleh disparitas sosio-kultural dan ekonomi antara kelompok-kelompok tersebut, serta persaingan politik dan kekuasaan yang mempengaruhi dinamika konflik.²⁷⁷

Konflik-konflik ini terbungkus dalam retorika agama, mengubah perselisihan individual menjadi konflik antar kelompok agama yang merusak. Karenanya, jelas bahwa akar konflik di Poso sangat kompleks. Ada dua perspektif utama dalam memahami masalah ini. *Pertama* adalah perspektif modern yang menyoroti ketegangan saat ini, seperti pertempuran antar pemuda

²⁷⁶ Muhamad Ali, 'Confrontation And Reconciliation: Muslim Voices of Maluku Conflict (1999-2002)', *Journal of Indonesian Islam*, 1.2 (2023), 379–402.

²⁷⁷ Tery Setiawan, *Support for Interreligious Conflict in Indonesia* (Lit, 2020), XIV.

yang mengancam harmoni agama di Poso.²⁷⁸ *Kedua* adalah perspektif historis yang terkait dengan masalah politik agama, yang bukan fenomena baru tetapi sudah menjadi bagian dari sejarah Poso sejak zaman kolonial Belanda.²⁷⁹

Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, politik agama dimanipulasi untuk kepentingan politik di wilayah tersebut, terutama dengan mendukung penyebaran agama Kristen sebagai strategi politik.²⁸⁰ Hal ini telah meninggalkan dua stigma kuat dalam politik Poso, yang pertama sebagai mayoritas Kristen yang terkait dengan dominasi birokrasi, dan yang kedua sebagai komunitas transmigran Bugis yang membawa perubahan signifikan dalam demografi agama dan sosial di Poso.²⁸¹

Transformasi keagamaan ini telah mengubah lanskap politik di Poso secara signifikan. Kebijakan pendidikan yang mendukung pendirian lembaga pendidikan Islam telah meningkatkan jumlah penduduk Muslim yang tereduksi secara substansial. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing dalam struktur birokrasi lokal. Politik identitas keagamaan semakin memengaruhi manajemen sumber daya manusia di Poso. Posisi-posisi penting dalam pemerintahan, sebelumnya didominasi oleh Kristen, kini mulai beralih ke tangan Muslim yang menggunakan kekuatan baru ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di daerah tersebut.²⁸²

Fenomena ini mencerminkan bagaimana politik identitas keagamaan telah meresap ke dalam struktur birokrasi di Poso. Salah satu aspek penting dari pergeseran politik ini adalah praktik favoritisme dan bahkan nepotisme,

²⁷⁸ Mohammad Takdir, M Mushthafa, and A S Rozinah, 'The Dynamics of Religious Conflict in Indonesia: Contestation and Resolution of Religious Conflicts in The New Order Age', *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2.2 (2021), 103–21.

²⁷⁹ Virginia Hooker, Elly Kent, and Caroline Turner, *Living Art: Indonesian Artists Engage Politics, Society and History* (ANU Press, 2022).

²⁸⁰ Pieter C Emmer and Jos J L Gommans, *The Dutch Overseas Empire, 1600–1800* (Cambridge University Press, 2020).

²⁸¹ Cahyo Pamungkas and Devi Tri Indriasari, 'Preventing Religious Conflict in Papua Land: Adopting Cultural Traditions of Peacebuilding.', *Asian Journal of Peacebuilding*, 9.2 (2021).

²⁸² Dwi Suharjo, Muhammad Nur Ali, and Hasbullah Hasbullah, 'Strategy for Handling Conflict Resolution Through a Territorial Development Approach', *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (Sinomics Journal)*, 3.1 (2024), 185–98.

yang umum terjadi dalam politik lokal.²⁸³ Dengan pengaruh Muslim yang semakin kuat dalam pemerintahan, proyek-proyek publik cenderung lebih banyak dialokasikan kepada anggota komunitas Muslim. Dari analisis ini, jelaslah bahwa aktor politik memainkan peran kunci dalam memunculkan ketegangan keagamaan dan konflik regional. Birokrat, pelaku ekonomi, kelompok keagamaan, dan faksi-faksi lainnya secara aktif memanfaatkan isu-isu ini untuk kepentingan mereka masing-masing.²⁸⁴

Hemat penulis, setelah membaca banyak referensi jelas bahwa individu yang memiliki prasangka terhadap satu kelompok cenderung rentan terhadap pengembangan prasangka terhadap kelompok lainnya. Konflik keagamaan di Poso juga mengakibatkan gesekan sosial dan budaya yang signifikan. Agama sering kali menjadi dasar utama dalam tuntutan ketidakadilan sosial dan politik dari masing-masing kelompok.²⁸⁵ Konflik dan ketegangan keagamaan di Poso dipicu oleh persaingan politik untuk menguasai kekuasaan dan menerapkan kebijakan yang sering kali mengabaikan keseimbangan antara kepentingan mayoritas Kristen dan minoritas Muslim.

Lebih lanjut, kita bisa mengumpulkan empat isu utama yang mempengaruhi masyarakat Poso pasca-konflik. *Pertama*, konflik sosial di Poso sering kali muncul dari konflik interpersonal di masyarakat. Faktor-faktor pemicu ini sering kali terkait dengan aspek budaya, termasuk agama dan etnisitas.²⁸⁶

Kedua, salah satu penyebab umum konflik sosial di Poso adalah ketidakadilan dalam penerapan hukum, yang sering kali membuat kelompok tertentu merasa tidak adil karena persepsi partisanisme dari pemerintah atau pejabatnya, serta pelanggaran hak asasi manusia.²⁸⁷

Ketiga, politik sering kali menjadi pemicu konflik sosial di Poso. Ketegangan antara kelompok sering kali mencapai puncaknya selama periode

²⁸³ Richard McElreath and Jeremy Koster, '17 The End of Human Behavioral Ecology', *Human Behavioral Ecology*, 92 (2024), 402.

²⁸⁴ Raffaele Marchetti and Nathalie Tocci, 'Conflict Society: Understanding the Role of Civil Society in Conflict', in *Conflict Society and Peacebuilding* (Routledge India, 2020), pp. 11–40.

²⁸⁵ Takdir, Mushthafa, and Rozinah.

²⁸⁶ Komang Ariyanto, 'Social Conflict Among Religious Groups in the Perspective of Sociology of Religion', *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 3.2 (2023), 213–26.

²⁸⁷ Setiawan, XIV.

pemilihan umum, di mana persaingan untuk posisi pemerintahan dapat meningkatkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan.²⁸⁸

Keempat, ketidakadilan sosial dan ekonomi antara penduduk asli Poso dan kelompok etnis pendatang, seperti Bugis, Jawa, Gorontalo, dan Kaili, juga menjadi faktor kontributor dalam konflik sosial.²⁸⁹ Kesenjangan ini sering kali menyebabkan ketegangan sosial karena perasaan ketidakadilan di antara kelompok mayoritas asli dan minoritas pendatang dalam hal hak dan ekonomi.

Konflik di Poso tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa dan materi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Konflik ini bukan sekadar kasus ketegangan sosial biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang mencerminkan perang saudara dalam skala lokal.

Dari konflik ini, kita bisa belajar bahwa akar persoalan konflik banyak ditemukan, tergantung perspektif mana yang akan kita gunakan. Hanya saja, pembelajaran untuk terhindar dari konflik serupa harus juga turut digalakkan.

B. Perpecahan: Dampak Konflik

Perpecahan agama dan etnis di Poso telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat setempat. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah banyaknya korban jiwa dan kerusakan harta benda yang signifikan. Perpecahan yang terjadi di Poso mengakibatkan kerusuhan dan kekerasan yang menimbulkan kematian ratusan hingga ribuan orang, baik dari pihak Muslim maupun Kristen.²⁹⁰

Selain itu, banyak rumah, toko, dan fasilitas umum yang dibakar atau dirusak, mengakibatkan kerugian material yang besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kerugian ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga psikologis, mengingat banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya serta mata pencaharian mereka.²⁹¹

²⁸⁸ Uksan.

²⁸⁹ David E F Henley, *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930* (Brill, 2021), CCI.

²⁹⁰ Zora Arfina Sukabdi, 'Terrorism Risk Assessment to Children: A Study in Poso', *Journal of Psychology and Behavior Studies*, 1.1 (2021), 47–64.

²⁹¹ Yong Chan Kim and Titi Susilowati Prabawa, 'Hybrid Internal Migration: The Factors Of Migration For Education Among Wana Tribe Community In Central Sulawesi', *Jurnal Kawistara*, 10.2 (2020), 221–33.



(Sumber: Kumparan, 21/07/2024)

Konflik yang berkepanjangan juga memaksa ribuan penduduk Poso untuk meninggalkan rumah mereka demi mencari tempat yang lebih aman. Pengungsian massal ini menimbulkan masalah kemanusiaan yang serius, seperti kekurangan tempat tinggal yang layak, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan penyakit akibat kondisi sanitasi yang buruk di kamp pengungsi.²⁹² Banyak dari mereka yang harus tinggal di tempat pengungsian selama bertahun-tahun, menghadapi ketidakpastian dan kehilangan harapan untuk kembali ke rumah mereka yang sudah hancur atau tidak aman lagi. Pengalaman hidup di pengungsian ini menambah beban psikologis yang sudah berat akibat konflik.

Pengalaman kekerasan yang dialami masyarakat Poso meninggalkan trauma yang mendalam, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Mereka yang menyaksikan atau mengalami langsung kekerasan tersebut sering kali mengalami gangguan psikologis seperti stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan berlebihan.²⁹³ Dampak psikologis ini menghambat proses pemulihan masyarakat dan memerlukan intervensi yang berkelanjutan untuk membantu mereka mengatasi trauma yang dialami. Trauma yang mendalam ini juga dapat mempengaruhi generasi berikutnya, mengingat banyak anak-

²⁹² Suharjo, Ali, and Hasbullah.

²⁹³ Michael C Seto and others, 'Post-Traumatic Stress Disorder, Depression, Anxiety Symptoms and Help Seeking in Psychiatric Staff: Trouble de Stress Post-Traumatique, Dépression, Symptômes d'anxiété et Recherche d'aide Chez Le Personnel Psychiatrique', *The Canadian Journal of Psychiatry*, 65.8 (2020), 577–83.

anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian.²⁹⁴

Kerusakan sosial akibat konflik di Poso tidak kalah parah. Konflik ini merusak hubungan sosial yang selama ini terjalin baik antara berbagai kelompok agama dan etnis. Kepercayaan antar kelompok menurun drastis, menciptakan ketegangan dan kecurigaan yang berkepanjangan. Kerusakan ini tidak hanya terjadi pada level individu tetapi juga pada institusi-institusi sosial seperti sekolah, tempat ibadah, dan komunitas.²⁹⁵ Upaya rekonsiliasi dan membangun kembali kepercayaan memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang intensif dari berbagai pihak. Tanpa adanya upaya rekonsiliasi yang serius, luka sosial ini akan terus membekas dan menghambat pembangunan sosial di masa depan.²⁹⁶

Dampak ekonomi juga sangat dirasakan oleh masyarakat Poso. Aktivitas ekonomi di Poso mengalami kemunduran yang signifikan akibat konflik.²⁹⁷ Banyak usaha kecil dan menengah yang terpaksa tutup karena situasi yang tidak kondusif dan tidak aman. Pembangunan daerah terhenti, investasi menurun, dan pengangguran meningkat.

Selain itu, sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal juga terganggu. Pemulihan ekonomi pasca-konflik memerlukan kebijakan yang tepat dan dukungan dari pemerintah serta sektor swasta untuk mengembalikan stabilitas dan kemakmuran ekonomi di Poso.²⁹⁸ Tanpa adanya upaya pemulihan ekonomi yang serius, masyarakat Poso akan terus berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Walhasil, perpecahan agama dan etnis di Poso telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat setempat. Pemulihan dari dampak-dampak ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat,

²⁹⁴ Jun Du and others, 'Post-Traumatic Stress Disorder: A Psychiatric Disorder Requiring Urgent Attention', *Medical Review*, 2.3 (2022), 219–43.

²⁹⁵ Trihartono and Viartasiwi.

²⁹⁶ Damayanti.

²⁹⁷ Muh Aidil Putra, 'Conflict, Peace, and Sustainable Development Case Study: The Dichotomy of Abdul Latif Forest Park, Sinjai Regency', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 24.02 (2023), 1–12.

²⁹⁸ Deepan Joshi, 'The Frontlines of Peace: Peacebuilding and Post-Conflict Reconstruction (Vol 2)' (The InfoLibrary, 2022).

dan berbagai organisasi untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Poso.²⁹⁹

Upaya rekonsiliasi, pemulihan ekonomi, dan penanganan trauma psikologis harus dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi Poso. Hanya dengan cara ini, masyarakat Poso dapat bangkit kembali dari keterpurukan dan membangun kembali kehidupan yang damai dan harmonis.



(Sumber: Benar News, 21/07/2024)

Dampak perpecahan agama dan etnis di Poso sangat merugikan masyarakat setempat. Konflik menyebabkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan trauma psikologis yang mendalam. Pengungsian massal dan kondisi sanitasi yang buruk di kamp pengungsi menambah beban kemanusiaan yang sudah berat. Selain itu, konflik ini merusak hubungan sosial dan menciptakan ketegangan serta kecurigaan yang berkepanjangan antar kelompok. Upaya rekonsiliasi dan pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk mengatasi dampak-dampak ini dan membangun kembali kehidupan yang damai dan harmonis di Poso.³⁰⁰

Dengan memahami konteks historis dan politik, serta peran agama dalam konflik dan perdamaian, dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif untuk memulihkan Poso. Kesadaran akan akar konflik dan dinamika sosial

²⁹⁹ Tressa.

³⁰⁰ Pulubuhu and others.

yang terjadi memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara terbaik untuk mendukung pemulihan dan pembangunan perdamaian di wilayah ini.³⁰¹ Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Poso.

³⁰¹ Damayanti.

BAB V REKONSILIASI PASCA-KONFLIK

A. Dinamika Sosial Pasca-Konflik

Kita bisa belajar dari konflik yang terjadi di Poso. Konflik di Poso, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu konflik paling panjang dan kompleks di Indonesia, dengan ketegangan yang melibatkan kelompok agama, terutama antara Muslim dan Kristen. Konflik ini berakar dari berbagai faktor ekonomi, politik, dan etnis yang memicu kekerasan antar-kelompok serta menimbulkan kerusakan fisik dan trauma psikologis yang mendalam di masyarakat.³⁰²

Teori konflik sosial adalah salah satu teori sosiologi yang relevan untuk memahami dinamika konflik dalam masyarakat, termasuk di Poso. Menurut teori ini, konflik sosial muncul karena perbedaan kepentingan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.³⁰³ Konflik terjadi ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti kekuasaan, kekayaan, dan status sosial. Karl Marx, salah satu tokoh utama dalam teori ini, berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial adalah penyebab utama konflik.³⁰⁴

Dalam konteks Poso, konflik dapat dipahami sebagai manifestasi ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mereka alami.³⁰⁵ Perbedaan etnis dan agama memperburuk ketegangan ini, mengubah konflik yang awalnya berakar pada isu ekonomi dan politik menjadi konflik komunal. Dengan demikian, memahami konflik Poso memerlukan analisis mendalam terhadap interaksi antara faktor-faktor ekonomi, politik, etnis, dan agama yang membentuk dinamika konflik di wilayah tersebut.

³⁰² Damayanti.

³⁰³ Richard M Simon, 'The Conflict Paradigm in Sociology and the Study of Social Inequality: Paradox and Possibility', *Theory in Action*, 9.1 (2016), 1.

³⁰⁴ Iskandarsyah Siregar, 'The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review', *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2.1 (2022), 9–16.

³⁰⁵ Fransina Matakana, Tonny Donald Pariela, and Yurnie Darakay, 'Kosmologi Negeri Dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau: Upaya Pengelolaan Konflik Dan Damai Keberlanjutan', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13.1 (2024), 191–201.

Kemudian teori integrasi sosial menyoroti pentingnya hubungan sosial yang harmonis dan koheren dalam menjaga stabilitas masyarakat. Menurut Émile Durkheim, integrasi sosial dicapai melalui nilai-nilai bersama, norma sosial, dan solidaritas dalam masyarakat.³⁰⁶

Dengan adanya integrasi sosial, masyarakat dapat mengatasi perbedaan dan ketegangan, memungkinkan terjadinya harmoni dan kerjasama antar kelompok. Di Poso, upaya integrasi sosial pasca-konflik memerlukan usaha membangun kembali hubungan yang rusak dan menciptakan nilai-nilai bersama yang diterima oleh semua kelompok. Proses ini melibatkan dialog antar komunitas, kegiatan bersama, dan peran aktif pemimpin komunitas dalam mempromosikan perdamaian.

Masyarakat sipil, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok advokasi sosial, memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi pasca-konflik.³⁰⁷ Mereka sering kali bertindak sebagai mediator, memfasilitasi dialog antar kelompok yang bertikai, dan mempromosikan dialog antar budaya untuk membangun pemahaman dan kepercayaan bersama di antara komunitas yang terlibat.

Lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, dan komunitas keagamaan lainnya juga memiliki peran signifikan dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik. Mereka menggunakan ajaran dan nilai-nilai agama sebagai dasar untuk membangun perdamaian, memfasilitasi dialog antar agama, dan mempromosikan toleransi antar kelompok agama. Studi yang dilakukan Arai menunjukkan bahwa kehadiran dan intervensi mereka dapat mengurangi tingkat konflik dan meningkatkan koeksistensi sosial di wilayah yang terkena dampak konflik.³⁰⁸

Sementara itu, rekonsiliasi adalah proses memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik.³⁰⁹ John Paul Lederach menyatakan bahwa rekonsiliasi

³⁰⁶ Huma Akhtar Malik and Fizana Ashraf Malik, 'Emile Durkheim Contributions to Sociology', *Sociology*, 6.2 (2022), 7–10.

³⁰⁷ Henry Anderson Ruagadi and others, 'Social Harmony in Plural Society (Study of Social Integration Post Poso Conflict)', *International Journal of Health Sciences*, 2.2 (2024), 767–82.

³⁰⁸ Tatsushi Arai, 'Functional Coexistence in Intractable Conflict: A Decades-long View of Conflict Intervention', *Peace & Change*, 47.2 (2022), 118–51.

³⁰⁹ Everett Worthington and Juan Manuel Jimenez Robles, 'Forgiveness, Reconciliation and Hope in Trauma Healing', *Revista d'Humanitats*, 2022.

melibatkan empat elemen utama: kebenaran, kasih sayang, keadilan, dan perdamaian.³¹⁰ Proses ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran tentang peristiwa yang terjadi selama konflik, mengembangkan kasih sayang di antara pihak-pihak yang terlibat, mencapai keadilan bagi para korban, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Di Poso, rekonsiliasi melibatkan pengungkapan kebenaran tentang kekerasan yang terjadi, memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada para korban, serta menciptakan keadilan melalui proses hukum dan program rehabilitasi. Semua elemen ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat yang plural.³¹¹

Namun, implementasi strategi rekonsiliasi pasca-konflik di Poso tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi politik lokal yang kompleks, resistensi dari kelompok-kelompok radikal, serta ketegangan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, kendala ekonomi dan kurangnya sumber daya juga dapat menghambat efektivitas inisiatif rekonsiliasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan lembaga keagamaan.³¹²

Teori lain yang dapat digunakan dalam menganalisis fenomena pasca konflik tidak lain adalah teori modal. Teori modal sosial mengacu pada jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat, yang memungkinkan kerjasama dan koordinasi untuk manfaat bersama.³¹³ Robert Putnam menyatakan bahwa modal sosial yang tinggi dalam suatu komunitas dapat meningkatkan partisipasi sipil, memperkuat institusi sosial, dan mendorong kerjasama yang efektif.³¹⁴ Dalam konteks Poso, modal sosial yang kuat dapat memainkan peran krusial dalam proses rekonsiliasi dan integrasi sosial. Jaringan hubungan sosial yang terbentuk melalui dialog antar-komunitas dan kegiatan bersama dapat membantu mengurangi prasangka dan memperkuat ikatan sosial. Selain itu, kepercayaan yang dibangun melalui

³¹⁰ Tajda Sisic, 'Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: A Qualitative Study on Local's Perception on the Reconciliation Process in Zenica', 2020.

³¹¹ Pulubuhu and others.

³¹² Tressa.

³¹³ Tüzin Baycan and Özge Öner, 'The Dark Side of Social Capital: A Contextual Perspective', *The Annals of Regional Science*, 70.3 (2023), 779–98.

³¹⁴ Isabel V Sawhill, 'Social Capital: Why We Need It and How We Can Create More of It', *Brookings Institution*, 2020.

interaksi positif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Karenanya, kajian terhadap evaluasi terhadap strategi rekonsiliasi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kesuksesan mereka sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya rekonsiliasi yang sukses mampu mengurangi tingkat konflik, membangun kembali kepercayaan sosial, dan memperkuat kohesi masyarakat pasca-konflik.³¹⁵

Terakhir, teori kepercayaan dan kerjasama menegaskan bahwa kepercayaan antara individu dan kelompok adalah dasar bagi kerjasama yang efektif dalam masyarakat. Francis Fukuyama berpendapat bahwa kepercayaan sosial yang tinggi dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi kerjasama.³¹⁶ Dalam masyarakat yang plural, membangun kepercayaan antara kelompok yang berbeda adalah tantangan besar yang harus diatasi.

Di Poso, kepercayaan yang hilang akibat konflik perlu dipulihkan melalui proses yang panjang dan berkelanjutan. Dialog antar komunitas, kegiatan bersama, serta peran pemimpin masyarakat dalam mempromosikan nilai-nilai damai merupakan langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun ini dapat menjadi modal sosial yang berharga untuk memperkuat kerjasama dan mencapai harmoni sosial yang berkelanjutan.

Tinjauan teoretis ini menunjukkan bahwa untuk memahami konflik dan rekonsiliasi di Poso, diperlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup teori konflik sosial, teori integrasi sosial, teori rekonsiliasi, teori modal sosial, serta teori kepercayaan dan kerjasama. Setiap teori menawarkan wawasan berharga mengenai dinamika sosial dan strategi efektif untuk membangun kembali harmoni sosial dalam masyarakat yang plural. Dengan mengintegrasikan perspektif teoretis ini, kita dapat lebih memahami proses

³¹⁵ David Mabior Atem, 'The Need for Effective Leadership for Peacebuilding and Reconciliation in Divided Societies', *Journal of Global Peace and Conflict*, 8.2 (2020), 1–11.

³¹⁶ Aurel Burciu, Rozalia Kicsi, and Ionel Bostan, 'Social Trust and Dynamics of Capitalist Economies in the Context of Clashing Managerial Factors with Risks and Severe Turbulence: A Conceptual Inquiry', *Sustainability*, 12.21 (2020), 8794.

kompleks rekonsiliasi dan integrasi sosial di Poso serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

B. Peran Masyarakat Sipil dalam Rekonsiliasi Pasca-Konflik

Membangun perdamaian yang berkelanjutan di masyarakat yang dilanda konflik merupakan salah satu tantangan paling rumit dalam upaya mencapai perdamaian dan keamanan. Pembangunan perdamaian memerlukan dukungan berkelanjutan yang melibatkan berbagai kegiatan luas, termasuk memantau gencatan senjata, membantu pengembalian orang-orang yang terlantar, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong rekonsiliasi setelah terjadinya kekejaman masa lalu.³¹⁷

Selain itu, proses ini mencakup pelucutan senjata dan reintegrasi para kombatan, serta promosi reformasi di sektor keadilan dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, realitas konflik telah mendorong orang untuk lebih fokus pada upaya pembangunan perdamaian.³¹⁸ Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi risiko terjadinya kembali konflik, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal untuk manajemen konflik, serta meletakkan dasar bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Demikian pula dalam konteks Poso, beberapa aspek penting terkait pemerintahan pasca-konflik perlu diperhatikan. *Pertama*, program pasca-konflik lebih banyak menekankan pada rekonsiliasi simbolis dan seremonial daripada tindakan nyata di tingkat akar rumput.³¹⁹

Menurut Toana, para pembuat kebijakan sering kali tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kebutuhan khusus masyarakat Poso. Dinamika lokal mencakup berbagai aspek seperti budaya, sejarah konflik, struktur sosial, dan interaksi antar kelompok dalam masyarakat. Kebutuhan spesifik masyarakat Poso sangat beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga dukungan

³¹⁷ Khalid Koser, 'Addressing Internal Displacement in Peace Processes, Peace Agreements and Peace-Building', *IDP Newsletter*, 2007.

³¹⁸ Mauricio Velásquez and others, 'Largely on Their Own: Dealing with the Rural Legacies of Conflict through Local Participatory Peacebuilding', *Journal of Agrarian Change*, 21.2 (2021), 313–31.

³¹⁹ Lauren Dahler, 'Ritual in Peacebuilding: A Case Study in Post-Conflict Lira, Uganda' (The Ohio State University, 2023).

psikososial bagi mereka yang terdampak konflik.³²⁰ Ketika pembuat kebijakan tidak memahami dengan baik semua faktor ini, program yang mereka rancang cenderung kurang efektif dan tidak mampu mengatasi masalah mendasar yang dihadapi masyarakat Poso.

Kedua, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan pasca-konflik kurang melibatkan masyarakat sipil secara substantif.³²¹ Proses perencanaan pembangunan pasca-konflik di Poso sebenarnya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat. Namun, sayangnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini masih kurang substansial. Banyak rencana yang dibuat lebih bersifat *top-down*, tanpa masukan yang memadai dari masyarakat akar rumput.

Ketiga, perempuan sering kali dikesampingkan dari lingkaran pembangunan perdamaian, hanya dilihat sebagai korban kekerasan.³²² Akhirnya, sebagian besar upaya berfokus pada perayaan kesepakatan di tingkat elit daripada mendukung perbaikan di tingkat akar rumput dengan memutus siklus kekerasan.

Hal ini memang merupakan tantangan tersendiri dalam upaya membangun perdamaian, peran perempuan memang kerap kali kali terlupakan atau tidak mendapat perhatian yang memadai. Konsekuensinya adalah kemampuan perempuan sebagai penggerak perubahan sering tidak diakui secara penuh. Padahal sebetulnya perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan. Perempuan tidak sekedar membutuhkan perlindungan dari kekerasan, tetapi juga mampu memengaruhi proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian melalui partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif dan kegiatan komunitas.

³²⁰ Tressa.

³²¹ Dahlia Simangan, 'A Case for a Normative Local Involvement in Post-Conflict Peacebuilding', *International Peacekeeping*, 27.1 (2020), 77–101.

³²² Ananda Breed and others, *Children, Youth, and Participatory Arts for Peacebuilding: Lessons from Kyrgyzstan, Rwanda, Indonesia, and Nepal* (Taylor & Francis, 2024).



(Sumber: *Tempo*, 21/07/2024)

Sebetulnya bukan hal yang mengagetkan, sebab pada dasarnya salah satu dampak paling merusak dari konflik bersenjata adalah terjadinya polarisasi hubungan sosial. Kondisi ketidakamanan turut berperan dalam menghasilkan saling tidak percaya yang berkelanjutan di masyarakat.³²³ Memperluas jaringan komunikasi antara berbagai kelompok sosial dan mendorong partisipasi dalam kehidupan politik menjadi syarat penting bagi rekonsiliasi sosial. Dukungan dari masyarakat sipil harus berkontribusi dalam menyatukan kepentingan berbagai kelompok dalam jangka panjang. Penting untuk mengidentifikasi aktor-aktor masyarakat sipil yang dapat memperkuat mekanisme kunci dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi di masyarakat, sambil menghindari dukungan tidak sengaja terhadap kekuatan yang memicu konflik.³²⁴

Masyarakat sipil merupakan konsep yang memiliki berbagai makna dan pendekatan. Di negara-negara dengan institusi yang rapuh dalam sistem internasional, masyarakat sipil terdiri dari berbagai kelompok dan organisasi sosial yang kuat untuk memberikan otonomi dan perlindungan kepada individu dari dominasi otoriter negara.³²⁵ Namun demikian, meskipun masyarakat sipil sering dilihat sebagai lawan dari negara, negara juga berperan dalam melindungi dan memfasilitasi eksistensi masyarakat sipil.

³²³ Anthony Oberschall, *Conflict and Peace Building in Divided Societies: Responses to Ethnic Violence* (Routledge, 2007).

³²⁴ Margaux Pinaud, 'Home-Grown Peace: Civil Society Roles in Ceasefire Monitoring', *International Peacekeeping*, 28.3 (2021), 470–95.

³²⁵ Simangan.

Mary Anderson mengungkapkan bahwa dalam semua konflik bersenjata terdapat faktor-faktor yang menghubungkan masyarakat dengan pertempuran. Ini menunjukkan bahwa di setiap masyarakat terdapat potensi untuk perdamaian, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan ketegangan dan peluang untuk rekonsiliasi.³²⁶

Di antara faktor-faktor yang memecah belah adalah keberadaan tentara atau geng, produksi serta distribusi senjata, aparatus propaganda perang, serta institusi atau sistem yang secara tradisional memisahkan kelompok-kelompok, yang semuanya menyebabkan timbulnya ketegangan di antara mereka. Elemen-elemen ini juga mencakup tindakan kekerasan, ancaman, penyiksaan, brutalitas, pengusiran, dan hukuman kolektif.³²⁷

Maka dalam prosesnya pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi harus fokus pada mempromosikan jaringan dan organisasi sosial yang dapat berperan sebagai elemen-elemen stabilitas dalam masyarakat. Penting untuk memberikan dukungan kepada organisasi komunitas lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan sosial mereka.³²⁸ LSM lokal, asosiasi perempuan, kelompok multi-etnis, dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke sistem hukum, administrasi, dan komunikasi. Hal ini merupakan strategi yang mesti dilakukan dalam upaya memutus mata rantai kekerasan pasca-konflik.

Salah satu aspek menarik dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik di Poso adalah meskipun masyarakat sipil dan perempuan tidak terlihat memainkan peran signifikan, mereka sebenarnya menjadi agen pembangunan perdamaian yang diam-diam namun signifikan.³²⁹ Masyarakat sipil telah berkolaborasi dengan perempuan yang sebelumnya menjadi korban konflik untuk memutus siklus kekerasan. Perempuan yang diberdayakan ini kini berperan sebagai agen perdamaian, meskipun sering kali peran mereka tidak terlihat di tingkat mikro (kelompok masyarakat atau keluarga).

³²⁶ Mary B Anderson and Lara Olson, 'Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners', 2003.

³²⁷ Anderson and Olson.

³²⁸ Ndifon Neji Obi, 'Civil Society Organisations and Peacebuilding: A Functional Perspective', *International Journal of Social Sciences and Management Research*, 4.6 (2018), 24–39.

³²⁹ Uksan.

Dalam masyarakat pasca-konflik, menyebarkan kesadaran tentang pentingnya perdamaian sebagai langkah strategis bisa dilakukan melalui upaya mencegah kebencian di antara anggota keluarga.³³⁰ Memutus siklus kekerasan berarti mencegah keluarga menjadi korban rumor dan hasutan yang mendorong konflik. Di Poso, upaya ini melibatkan peningkatan saling pengertian antar komunitas yang beragam, mencegah penyebaran dendam, serta mendorong interaksi inklusif di tempat-tempat umum seperti pasar tradisional dan sekolah.

Upaya masyarakat sipil dan perempuan untuk memutus siklus kekerasan sering kali terjadi jauh dari sorotan media. Namun, mereka telah mengambil langkah strategis yang konkret dan memiliki tujuan serta pencapaian yang jelas. Sekolah-sekolah perempuan ini menekankan bahwa komunikasi dan dialog adalah jalan menuju perdamaian, bukan kekerasan. Kesadaran akan perdamaian semakin terlihat di antara perempuan dan keluarga mereka yang melihat perdamaian dan kehidupan normal sebagai prioritas penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat.

C. Peran Lembaga Keagamaan dalam Rekonsiliasi Pasca-Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah kumpulan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi dalam masyarakat dan harus dilaksanakan.³³¹ Konsep peran berasal dari dunia drama atau teater pada zaman Yunani kuno atau Romawi, di mana peran merujuk pada karakter yang dimainkan oleh seorang aktor.³³² Dalam konteks ilmu sosial, peran diartikan sebagai fungsi yang dijalankan seseorang saat menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, dia sedang menjalankan peran. Status dan peran

³³⁰ Mufti Riyani and others, 'Making Peace with the Past: Peace Education in Post-Conflict Societies Through the Application of Cognitive Behavioral Therapy', *Journal of Social Studies Education Research*, 12.2 (2021), 330–76.

³³¹ Sudaryanto Sudaryanto, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Perspektif Filsafat Pendidikan Bahasa)', *Lateralisasi*, 8.2 (2020), 92–99.

³³² Sehe Madeamin, Aziz Thaba, and Abdul Kadir, *DRAMA Teori, Pengajaran, Dan Pementasannya* (Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

saling terkait, karena tidak mungkin ada peran tanpa status atau sebaliknya. Setiap individu memiliki berbagai peran yang berasal dari pola interaksi sosial mereka, yang menentukan kontribusi mereka pada masyarakat serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepada mereka.³³³ Peran memiliki dua arti yang penting.

Pertama, peran mengatur perilaku seseorang dan memungkinkan mereka untuk meramalkan perilaku orang lain. *Kedua*, peran mempengaruhi hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat. Persepsi dan harapan terhadap peran seseorang dapat menyebabkan konflik peran jika individu tersebut merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi yang ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa jenis peran, antara lain peran aktif, partisipatif, dan pasif. Peran aktif dilakukan secara konsisten dalam organisasi atau lembaga sosial, sementara peran partisipatif hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Peran pasif tidak dilakukan sama sekali. Dengan demikian, peran memiliki kaitan dengan status atau kedudukan seseorang, yang berarti peran mengharapkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan posisinya dengan melaksanakan tugas dan fungsinya.³³⁴

Sementara menurut Fahmi Idrus, istilah “tokoh” merujuk kepada individu yang memiliki reputasi dan pengaruh yang signifikan dalam bidang politik, budaya, dan sebagainya. Tokoh agama di sisi lain, adalah orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam terutama dalam konteks keagamaan, dan sering dianggap sebagai contoh teladan dan sumber pengetahuan bagi orang lain. Mereka dianggap memiliki keahlian dan moralitas yang tinggi dalam bidang agama, baik dalam praktik keagamaan maupun pemahaman spiritual.³³⁵

Tokoh agama Kristen dianggap sebagai panduan bagi umat Kristen dalam menjalani kehidupan keagamaan, sosial, dan masyarakat yang baik.³³⁶

³³³ (Soekanto, 2013)

³³⁴ Muh Abdul Hasan, Benedicta Mokal, and Juliana Lumintang, ‘Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah’, *Jurnal Ilmiah Society*, 2.1 (2022).

³³⁵ Sri Syafa’ati and Hidayatul Muamanah, ‘Konsep Pendidikan Menurut Muhammad Naquib Al-Attas Dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Nasional’, *Palapa*, 8.2 (2020), 285–301.

³³⁶ Samuel Agus and Andrias Pujiono, ‘Implementasi Strategi Pembelajaran Tuhan Yesus Berbasis Masalah Dalam Pendidikan Agama Kristen Di Gereja’, *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen*, 2.2 (2023), 74–84.

Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama Kristen, dan sering disebut sebagai pendeta, Pastor, dan sebagainya. Di kabupaten Poso tokoh agama Kristen berperan sebagai pelayan masyarakat yang telah melalui proses seleksi dan pembelajaran yang ketat dalam ilmu keagamaan. Sementara itu, tokoh agama dalam Islam adalah seorang cendekiawan agama, ulama, kyai, ustaz, atau intelektual Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat karena kepemimpinannya dan pengetahuannya yang mendalam tentang Islam.³³⁷ Mereka berperan dalam menegakkan ajaran Islam dan mempromosikan perilaku yang baik, dan sering disegani oleh masyarakat karena kharisma dan otoritas mereka. Tokoh agama Islam di Kabupaten Poso biasanya sebagai pengajar ilmu keagamaan yang dikenal sebagai ustadz atau ulama.

Peran tokoh agama sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Sebagai tokoh yang memiliki karisma, mereka mampu memengaruhi orang lain dengan kelebihan mereka. Bagi para pengikutnya, tokoh agama sering dianggap sebagai penyelamat, pelindung, bahkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Ada pula yang hanya melihat tokoh agama sebagai tempat untuk bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga yang meyakini bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dalam hidup mereka.³³⁸

Lembaga keagamaan memegang peran krusial dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik di Poso dengan menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian dan memulihkan kerukunan antar-etnis serta antar-agama. Salah satu strategi utama yang mereka terapkan adalah mediasi dan dialog antar-komunitas. Lembaga keagamaan menjadi mediator efektif dalam mengorganisir pertemuan antara pemimpin komunitas yang saling bertikai, membuka jalan bagi dialog yang konstruktif guna mencapai solusi damai dan meredakan ketegangan yang berkepanjangan.³³⁹

³³⁷ Junio Richson Sirait and Hestyn Natal Istinatun, 'Akseptasi Teologi Pada Kerukunan Umat Islam Dan Kristen Di Indonesia', *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5.2 (2022), 79–86.

³³⁸ Neliwati Neliwati, Samsu Rizal, and Hemawati Hemawati, 'Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat', *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9.1 (2022), 32–43.

³³⁹ Musa Saleh, 'Role of Interfaith Mediation Centre in Managing Conflict between Farmers and Herdsmen in Bauchi State, Nigeria', *Journal of African History, Culture and Arts*, 2.2 (2022), 110–23.

Selain itu, lembaga keagamaan juga aktif dalam edukasi damai dan penyuluhan kepada masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan pentingnya perdamaian, tetapi juga nilai-nilai universal seperti kasih sayang, pengampunan, dan toleransi antar-agama. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang terpapar konflik, menciptakan landasan yang kokoh untuk rekonsiliasi jangka Panjang.

Langkah konkret yang dilakukan dengan cara masuk pada Lembaga Pendidikan formal untuk memberikan pemahaman tentang kerukunan umat beragama, terkhusus pasca terjadinya konflik, sebagai upaya rekonsiliasi.³⁴⁰ Membangun kebersamaan adalah cara lain untuk menciptakan perdamaian. Kebersamaan ini dipraktikkan dalam kegiatan akademik dan non-akademik seperti interaksi sosial sehari-hari dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

Di sekolah dengan siswa minoritas Muslim, semua siswa dari berbagai agama juga ikut belajar bersama dan mereka dapat bekerja sama selama kegiatan belajar di sekolah. Demikian pula, dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka, dan beberapa pelatihan perdamaian. Siswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengembangkan bakat dan meraih prestasi.

Dalam kegiatan amal kemanusiaan, siswa Muslim dan Kristen bersama-sama mengumpulkan dana untuk warga sekolah yang sakit, berduka, dan masyarakat yang terkena bencana alam. Setiap tahun, siswa Muslim dan Kristen berdoa bersama sebelum ujian nasional dan mengumpulkan kebutuhan pokok yang dibagikan ke panti asuhan di Kota Poso. Dialog adalah bentuk yang sederhana, fleksibel, cair, dan alami. Ini terkait dengan interaksi sosial dalam kegiatan sehari-hari orang beragama.³⁴¹

³⁴⁰ Saepudin Mashuri and others, 'Schools Strategies in Countering Religious Radicalism in Post-Conflict Community in Poso Regency Central Sulawesi, Indonesia', *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4.1 (2022), 9–20.

³⁴¹ Vlaho Kovačević, Krunoslav Malenica, and Goran Kardum, 'Symbolic Interactions in Popular Religion According to Dimensions of Religiosity: A Qualitative Study', *Societies*, 11.2 (2021), 30.



(Sumber: *Data Tempo*, 21/07/2024)

Dalam konteks sekolah yang berada di tengah masyarakat yang telah mengalami dan rentan terhadap konflik, dialog harus terus dikembangkan dalam berbagai bentuk sebagai solusi dalam upaya penyelesaian konflik.³⁴² Namun, dialog kehidupan antaragama terus digunakan dalam kehidupan sekolah sehari-hari, tanpa harus menunggu konflik terjadi, karena dialog adalah elemen penting untuk kehidupan yang damai.³⁴³

Meski demikian, peran lembaga keagamaan sebagai aktor dalam rekonsiliasi pasca-konflik di Poso memiliki tantangan, karena lembaga-lembaga ini sebagian besar telah kehilangan kredibilitas mereka akibat keterlibatan dalam peristiwa-peristiwa konflik. Institusionalisasi agama yang kuat, nasionalisme agresif, dan propaganda semuanya memiliki dampak besar pada kredibilitas agama. Meskipun demikian, upaya kerjasama antaragama dilakukan untuk membangun hubungan baru dan damai baik pada tingkat institusional maupun sosial.

Aktor-aktor keagamaan dapat berkontribusi pada proses rekonsiliasi dalam beberapa cara. *Pertama*, keyakinan agama dapat menawarkan komponen tak berwujud yang penting dalam pembangunan perdamaian. *Kedua*, aktor-aktor keagamaan secara tradisional menjalankan sejumlah fungsi

³⁴² Gary T Furlong, *The Conflict Resolution Toolbox: Models and Maps for Analyzing, Diagnosing, and Resolving Conflict* (John Wiley & Sons, 2020).

³⁴³ Mashuri and others.

sosial yang bisa lebih penting pada fase rekonsiliasi. Ketiga, Aktor-aktor keagamaan memainkan peran penting sebagai anggota masyarakat sipil lokal.³⁴⁴

Dalam kasus Poso, poin ketiga sangat relevan, lembaga-lembaga keagamaan dapat memenuhi sejumlah fungsi yang berbeda, seperti mobilisasi (selama konflik, tetapi juga untuk perdamaian), sosialisasi melalui pendidikan dan pelatihan, integrasi mereka yang dikecualikan dari masyarakat (melalui pembangunan sosial-ekonomi atau membangun kembali jaringan sosial-ekonomi masyarakat pascaperang), dan mengambil alih peran organisasi politik dan partisan dalam hal-hal tertentu, misalnya yang terkait dengan hak asasi manusia.

Tujuan utama rekonsiliasi adalah mengubah hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik melalui pertemuan antaragama, mengatasi masalah yang dihadapi para penyintas, menyediakan dukungan spiritual dan material serta mengakui status korban dari semua yang terlibat.³⁴⁵ Aspek yang krusial adalah inklusi moral, yaitu rehumanisasi. Komunitas agama: Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dalam membangun toleransi dan masyarakat sipil dengan bantuan lima kelompok kerja: hukum, media, pendidikan, perempuan, dan pemuda.

Proses pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi pasca konflik adalah tugas yang sangat kompleks dan menantang.³⁴⁶ Rekonsiliasi di Poso, membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Lembaga agama dapat berperan penting, namun mereka memerlukan dukungan yang lebih besar dari negara dan komunitas internasional. Komitmen politik, kerja sama lintas etnis, dan upaya yang tulus untuk keadilan bagi semua korban adalah kunci keberhasilan rekonsiliasi.

Sekolah menciptakan perdamaian di antara siswa dan menjadi bagian dari upaya membangun perdamaian bagi semua komunitas agama. Sekolah sebagai sistem sosial dapat menjadi forum strategis dalam memulai perdamaian agama di tengah masyarakat.³⁴⁷ Melalui pendidikan agama Islam,

³⁴⁴ Rugar.

³⁴⁵ Ildephonse Rutagambwa, 'Religious Organizations on Unity and Reconciliation Program in Post-Genocide Rwanda. Case of Igiti Cy'Umuwumu Association' (University of Rwanda, 2021).

³⁴⁶ Redie Bereketiab, 'Understanding Peacebuilding and State Building: Post-Conflict African Challenges', *International Journal of African Studies*, 1.3 (2021), 16–30.

³⁴⁷ Mashuri and others.

sekolah berkontribusi dalam menciptakan generasi yang damai dan budaya sekolah dengan legitimasi teologis yang kuat. Dimulai dari budaya damai di sekolah, guru dan siswa dapat terlibat dalam aksi perdamaian antaragama di masyarakat.

Oleh karena itu, sekolah menjadikan nilai toleransi sebagai nilai penting dalam menjalankan dialog kehidupan sosial dan kemanusiaan di sekolah.³⁴⁸ Fenomena di atas menunjukkan bahwa komposisi mayoritas dan minoritas dalam hal agama di sekolah tidak menjadi penghalang untuk membentuk sikap toleran. Hal ini karena semua bentuk ritual dan kegiatan keagamaan mendapatkan hak yang sama dari sekolah. Guru agama Islam, bersama dengan siswa Muslim, berkontribusi pada keberhasilan kegiatan keagamaan agama lain. Sebaliknya, penganut agama lain juga membantu melaksanakan kegiatan keagamaan umat Islam.

Perdamaian di antara penganut agama, terutama Kristen dan Muslim, di sekolah ini tidak hanya berhenti di lingkungan sekolah. Guru dan siswa berusaha menampilkan sikap toleran dan damai saat merayakan Natal, resepsi, dan acara 'padungku' yang diadakan di rumah guru atau siswa Kristen. Umat Kristen mengundang umat Muslim dan menyiapkan makanan halal sesuai ajaran Islam yang diolah dan disiapkan oleh guru Muslim. Untuk menjaga persatuan, umat Muslim dan Kristen saling mengunjungi pada momentum hari raya. Pada Idul Fitri, umat Kristen, baik guru maupun siswa, mengunjungi rumah warga sekolah yang beragama Islam.

Keterlibatan sekolah, terutama dalam materi pendidikan agama Islam, menunjukkan bahwa perdamaian dalam masyarakat juga dapat dimulai dari perdamaian sekolah. Guru, siswa, dan orang tua adalah anggota masyarakat yang berbagi latar belakang agama. Pemahaman mereka tentang makna perdamaian bagi kehidupan tentunya berkontribusi untuk menangkal ide dan gerakan radikal dalam masyarakat. Bersama dengan LSM perdamaian, sekolah secara aktif terlibat dalam kegiatan penyuluhan, lokakarya, dan berbagai bentuk kampanye perdamaian di masyarakat Poso.

Dengan demikian, pelayanan sosial dan rehabilitasi psikososial juga menjadi fokus penting bagi lembaga keagamaan dalam membantu korban konflik menyembuhkan trauma mereka. Pendekatan spiritual dan konseling

³⁴⁸ Mashuri and others.

digunakan untuk mendukung proses penyembuhan baik secara individu maupun kelompok, membangun ketahanan psikologis yang diperlukan untuk pemulihan yang efektif.

Tidak hanya itu, lembaga keagamaan turut memberdayakan perempuan dan pemuda sebagai agen perdamaian. Mereka menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke pasar kerja untuk membantu kelompok ini berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat pasca-konflik. Upaya ini tidak hanya mengangkat peran perempuan dan pemuda dalam proses rekonsiliasi, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mengambil bagian aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif.

Selain itu, lembaga keagamaan berperan penting dalam mendorong keadilan sosial. Mereka menjadi suara advokasi bagi hak-hak warga yang terabaikan atau dirugikan selama konflik, serta mendukung reformasi kelembagaan untuk memastikan semua pihak merasa diperlakukan secara adil dan setara.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh lembaga keagamaan di Poso tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan situasi pasca-konflik, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh bagi perdamaian yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas agama dalam upaya rekonsiliasi ini tidak hanya menyatukan masyarakat Poso ke arah yang lebih baik dan damai, tetapi juga mengirimkan pesan penting tentang kekuatan persatuan dalam perbedaan. Lembaga keagamaan tidak hanya berperan sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang kritis dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersatu dan harmonis.

Maka dari itu, dari uraian di atas penulis memahami paling tidak beberapa poin penting yang dapat dicatat. *Pertama*, di Poso, integrasi sosial terhambat oleh perbedaan budaya dan agama yang tajam. Untuk rekonsiliasi yang efektif, diperlukan penguatan nilai-nilai bersama yang mampu menjembatani perbedaan ini. Program rekonsiliasi simbolis dan seremonial perlu dilengkapi dengan pendekatan mendalam yang membangun solidaritas antar kelompok. Durkheim berpendapat bahwa integrasi sosial tercapai melalui nilai-nilai bersama, norma sosial, dan solidaritas.³⁴⁹

³⁴⁹ Ni Wayan Radita Novi Puspitasari, 'Solidarity as a Theory: The Development of the Concept', *Социология*, 2, 2020, 367–75.

Kedua, proses rekonsiliasi mencakup empat elemen utama: kebenaran, kasih sayang, keadilan, dan perdamaian.³⁵⁰ Dalam konteks Poso, penting untuk mengungkap kebenaran peristiwa konflik, mengembangkan kasih sayang antar pihak, dan mencapai keadilan bagi korban. Namun, sering kali program pasca-konflik lebih fokus pada hasil cepat yang terlihat baik di mata publik, daripada investasi jangka panjang yang mendalam.

Ketiga, peningkatan modal sosial dapat dicapai melalui partisipasi sipil yang lebih besar dan penguatan institusi sosial.³⁵¹ Keterlibatan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan pasca-konflik harus lebih substansial untuk memastikan program-program tersebut efektif.

Keempat, kepercayaan antara individu dan kelompok adalah dasar kerjasama yang efektif. Membangun kembali kepercayaan yang hilang akibat konflik Poso adalah tantangan besar. Program-program yang berfokus pada interaksi inklusif di tempat-tempat umum seperti pasar tradisional dan sekolah dapat membantu memperkuat kepercayaan antar komunitas yang beragam.

Kelima, Kebijakan pasca-konflik sering kali tidak memahami dinamika lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat Poso. Fokus pada pencapaian cepat tanpa memahami situasi dan kebutuhan mendasar masyarakat cenderung kurang efektif. Evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan konteks lokal, termasuk budaya, sejarah konflik, dan struktur sosial masyarakat.³⁵²

Keenam, Lembaga keagamaan dapat berperan penting dalam proses rekonsiliasi melalui edukasi damai dan penyuluhan kepada masyarakat. Mereka menawarkan komponen tak berwujud yang penting dalam pembangunan perdamaian, seperti dukungan spiritual dan moral. Lembaga-lembaga ini juga dapat membantu mobilisasi masyarakat untuk tujuan

³⁵⁰ Andrew Campbell, 'Forgiveness and Reconciliation as an Organizational Leadership Competency within Transitional Justice Instruments', *Servant-Leadership and Forgiveness: How Leaders Help Heal the Heart of the World*, 133 (2020).

³⁵¹ Malika Igalla, Jurian Edelenbos, and Ingmar van Meerkerk, 'What Explains the Performance of Community-Based Initiatives? Testing the Impact of Leadership, Social Capital, Organizational Capacity, and Government Support', *Public Management Review*, 22.4 (2020), 602–32.

³⁵² Eduardo S Brondizio and others, 'Locally Based, Regionally Manifested, and Globally Relevant: Indigenous and Local Knowledge, Values, and Practices for Nature', *Annual Review of Environment and Resources*, 46.1 (2021), 481–509.

perdamaian, integrasi sosial, dan pembangunan kembali jaringan sosial-ekonomi.

Ketujuh, Pendidikan formal dan non-formal memainkan peran penting dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan komunitas. Kegiatan akademik dan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya dapat memperkuat kebersamaan dan saling pengertian. Program pendidikan yang menekankan kerukunan dan dialog antaragama dapat membantu membangun fondasi yang kokoh untuk rekonsiliasi jangka Panjang

Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, baik dalam urusan agama maupun kemasyarakatan serta kenegaraan. Mereka menjadi imam dalam berbagai masalah untuk menjalankan program pemerintah dan memfasilitasi harmonisasi kehidupan masyarakat. Peran tokoh agama meliputi tiga hal, yaitu memberikan aturan yang membimbing dalam masyarakat, bertindak sesuai dengan perannya dalam masyarakat, dan menjadi sosok penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁵³

Mereka dapat memenuhi peran tersebut dengan melakukan tugas-tugas mereka, seperti memberikan kerangka pokok yang jelas bagi pengikutnya, mengawasi perilaku masyarakat yang dipimpinnya, dan bertindak sebagai wakil kelompok di luar lingkungan mereka. Secara keseluruhan, tokoh agama memiliki peran yang penting sebagai pemimpin dalam upacara keagamaan dan sebagai pembimbing dalam kehidupan sosial masyarakat dengan landasan ilmu keagamaan yang mereka miliki.



(Sumber: Merdeka.com, 21/07/2024)

³⁵³ (Syahrin, 2023)

Lembaga dan pemimpin agama memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi proses pemulihan setelah terjadinya konflik antar kelompok agama. Mereka dapat mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan antar kelompok, seperti dengan melakukan dialog atau pertemuan bersama para tokoh masyarakat dari berbagai agama.³⁵⁴ Selain itu, ada beberapa cara potensial untuk mendorong toleransi dan kerukunan beragama selama dua dekade. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan keberagaman kepada generasi muda agar mereka lebih memahami nilai-nilai pluralisme dan saling menghargai perbedaan. Selain itu, bisa juga dilakukan kampanye atau program-program sosial yang melibatkan semua komunitas agama untuk bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitarnya.

Namun, meskipun begitu masih banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun perlakuan diskriminatif karena akan membuat suasana menjadi tegang sehingga bisa saja menimbulkan konflik baru. Pada bagian ini penulis hendak menelusuri sejauh mana keterlibatan Lembaga dan pemimpin agama dalam upaya memulihkan kondisi masyarakat pasca konflik.³⁵⁵ Dalam konteks keberagaman Indonesia, lembaga dan pemimpin agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memperkuat peran mereka dalam mempromosikan toleransi dan mengurangi konflik keagamaan.

Selain itu, upaya-upaya inisiatif pembangunan sosial juga dapat memberikan kontribusi besar dalam proses pemulihan pasca-konflik. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, rumah sakit dan sekolah dapat membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat. Tidak hanya itu, program-program pelatihan keterampilan juga dapat membantu meningkatkan daya saing masyarakat di pasar kerja lokal

³⁵⁴ Evin Diku, 'Peranan Pemimpin Agama Terhadap Perdamaian Internasional (Studi Kasus: Konflik Lebanon)' (Universitas Hasanuddin, 2020).

³⁵⁵ Muis S A Pikahulan, 'Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Toleransi Dan Moderasi Beragama Di Kota Ambon', *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 9.1 (2023), 74–87.

maupun nasional.³⁵⁶ Sehingga dengan adanya kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat setempat maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan secara umum. Semua hal ini tentunya akan berdampak positif pada upaya membangun kembali tatanan sosial Poso yang harmonis serta menciptakan perdamaian yang langgeng di masa depan.

Lembaga dan pemimpin agama memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi proses pemulihan di masyarakat. Mereka dapat memberikan pandangan moral dan etika untuk menjaga keharmonisan antara berbagai kelompok masyarakat.³⁵⁷ Selain itu, mereka juga bisa menjadi mediator dalam menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Untuk mendorong toleransi dan kerukunan beragama selama dua dekade, ada beberapa cara potensial.

Pertama pendidikan multi-agama harus diperkuat untuk mengubah persepsi negatif terhadap kelompok lain serta meningkatkan pengertian tentang keyakinan dan praktik agama yang berbeda-beda.³⁵⁸ *Kedua*, dialog antaragama juga perlu dipromosikan secara aktif sebagai bentuk interaksi positif di antara warga agar saling mengenal lebih baik dan meningkatkan rasa hormat satu sama lainnya.³⁵⁹ Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya adalah penyampaian pesan-pesan perdamaian pada komunitas dengan basis agamawi melalui khotbah atau ceramah serta aksi-aksi nyata seperti acara amal bersama atau donor darah kolektif.³⁶⁰

Pertama, para pemimpin agama menggunakan pendekatan kepada masyarakat sebagai sebuah upaya membangun kembali tatanan yang rusak. Upaya tersebut dalam term pembangunan manusia dikenal dengan istilah *Peacebuilding* adalah gabungan dari kata “*peace*” dan “*building*”. Secara

³⁵⁶ Atikah Nuraini, ‘Mencari Titik Temu Antara Pendidikan HAM Dan Transformasi Konflik: Refleksi Pengalaman Dari Lapangan’, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15.1 (2022), 20–43.

³⁵⁷ Lidya Khofifah Turohmah, Acep Nurlaeli, And Abdul Kosim, ‘Peran Komunikasi Organisasi Terhadap Efektivitas Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Era Globalisasi’, *Peteka*, 6.4 (2023), 699–707.

³⁵⁸ Muhammad Syaikhon, ‘Toleransi Dalam Keluarga Multi Agama (Kajian Pendidikan Islam Multikultural Di Desa Laban Menganti Gresik)’, 2022.

³⁵⁹ Christin Makahekung, ‘Pendekatan Teologi Kontekstual Dalam Menciptakan Dialog Antar Agama’, *Shamayim: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3.1 (2024), 40–48.

³⁶⁰ (Bayu Rizaldi, 2023)

etimologis, “*peace*” merujuk pada kondisi di mana tidak ada lagi peperangan atau perkelahian, sementara “*building*” mengacu pada proses atau kepentingan membangun sesuatu.³⁶¹ Oleh karena itu, “*peacebuilding*” dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun perdamaian. Meskipun demikian upaya tersebut masih mendapat sedikit kendala dari masyarakat yang masih merasakan bekas luka lama di masa lampau.

Meski demikian warga Poso berharap lembaga dan pemimpin agama terus menjadi motor penggerak perdamaian dan rekonsiliasi di masyarakat. Bagi warga, para pemimpin agama dan lembaga memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terkena dampak konflik.

Senada dengan itu, Galtung berpendapat perdamaian harus memiliki struktur yang berbeda saat terjadi konflik. Ini berarti menghilangkan akar konflik dan memberikan dukungan kepada pihak lokal dalam mengelola perdamaian dan menyelesaikan konflik.³⁶² *Peacebuilding* tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga mencakup usaha menjaga kesepakatan damai. *Peacebuilding* adalah proses berkelanjutan yang melibatkan aspek-aspek psikologis, spiritual, sosial, ekonomi, dan politik untuk meminimalisir kekerasan langsung maupun struktural. Ini meliputi berbagai strategi dan tahapan waktu yang mencakup periode pendek, menengah, dan panjang.

Perdamaian lanjut Galtung adalah perjalanan bukan tujuan. Konflik selalu terkait dengan kekerasan, dan untuk mencapai perdamaian, perlu diperhatikan kontradiksi yang mendasarinya. Galtung mengidentifikasi tiga jenis kekerasan: langsung, struktural, dan budaya, serta menjelaskan bahwa penyelesaian konflik memerlukan berbagai langkah, termasuk *peacekeeping*, *peacebuilding*, dan *peacemaking*.³⁶³ *Peacebuilding* adalah upaya untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dengan mengubah sikap, memperbaiki hubungan, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ini tidak hanya berdampak pada saat konflik terjadi, tetapi juga berpotensi

³⁶¹ Devy Indah Paramitha and Intan Kinanti Damarin Tyas, ‘Socialization of Social Media as a Means of Building Peace Culture among the Z-Generation in Samarinda City’, *Community Empowerment*, 7.10 (2022), 1716–22.

³⁶² Uksan.

³⁶³ Johan Galtung, ‘Violence, Peace and Peace Research’, *Organicom*, 15.28 (2018), 33–56.

menghilangkan diskriminasi dan menciptakan kedamaian jangka panjang bagi generasi mendatang.³⁶⁴

Langkah-langkah diambil untuk memastikan pemulihan dan perlindungan hak-hak beragama bagi komunitas masyarakat di Kabupaten Poso. Pemerintah Kabupaten Poso secara resmi mengakui perbedaan baik agama, etnis, budaya, dan sejenisnya, memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, dan memungkinkan mereka untuk beribadah dan mengamalkan agama mereka dengan bebas.³⁶⁵ Selama periode ini, rumah ibadah dan sekolah yang dulu hancur kini telah dibangun kembali dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dalam konteks ini masyarakat Kabupaten Poso juga berusaha memulihkan kehidupan mereka yang hancur dan menghadapi tantangan-tantangan baru.

Sebagai contoh konkret, ada beberapa lembaga seperti Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS), organisasi non-pemerintah seperti Rumah Zakat, dan lembaga pendidikan seperti Universitas Poso yang telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mendukung pemulihan pasca konflik. Respon masyarakat cukup positif. Mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan dan dukungan dari lembaga-lembaga tersebut. Banyak yang merasa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut membawa harapan baru bagi masa depan yang lebih baik dan membantu membangun kembali kehidupan yang lebih stabil dan damai.

Proyek-proyek bantuan dan pembangunan dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur keagamaan, mempromosikan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga telah berharap banyak bahwa lembaga-lembaga ini terus mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat untuk melanjutkan upaya pemulihan pasca konflik. Selain itu, warga juga berharap mereka dapat terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menciptakan program-program yang efektif dan berkelanjutan untuk membangun kembali kehidupan yang damai dan sejahtera bagi semua warga Kabupaten Poso

³⁶⁴ Johan Galtung, 'Cultural Violence', *Journal of Peace Research*, 27.3 (1990), 291–305.

³⁶⁵ Berperspektif Adil Gender di Poso, 'Tim Rencana Aksi Damai (RAD) Perempuan Untuk Perdamaian Poso'.

Kedua, menggunakan pendekatan Falsafah kehidupan Masyarakat Poso yakni Sintuwu Maroso (persatuan yang kuat). Kata “Sintuwu Maroso” berasal dari bahasa Pamona yang mengandung makna “Persatuan yang kuat”.³⁶⁶ Falsafah Sintuwu Maroso menjadi landasan hidup bagi masyarakat Poso untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kerukunan antarwarga. Di dalamnya terdapat nilai-nilai seperti saling menghargai (*tuwu mombetubunaka*), di mana semua orang dihargai tanpa memandang perbedaan; saling menghidupi (*tuwu mombepatuwu*), di mana masyarakat berbagi jika memiliki lebih; dan saling menolong (*tuwu mombesungko*), di mana masyarakat membantu sesama yang sedang kesulitan.

Sintuwu Maroso, yang mengandung makna “persatuan yang kuat,” memiliki potensi besar untuk menjadi landasan dalam pemulihan pasca konflik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesatuan, toleransi, dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Dalam konteks pasca konflik, pendekatan Sintuwu Maroso sebagai pedoman moral yang kuat untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat konflik dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.

Dengan mengikuti falsafah ini, masyarakat Poso dapat bersatu dalam pemikiran dan tindakan, serta menggunakan panduan ini dalam interaksi sehari-hari yang penuh dengan damai, kasih, dan kepedulian. Falsafah ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Poso, yang menjadikan mereka tetap bersatu dalam persatuan yang kokoh. Implementasi Sintuwu Maroso dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terlihat saat mereka bersama-sama merayakan kegembiraan atau berbagi kesedihan, di mana mereka secara spontan melakukan Posintuwu, yaitu saling membantu dan mendukung sesama.

Sintuwu Maroso mengusung nilai-nilai perdamaian yang merupakan kearifan local seperti, Kesetaraan Sesama Manusia yang menempatkan semua manusia, tanpa memandang suku, kulit, atau agama, sebagai makhluk Tuhan yang sama. Konsep ini tercermin dalam budaya dan filosofi Sintuwu Maroso yang menyatakan bahwa semua orang setara di mata Tuhan.

³⁶⁶ I Ketut Yakobus, Muhamad Yahya, and Andi Dodi May Putra Agustang, ‘Revitalisasi Nilai Budaya Sintuwu Maroso Sebagai Alternative Resolusi Pasca Konflik Di Kabupaten Poso’, *Jurnal Sosio Sains*, 5.1 (2019), 14–21.

Kebersamaan sangat ditekankan dalam Sintuwu Maroso, di mana setiap anggota komunitas saling mendukung satu sama lain seperti bangunan kokoh yang terdiri dari berbagai komponen yang berbeda namun saling menopang. Persaudaraan, kehidupan bersama dalam Sintuwu Maroso didasari oleh ikatan emosional dan perasaan sebagai satu keluarga.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, yang merupakan tradisi nenek moyang yang dipandu tetua adat. Selain juga menekankan persatuan, Sintuwu Maroso menekankan pentingnya persatuan dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Meskipun memiliki keberagaman budaya, mereka tetap satu dalam naungan Sintuwu Maroso. Terakhir Taat Pada Hukum, Penghuni Sintuwu Maroso diwajibkan untuk taat pada hukum, termasuk hukum negara, hukum adat, dan hukum alam.³⁶⁷

Menurut Marola, dalam laporan berita nasional, menyatakan bahwa “beberapa lembaga sosial di Kabupaten Poso telah mengadakan program-program kerjasama lintas-agama yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antar komunitas yang terlibat dalam konflik. Selain itu, pemimpin agama juga telah aktif dalam memfasilitasi dialog antar kelompok dan memberikan bimbingan moral kepada anggota masyarakat tentang pentingnya toleransi dan rekonsiliasi. Menurutnya, jika falsafah ini terlupakan, maka konflik masa lalu di Poso dapat terulang kembali. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Sintuwu Maroso ini kepada generasi muda sejak dini.

Menurut Bupati Kabupaten Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang, Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemulihan pasca konflik. Kami telah bekerja sama dengan mereka dalam berbagai kegiatan, termasuk dialog, mediasi, dan program sosialisasi. Mereka membawa pengaruh besar dalam masyarakat dan dapat membantu mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi.

Langkah lain yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Poso di antaranya adalah program pendidikan dan sosialisasi dilaksanakan secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok agama di masyarakat. Pembentukan forum rekonsiliasi yang melibatkan

³⁶⁷ Muhammad Nur, ‘Kearifan Lokal Sintuwu Maroso Sebagai Simbol Moderasi Beragama’, *Pusaka*, 8.2 (2020), 241–52.

berbagai pihak terkait juga menjadi salah satu strategi, sementara tokoh agama terlibat aktif dalam dialog, mediasi, dan program sosialisasi untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Program pemberdayaan ekonomi juga dilaksanakan untuk membantu masyarakat memulihkan mata pencaharian mereka, sementara penegakan hukum diperkuat untuk menjamin perlindungan hak-hak semua warga tanpa memandang agama atau etnis mereka. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Poso berusaha memulihkan kerukunan antar kelompok agama dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca konflik.

BAB VI PENUTUP

Buku ini telah mengungkapkan pentingnya memahami peran agama dalam konteks pemulihan pasca-konflik, khususnya dalam membangun perdamaian dan keadilan di masyarakat. Dalam perjalanan penelusuran ini, kita telah melihat bagaimana nilai-nilai dan norma-norma agama dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat kohesi sosial, mendorong dialog, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk rekonsiliasi. Pesan utama yang ingin disampaikan kepada pembaca adalah bahwa pemahaman mendalam tentang agama dan konteks sosialnya sangat penting untuk menghindari potensi konflik yang bisa muncul, terutama yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan.

Sebagai langkah pertama, masyarakat perlu mengedepankan dialog antaragama sebagai sarana untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Dialog ini tidak hanya membantu mengurangi ketegangan, tetapi juga membuka ruang bagi kolaborasi dan kerja sama dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Dengan mendengarkan perspektif satu sama lain, kita dapat menciptakan jembatan yang menghubungkan komunitas yang berbeda dan membangun solidaritas yang kuat di antara mereka.

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa konflik yang dipicu oleh perbedaan agama sering kali berakar pada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, perlu ada upaya yang serius dalam menciptakan keadilan sosial. Ini mencakup distribusi sumber daya yang adil, akses yang setara terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu tanpa memandang latar belakang agama mereka.

Dalam konteks Poso, kita belajar bahwa peran aktif masyarakat sipil dan lembaga keagamaan sangat krusial dalam proses rekonsiliasi. Masyarakat harus diberdayakan untuk terlibat dalam tata kelola konflik dan pembangunan perdamaian. Ini tidak hanya memberikan rasa memiliki kepada komunitas, tetapi juga memupuk rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai program yang mempromosikan pemahaman lintas agama dan meningkatkan kemampuan komunitas dalam mengatasi konflik.

Penting juga untuk menekankan peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian. Kebijakan yang inklusif dan adil akan membantu mencegah ketegangan yang bisa memicu konflik. Pemerintah harus berkomitmen untuk menciptakan platform di mana semua suara dapat didengar, termasuk suara minoritas yang sering terabaikan. Hanya dengan cara ini, kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dapat dipulihkan, yang merupakan fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.

Buku ini juga menyoroti bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam mencegah konflik. Kurikulum yang mendidik generasi muda tentang pentingnya toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan sangat penting. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama yang positif, seperti kasih sayang, empati, dan pengertian, dapat membentuk sikap dan perilaku generasi mendatang dalam menghadapi perbedaan. Ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih damai.

Selanjutnya, kita tidak boleh melupakan pentingnya dukungan internasional dalam upaya membangun perdamaian. Komunitas global harus berperan aktif dalam mendukung proses rekonsiliasi di daerah-daerah yang dilanda konflik. Melalui kerja sama internasional, transfer pengetahuan, dan sumber daya, kita dapat membantu masyarakat yang mengalami konflik untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka. Dukungan semacam ini sangat penting untuk menciptakan kestabilan jangka panjang.

Buku ini juga menyampaikan pesan bahwa pemulihan pasca-konflik bukanlah proses yang cepat atau mudah. Diperlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, termasuk individu, komunitas, pemerintah, dan organisasi internasional. Kita harus bersabar dan tidak kehilangan harapan dalam menjalani proses ini. Setiap langkah kecil menuju perdamaian adalah langkah yang berarti, dan kita harus merayakan setiap pencapaian yang diraih dalam perjalanan tersebut.

Akhirnya, mari kita ingat bahwa menjaga perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu, tidak peduli latar belakang agama atau etnis, memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni sosial. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu dan berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran yang terdapat dalam buku ini, kita dapat bersama-sama berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih damai, adil, dan harmonis.

Dengan kata lain, buku ini tidak hanya memberikan wawasan akademis, tetapi juga panggilan untuk aksi nyata. Mari kita bersama-sama menjaga perdamaian, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, sehingga konflik yang dipicu oleh agama dapat dihindari dan digantikan dengan kolaborasi dan persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, Mohammed, 'Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding', *Journal of Peace Research*, 38.6 (2001), 685–704
- Agus, Samuel, and Andrias Pujiono, 'Implementasi Strategi Pembelajaran Tuhan Yesus Berbasis Masalah Dalam Pendidikan Agama Kristen Di Gereja', *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen*, 2.2 (2023), 74–84
- Ajit, Shinde Kiran, 'Quest for Good Governance: Contribution and Potential of Religious Institutions as Stakeholders', in *Monash Governance Research Unit Conference*, 2004, xxvii, 1–15
- Akanji, I A, 'Towards a Theology of Conflict Transformation: A Study of Religious Conflict in Contemporary Nigerian Society', 2011
- Akpanika, Ekpenyong Nyong, 'Religious and Political Crises in Nigeria: A Historical Exploration', 2017
- Albadi, Nuha, Maram Kurdi, and Shivakant Mishra, 'Are They Our Brothers? Analysis and Detection of Religious Hate Speech in the Arabic Twittersphere', in *2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)* (IEEE, 2018), pp. 69–76
- Alexander, K, and P Vermette, 'Implementing Social and Emotional Learning Standards by Intertwining the Habits of Mind with the CASEL Competencies', *Excelsior: Leadership in Teaching and Learning*, 12.1 (2019), 4
- Ali, Muhamad, 'CONFRONTATION AND RECONCILIATION: Muslim Voices of Maluku Conflict (1999-2002)', *Journal of Indonesian Islam*, 1.2 (2023), 379–402
- Anderson, Mary B, and Lara Olson, 'Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners', 2003
- Appleby, R S, 'Building Sustainable Peace: The Roles of Local and Transnational Religious Actors. Religious Pluralism, Globalization, and World Politics', 2008, pp. 125–154
- Appleby, R Scott, 'Religions, Human Rights and Social Change', in *The Freedom to Do God's Will* (Routledge, 2003), pp. 197–229
- Aragon, Lorraine V, 'Development Strategies, Religious Relations, and Communal Violence in Central Sulawesi, Indonesia: A Cautionary Tale', in *Development Strategies, Identities, and Conflict in Asia* (Springer,

- 2013), pp. 153–82
- Arai, Tatsushi, ‘Functional Coexistence in Intractable Conflict: A Decades-long View of Conflict Intervention’, *Peace & Change*, 47.2 (2022), 118–51
- Ariyanto, Komang, ‘Social Conflict Among Religious Groups in the Perspective of Sociology of Religion’, *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 3.2 (2023), 213–26
- Arjomand, S A, ‘Islam, Political Change and Globalization’, *Thesis Eleven*, 76.1 (2004), 9–28
- Arnesen, Anne, Keith Smolkowski, Terje Ogden, and Monica Melby-Lervåg, ‘Validation of the Elementary Social Behaviour Assessment: Teacher Ratings of Students’ Social Skills Adapted to Norwegian, Grades 1–6’, *Emotional and Behavioural Difficulties*, 23.1 (2018), 39–54
- Arzi, D E, ‘The Role of Compulsion in Islamic Conversion: Jihad, Dhimma and Ridda’, *Buff. Hum. Rts. L. Rev.*, 8 (2002), 15
- Aspalter, Christian, ‘On the Notions of Development and Evolution: A Concluding Note’, in *Super Inequality: Theoretical Essays in Economics and Social Policy* (Springer, 2023), pp. 111–22
- Atem, David Mabior, ‘The Need for Effective Leadership for Peacebuilding and Reconciliation in Divided Societies’, *Journal of Global Peace and Conflict*, 8.2 (2020), 1–11
- Augestad Knudsen, Rita, ‘Measuring Radicalisation: Risk Assessment Conceptualisations and Practice in England and Wales’, *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 12.1 (2020), 37–54
- Babagario, E A, ‘Education and Interfaith Development in Northern Nigeria’, in *Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa* (Cham: Springer International Publishing, 2022), pp. 255–272
- , ‘Interfaith Education and the Quest for Peacebuilding in Northern Nigeria’, 2019
- Bailey, B, ‘Conscious Discipline’, 2003
- Bandura, A, ‘Adolescent Development from an Agentic Perspective’, *Self-Efficacy Beliefs of Adolescents*, 5.1–43 (2006)
- , ‘Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning’, *Educational Psychologist*, 28.2 (1993), 117–148
- Bandura, A, C Barbaranelli, G V Caprara, and C Pastorelli, ‘Self-efficacy Beliefs as Shapers of Children’s Aspirations and Career Trajectories’, *Child Development*, 72.1 (2001), 187–206
- Barbato, M, C Franco, and B Le Normand, ‘Is There a Specific Ambivalence of the Sacred? Illustrations from the Apparition of Medjugorje and the Movement of Sant’Egidio’, *Politics, Religion & Ideology*, 13.1 (2012),

- Bartoli, A, ‘NGOs and Conflict Resolution’, in *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 2009, pp. 392–411
- Baycan, Tüzin, and Özge Öner, ‘The Dark Side of Social Capital: A Contextual Perspective’, *The Annals of Regional Science*, 70.3 (2023), 779–98
- BAYU RIZALDI, AKBAR, ‘IMAGE SOCIAL JAMAAH TABLIGH DI MASYARAKAT LOKAL LOMBOK: KONSERVATISME AGAMA, DAN WACANA PERDAMAIAN’ (Universitas Mataram, 2023)
- Becker, Bronwyn E, and Suniya S Luthar, ‘Social-Emotional Factors Affecting Achievement Outcomes among Disadvantaged Students: Closing the Achievement Gap’, *Educational Psychologist*, 37.4 (2002), 197–214
- Berard, Nathalie Catherine Marie, ‘Executive Function, Social Emotional Learning, and Social Competence in Autism Spectrum Disorder’ (Faculty of Graduate Studies and Research, University of Regina, 2014)
- Bereketeab, Redie, ‘Understanding Peacebuilding and State Building: Post-Conflict African Challenges’, *International Journal of African Studies*, 1.3 (2021), 16–30
- Best, Shedrack Gaya, and Carole Rakodi, ‘Violent Conflict and Its Aftermath in Jos and Kano, Nigeria: What Is the Role of Religion?’, 2011
- Bhatnagar, Stuti, and Priya Chacko, ‘Peacebuilding Think Tanks, Indian Foreign Policy and the Kashmir Conflict’, in *Rising Powers and State Transformation* (Routledge, 2020), pp. 100–119
- Bierman, K L, and M Motamedi, ‘Social and Emotional Learning Programs for Preschool Children’, in *Handbook of Social and Emotional Learning: Research and Practice*, 2015, pp. 135–151
- Borup, J, ‘Who Owns Religion? Intersectionality, Identity Politics, and Cultural Appropriation in Postglobal Buddhism’, *Numen*, 67.2–3 (2020), 226–255
- Bowlby, J, ‘The Bowlby-Ainsworth Attachment Theory’, *Behavioral and Brain Sciences*, 2.4 (1979), 637–638
- Breed, Ananda, Helena-Ulrike Marambio, Kirrily Pells, and Rajib Timalisina, *Children, Youth, and Participatory Arts for Peacebuilding: Lessons from Kyrgyzstan, Rwanda, Indonesia, and Nepal* (Taylor & Francis, 2024)
- Bridgeland, J, M Bruce, and A Hariharan, *The Missing Piece: A National Teacher Survey on How Social and Emotional Learning Can Empower Children and Transform Schools. A Report for CASEL* (Civic Enterprises, 2013)
- Brondízio, Eduardo S, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Peter Bates, Joji Carino, Álvaro Fernández-Llamazares, Maurizio Farhan Ferrari, and others, ‘Locally Based, Regionally Manifested, and Globally Relevant:

- Indigenous and Local Knowledge, Values, and Practices for Nature’, *Annual Review of Environment and Resources*, 46.1 (2021), 481–509
- Bronfenbrenner, U, ‘Ecological Models of Human Development’, *International Encyclopedia of Education*, 3.2 (1994), 37–43
- , ‘Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives’, *Adolescents and Their Families*, 2013, 1–20
- Bronfenbrenner, U, and M., ‘Recent Advances in Research on the Ecology of Human Development. Development as Action in Context: Problem Behavior and Normal Youth Development’, *Eastern Economic Journal*, 13.1 (1986), 287–309 ,
- Brooks-Gunn, J, and L B Markman, ‘The Contribution of Parenting to Ethnic and Racial Gaps in School Readiness’, *The Future of Children*, 2005, 139–168
- Brown, A L, K E Metz, and J C Campione, ‘Social Interaction and Individual Understanding in a Community of Learners: The Influence of Piaget and Vygotsky’, in *Piaget Vygotsky* (Psychology Press, 2013), pp. 145–170
- Bub, K L, K McCartney, and J B Willett, ‘Behavior Problem Trajectories and First-Grade Cognitive Ability and Achievement Skills: A Latent Growth Curve Analysis’, *Journal of Educational Psychology*, 99.3 (2007), 653
- Buchardt, M, *Pedagogized Muslimness: Religion and Culture as Identity Politics in the Classroom* (Waxmann Verlag, 2014), xxvii
- Burciu, Aurel, Rozalia Kicsi, and Ionel Bostan, ‘Social Trust and Dynamics of Capitalist Economies in the Context of Clashing Managerial Factors with Risks and Severe Turbulence: A Conceptual Inquiry’, *Sustainability*, 12.21 (2020), 8794
- Burnette, Mandi L, Assaf Oshri, Rachael Lax, Dayton Richards, and Shayne N Ragbeer, ‘Pathways from Harsh Parenting to Adolescent Antisocial Behavior: A Multidomain Test of Gender Moderation’, *Development and Psychopathology*, 24.3 (2012), 857–70
- Caldarella, Paul, and Kenneth W Merrell, ‘Common Dimensions of Social Skills of Children and Adolescents: A Taxonomy of Positive Behaviors’, *School Psychology Review*, 26.2 (1997), 264–78
- Caldera, Y M, and E W Lindsey, ‘Coparenting, Mother-Infant Interaction, and Infant-Parent Attachment Relationships in Two-Parent Families’, *Journal of Family Psychology*, 20.2 (2006), 275
- Campbell, Andrew, ‘Forgiveness and Reconciliation as an Organizational Leadership Competency within Transitional Justice Instruments’, *Servant-Leadership and Forgiveness: How Leaders Help Heal the Heart of the World*, 133 (2020)
- Caplan, G, ‘The 1994 Genocide of the Tutsi of Rwanda’, in *Centuries of*

- Genocide* (Routledge, 2012), pp. 446–475
- Choueiri, Y M, ‘Islamic Fundamentalism’, 2010
- Clarke, P B, *New Religions in Global Perspective: Religious Change in the Modern World* (Routledge, 2004)
- Clinton, E, ‘Comorbidity of Autism Spectrum Disorders and Emotional/Behavioral Disorders: Towards Improved Diagnostic Procedures, Instructional Programming, and Personnel Preparation’, *Journal on Educational Psychology*, 9.4 (2016), 38–43
- Corbett, Lionel, *Psyche and the Sacred: Spirituality beyond Religion* (Routledge, 2019)
- Cox, Fletcher D, Catherine R Orsborn, and Timothy D Sisk, ‘Religion, Peacebuilding, and Social Cohesion in Conflict-Affected Countries’, *Denver: University of Denver*, 2014
- Cozzens, D B, *The Changing Face of the Priesthood: A Reflection on the Priest’s Crisis of Soul* (Liturgical Press, 2000)
- Crawford, M, ‘Ecological Systems Theory: Exploring the Development of the Theoretical Framework as Con-Ceived by Bronfenbrenner’, *J Pub Health Issue Pract*, 4.2 (2020), 170
- Crawford, T N, P Cohen, J G Johnson, J R Sneed, and J S Brook, ‘The Course and Psychosocial Correlates of Personality Disorder Symptoms in Adolescence: Erikson’s Developmental Theory Revisited’, *Journal of Youth and Adolescence*, 33.5 (2004), 373–387
- Crittenden, P M, and M D Ainsworth, ‘14 Child Maltreatment and Attachment Theory’, in *Child Maltreatment: Theory and Research on the Causes and Consequences of Child Abuse and Neglect*, 1989, pp. 432–463
- Cummings, Kelli D, Ruth A Kaminski, and Kenneth W Merrell, ‘Advances in the Assessment of Social Competence: Findings from a Preliminary Investigation of a General Outcome Measure for Social Behavior’, *Psychology in the Schools*, 45.10 (2008), 930–46
- Dahler, Lauren, ‘Ritual in Peacebuilding: A Case Study in Post-Conflict Lira, Uganda’ (The Ohio State University, 2023)
- Dale, Dr Catherine, *Operation Iraqi Freedom: Strategies, Approaches, Results, and Issues for Congress* (Congressional Research Service Washington DC, 2008)
- Damayanti, Angel, ‘Inter Religions Conflict and Christian Radical Movement in Poso and Ambon’, 2011
- Davies, E O, and S A Egbuchu, ‘Dialogue as an Effective Mechanism for Resolving Religious Conflict in Nigeria’, *Advance Journal of Education and Social Sciences*, 4.4 (2019)
- Davis, G M, *Religion of Peace?: Islam’s War Against the World* (WND Books,

- 2006)
- DeFranza, David, Mike Lindow, Kevin Harrison, Arul Mishra, and Himanshu Mishra, 'Religion and Reactance to COVID-19 Mitigation Guidelines.', *American Psychologist*, 76.5 (2021), 744
- Denham, S A, and K M Zinsser, 'Social and Emotional Learning during Early Childhood', *Encyclopedia of Primary Prevention and Health Promotion*, 2014, 925–935
- Denis, P, 'Grief and Denial among Rwandan Catholics in the Aftermath of the Genocide against the Tutsi', in *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, 2018, pp. 287–307
- Dickens, William T, 'Frank Conversations: Promoting Peace Among the Abrahamic Traditions Through Interreligious Dialogue', *Journal of Religious Ethics*, 34.3 (2006), 397–420
- Diku, Evin, 'Peranan Pemimpin Agama Terhadap Perdamaian Internasional (Studi Kasus: Konflik Lebanon)' (Universitas Hasanuddin, 2020)
- Diperna, James Clyde, and Robert J Volpe, 'Self-report on the Social Skills Rating System: Analysis of Reliability and Validity for an Elementary Sample', *Psychology in the Schools*, 42.4 (2005), 345–54
- Dluhopolskyi, Oleksandr, and Alina Zhukovska, 'Inclusive Development as an Instrument to Overcome Economic Inequality and Discrimination', *ECONOMICS-Innovative and Economics Research Journal*, 11.1 (2023), 11–27
- Dollahite, David C, Loren D Marks, and Hilary Dalton, 'Why Religion Helps and Harms Families: A Conceptual Model of a System of Dualities at the Nexus of Faith and Family Life', *Journal of Family Theory & Review*, 10.1 (2018), 219–41
- Du, Jun, Huapeng Diao, Xiaojuan Zhou, Chunkui Zhang, Yifei Chen, Yan Gao, and others, 'Post-Traumatic Stress Disorder: A Psychiatric Disorder Requiring Urgent Attention', *Medical Review*, 2.3 (2022), 219–43
- Eisner, M P, and T Malti, 'Aggressive and Violent Behavior', *Handbook of Child Psychology and Developmental Science: Socioemotional Processes*, 3 (2015), 794–841
- Elias, M J, and N M Haynes, 'Social Competence, Social Support, and Academic Achievement in Minority, Low-Income, Urban Elementary School Children', *School Psychology Quarterly*, 23.4 (2008), 474
- Emmer, Pieter C, and Jos J L Gommans, *The Dutch Overseas Empire, 1600–1800* (Cambridge University Press, 2020)
- Engels, R C, C Finkenauer, W Meeus, and M Deković, 'Parental Attachment and Adolescents' Emotional Adjustment: The Associations with Social Skills and Relational Competence', *Journal of Counseling Psychology*,

- 48.4 (2001), 428
- Escobar, Arturo, 'Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements', *Social Text*, 31/32, 1992, 20–56
- Everist, N C, *Church Conflict: From Contention to Collaboration* (Abingdon Press, 2004)
- Ferguson, Neil, and James W McAuley, 'Radicalization or Reaction: Understanding Engagement in Violent Extremism in Northern Ireland', *Political Psychology*, 41.2 (2020), 215–30
- Fiddian-Qasmiyeh, E, and Y M Qasmiyeh, 'Muslim Asylum-Seekers and Refugees: Negotiating Identity, Politics and Religion in the UK', *Journal of Refugee Studies*, 23.3 (2010), 294–314
- Fink, G, and M Yolles, 'UNDERSTANDING NORMATIVE PERSONALITY AND ITS INTELLIGENCES', in *IACCM 10 Th Annual Conference and 3 Rd CEMS CCM/IACCM Doctoral Workshop, University of Ruse, Bulgaria–2011 CULTURAL ASPECTS OF CROSS-BORDER COOPERATION: Cometeneces and Capabilities*, p. 82
- Firdaus, Endis, 'The Learning of Religious Tolerance among Students in Indonesia from the Perspective of Critical Study', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (IOP Publishing, 2018), CXLV, 12032
- Foley, S E, *Shaykh Khalid and the Naqshbandiyya-Khalidiyya, 1776–2005* (Georgetown University, 2005)
- Frank, Andre Gunder, 'The Development of Underdevelopment', in *Imperialism* (Routledge, 2023), pp. 26–36
- Furlong, Gary T, *The Conflict Resolution Toolbox: Models and Maps for Analyzing, Diagnosing, and Resolving Conflict* (John Wiley & Sons, 2020)
- Galtung, Johan, 'Cultural Violence', *Journal of Peace Research*, 27.3 (1990), 291–305
- , 'Violence, Peace and Peace Research', *Organicom*, 15.28 (2018), 33–56
- Gamlem, A L, 'Islamic Discourse of Difference: A Critical Analysis of Maulana Mawdudi's Texts on Kafirs and Dhimmis', 2008
- Gersib, J A, and S Mason, 'A Meta-Analysis of Behavior Interventions for Students with Emotional-Behavioral Disorders in Self-Contained Settings', *Behavioral Disorders*, 48.4 (2023), 269–283
- Githigaro, John Mwangi, 'Faith-Based Peacebuilding: A Case Study of the National Council of Churches of Kenya', *Peace and Conflict Studies*, 19.1 (2012), 93–120
- Gray, Mel, "'Think Globally and Locally, Act Globally and Locally': A New

- Agenda for International Social Work Education””, in *Routledge International Handbook of Social Work Education* (Routledge, 2016), pp. 3–13
- Gresham, F M, K K Hunter, E P Corwin, and A J Fischer, ‘Screening, Assessment, Treatment, and Outcome Evaluation of Behavioral Difficulties in an RTI Model’, *Exceptionality*, 21.1 (2013), 19–33
- Grusec, J E, ‘Socialization Processes in the Family: Social and Emotional Development’, *Annual Review of Psychology*, 62.1 (2011), 243–269
- Gueldner, B A, L L Feuerborn, and K W Merrell, *Social and Emotional Learning in the Classroom: Promoting Mental Health and Academic Success* (Guilford Publications, 2020)
- Gusha, Ishanesu Sextus, ‘KAICIID: An Emerging Significant Player in Global Interfaith and Development Initiatives’, in *Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa* (Springer, 2022), pp. 65–80
- Gustiana, Riska, Taufik Hidayat, and Achmad Fauzi, ‘Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Suatu Kajian Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia)’, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.6 (2022), 657–66
- Hannam, Patricia, and Gert Biesta, ‘Religious Education, a Matter of Understanding? Reflections on the Final Report of the Commission on Religious Education’, *Journal of Beliefs & Values*, 40.1 (2019), 55–63
- Haripin, Muhamad, *Intelijen Dan Keamanan Nasional Di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022)
- Harpviken, K B, and H E Røislien, ‘Faithful Brokers? Potentials and Pitfalls of Religion in Peacemaking’, *Conflict Resolution Quarterly*, 25.3 (2008), 351–373
- Hasan, Muh Abdul, Benedicta Mokal, and Juliana Lumintang, ‘Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah’, *Jurnal Ilmiah Society*, 2.1 (2022)
- Hastings, A, *The Church in Africa, 1450-1950* (Clarendon Press, 1995)
- Haupt, Paul, ‘The Book of Micah’, *The American Journal of Semitic Languages and Literatures*, 27.1 (1910), 1–63
- Hayden, M, ‘The International Baccalaureate (IB) and International Education’, in *The International Baccalaureate Diploma Programme* (Routledge, 2006), pp. 39–58
- Haynes, Jeffrey, ‘Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia’, *Commonwealth & Comparative Politics*, 47.1 (2009), 52–75
- , ‘Religion, Ethnicity and Civil War in Africa: The Cases of Uganda

- and Sudan', *The Round Table*, 96.390 (2007), 305–17
- Hefner, Robert W, 'Islam and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Critical Juncture Analysis', *The Review of Faith & International Affairs*, 18.2 (2020), 1–17
- Hegertun, N H W, 'Faith-Based Mediation?: Sant'Egidio's Peace Efforts in Mozambique and Algeria', 2010
- Heilman, B E, and P J Kaiser, 'Religion, Identity and Politics in Tanzania', *Third World Quarterly*, 23.4 (2002), 691–709
- Helmick, Raymond G, and Rodney Petersen, *Forgiveness & Reconciliation: Public Policy & Conflict Transformation* (Templeton Foundation Press, 2018)
- Henley, David E F, *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930* (Brill, 2021), CCI
- Henne, Peter S, and Jason Klocek, 'Taming the Gods: How Religious Conflict Shapes State Repression', *Journal of Conflict Resolution*, 63.1 (2019), 112–38
- Herbert, Ulrich, 'Europe in High Modernity. Reflections on a Theory of the 20th Century', *Journal of Modern European History*, 5.1 (2007), 5–21
- Holmsen, J, 'Believe It or Not: The New Face of Religion in International Affairs: A Case Study of Sant'Egidio', 2018
- Hooker, Virginia, Elly Kent, and Caroline Turner, *Living Art: Indonesian Artists Engage Politics, Society and History* (ANU Press, 2022)
- Huitt, W, and C Dawson, 'Social Development: Why It Is Important and How to Impact It', *Educational Psychology Interactive*, 20.1 (2011), 80–100
- Hundu, J, 'The Role of Theological Librarians in Fostering Interfaith Dialogue in Nigeria', *Theological Librarianship*, 17.1 (2024), 1–9
- Hussain, N A, 'Religion and Modernity: Gender and Identity Politics in Bangladesh', *Women's Studies International Forum*, 33.4 (2010), 325–333
- Igalla, Malika, Jurian Edelenbos, and Ingmar van Meerkerk, 'What Explains the Performance of Community-Based Initiatives? Testing the Impact of Leadership, Social Capital, Organizational Capacity, and Government Support', *Public Management Review*, 22.4 (2020), 602–32
- Ilo, P, 'Faith-Based Organisations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of the Christian Association of Nigeria (CAN)', *Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective*, 9.2 (2015), 9
- Isola, O O, 'Inter-Faith Conflict Mediation Mechanisms and Peacebuilding in Nigeria', 2014
- Iweze, D, 'The Role of Religious Leaders in Fostering Inter-Faith Dialogue Amid Bokco Haram Insurgency in Kano, Northern Nigeria', *Journal of*

- Central and Eastern European African Studies*, 2.1 (2022)
- Iweze, D O, 'Boko Haram Insurgency, Interfaith Dialogue, and Peacebuilding in Kano: Examining the Kano Covenant', *African Conflict & Peacebuilding Review*, 11.1 (2021), 32–54
- Jah, E A, and D K Mabas, 'Inter-Faith Dialogue, Peace Building and Conflict Transformation in Nigeria', *Wukari International Studies Journal*, 6.2 (2022), 22–22
- Jerome, Lee, and Alex Elwick, 'Teaching about Terrorism, Extremism and Radicalisation: Some Implications for Controversial Issues Pedagogy', *Oxford Review of Education*, 46.2 (2020), 222–37
- Johnston, L E, 'Signposts for an Ethic of Peacemaking: Reading "Gaudium et Spes"', in *In Light of Yves Congar and the Community of Sant'Egidio (Doctoral Dissertation)* (Boston College, 2008)
- Joshi, Deepan, 'The Frontlines of Peace: Peacebuilding and Post-Conflict Reconstruction (Vol 2)' (The InfoLibrary, 2022)
- Kadayifci-Orellana, S Ayse, 'Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution', *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 2009, 264–84
- Kahan, D, 'Recess, Extracurricular Activities, and Active Classrooms: Means for Increasing Elementary School Students' Physical Activity', *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 79.2 (2008), 26–39
- Kalyva, Efrosini, and Ioannis Agaliotis, 'Developing the Social Skills of Students with Disabilities through Peer Tutoring: Implications for Inclusion', *AT Heatherton and VA Walcott, Handbook of Social Interactions in the 21 St Century*, 2009, 193–215
- Kazdin, A E, 'Problem Solving and Parent Management in Treating Aggressive and Antisocial Behavior', 1996
- Kelleher, A, and M Johnson, 'Religious Communities as Peacemakers: A Comparison of Grassroots Peace Processes in Sudan and Northern Ireland', *Civil Wars*, 10.2 (2008), 148–172
- Kennedy, John F, and Dalai Lama, 'Those Who Make Peaceful Revolution Impossible Will Make Violent Revolution Inevitable', 1962
- Kieh Jr, George Klay, 'Civilians and Civil Wars in Africa: The Cases of Liberia, Sierra Leone, and Côte D'Ivoire', *Peace Research*, 2016, 203–28
- Kilonzo, Susan Mbula, 'THE POTENTIAL OF THE CHURCH AS A COMMUNITY INSTITUTION IN PEACEBUILDING IN AFRICA. LESSONS FROM KENYA'S ETHNIC CONFLICTS', *New Europe College Yearbook*, 11, 2011, 241–79
- Kim, Yong Chan, and Titi Susilowati Prabawa, 'Hybrid Internal Migration:

- The Factors Of Migration For Education Among Wana Tribe Community In Central Sulawesi’, *Jurnal Kawistara*, 10.2 (2020), 221–33
- Kimhi, Y, Y Mirsky, and N Bauminger-Zviely, ‘The Role of Theory of Mind, Executive Functions, and Central Coherence in Reading Comprehension for Children with ASD and Typical Development’, *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2024, 1–16
- King Jr, Martin Luther, ‘Nobel Peace Prize Acceptance Speech’, *Online*:<
[Http://Www. Nobelprize.Org/Nobel_prizes/Peace/Laureates/1964/Kingacceptance_en](http://www.Nobelprize.Org/Nobel_prizes/Peace/Laureates/1964/Kingacceptance_en). *Html*>
 Accessed on July, 10 (1964), 2015
- Kloß, Sinah Theres, ‘Giving and Development: Ethno-Religious Identities and ‘Holistic Development’ in Guyana’, in *Faith-Based Organizations in Development Discourses and Practice* (Routledge, 2019), pp. 113–38
- Koser, Khalid, ‘Addressing Internal Displacement in Peace Processes, Peace Agreements and Peace-Building’, *IDP Newsletter*, 2007
- Kovačević, Vlaho, Krunoslav Malenica, and Goran Kardum, ‘Symbolic Interactions in Popular Religion According to Dimensions of Religiosity: A Qualitative Study’, *Societies*, 11.2 (2021), 30
- Krause, Dino, Isak Svensson, and Göran Larsson, ‘Why Is There So Little Shia–Sunni Dialogue? Understanding the Deficit of Intra-Muslim Dialogue and Interreligious Peacemaking’, *Religions*, 10.10 (2019), 567
- Kristimanta, Putri Ariza, ‘Grass-Roots Post-Conflict Peacebuilding: A Case Study of Mosintuwu Women’s School in Poso District, Central Sulawesi, Indonesia’, in *Decolonising Conflicts, Security, Peace, Gender, Environment and Development in the Anthropocene* (Springer, 2021), pp. 569–90
- Kvangraven, Ingrid Harvold, ‘Dependency Theory: Strengths, Weaknesses, and Its Relevance Today’, in *A Modern Guide to Uneven Economic Development* (Edward Elgar Publishing, 2023), pp. 147–70
- Labobar, Kresbinol, ‘The Advantage of Peace Theology towards Exclusive, Inclusive, and Pluralist Theology for Realizing Religious Community in Indonesia’, *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 2.2 (2020), 122–43
- LaFreniere, P J, and L A Sroufe, ‘Profiles of Peer Competence in the Preschool: Interrelations between Measures, Influence of Social Ecology, and Relation to Attachment History’, *Developmental Psychology*, 21.1 (1985), 56
- Lane, K L, F M Gresham, and T E O’Shaughnessy, ‘Serving Students with or At-Risk for Emotional and Behavior Disorders: Future Challenges’, *Education and Treatment of Children*, 2002, 507–521

- Lapidus, I M, *Islamic Societies to the Nineteenth Century: A Global History* (Cambridge University Press, 2012)
- LEARNING, I, ‘Vygotsky and Sociocultural Approaches to Teaching and Learning’, *Handbook of Psychology, Educational Psychology*, 7 (2012), 117
- Lederach, J P, and R S Appleby, ‘Strategic Peacebuilding: An Overview’, in *Strategies of Peace: Transforming Conflict in a Violent World*, 2010, pp. 19–44
- Lennon, P F, *The Experience of Role Conflict in Priest-Therapists* (Duquesne University, 1969)
- Levy, K N, and S J Blatt, ‘Attachment Theory and Psychoanalysis: Further Differentiation within Insecure Attachment Patterns’, *Psychoanalytic Inquiry*, 19.4 (1999), 541–575
- Lifton, Robert Jay, *Losing Reality: On Cults, Cultism, and the Mindset of Political and Religious Zealotry* (The New Press, 2019)
- Lipez-De Castro, Sebastian, ‘Intrastate Armed Conflicts and Government Decentralization: A Cross-National Longitudinal and Panel Data Analysis, 1950-2010’ (State University of New York at Binghamton, 2022)
- Lomperis, Timothy J, ‘Lutheranism and Politics: Martin Luther as a Modernizer, but for the Devil’, *Church, State, and Citizen: Christian Approaches to Political Engagement*, 2009, 35
- Longman, Timothy, ‘Christian Churches in Post-Genocide Rwanda’, *The Healing of Memories: African Christian Responses to Politically Induced Trauma*, 2018, 55
- Loumakis, S, ‘Genocide and Religion in Rwanda in the 1990s’, *The Global Impact of Religious Violence*, 2016, 47–83
- M’Gonigle, R Michael, ‘Ecological Economics and Political Ecology: Towards a Necessary Synthesis’, *Ecological Economics*, 28.1 (1999), 11–26
- Maag, J W, ‘Integrating Consultation into Social Skills Training: Implications for Practice’, *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 3.3 (1992), 233–258
- , ‘Promoting Social Skills Training in Classrooms: Issues for School Counselors’, *The School Counselor*, 42.2 (1994), 100–113
- Madeamin, Sehe, Aziz Thaba, and Abdul Kadir, *DRAMA Teori, Pengajaran, Dan Pementasannya* (Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)
- Magnuson, K, and H Schindler, ‘Supporting Children’s Early Development by Building Caregivers’ Capacities and Skills: A Theoretical Approach Informed by New Neuroscience Research’, *Journal of Family Theory &*

- Review*, 11.1 (2019), 59–78
- Maier, Charles S, ‘The Politics of Productivity: Foundations of American International Economic Policy after World War II’, *International Organization*, 31.4 (1977), 607–33
- Makahekung, Christin, ‘PENDEKATAN TEOLOGI KONTEKSTUAL DALAM MENCIPTAKAN DIALOG ANTAR AGAMA’, *SHAMAYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3.1 (2024), 40–48
- Malecki, C K, and S N Elliot, ‘Children’s Social Behaviors as Predictors of Academic Achievement: A Longitudinal Analysis’, *School Psychology Quarterly*, 17.1 (2002), 1
- Malik, Huma Akhtar, and Fizana Ashraf Malik, ‘Emile Durkheim Contributions to Sociology’, *Sociology*, 6.2 (2022), 7–10
- Malik, I H, ‘Islamic Discourse on Jihad, War and Violence’, *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 21.4 (1998), 47
- Malik, S, S Joychan, J Zajac, S Sinisgalli, and L Namerow, ‘Using an Attachment-Informed Framework in the Clinical Care of Children and Adolescents: A Review of Attachment Theory and Its Impact on Developmental Psychopathology’, *Psychiatric Annals*, 51.7 (2021), 300–315
- Malone, J C, S R Liu, G E Vaillant, D M Rentz, and R J Waldinger, ‘Midlife Eriksonian Psychosocial Development: Setting the Stage for Late-Life Cognitive and Emotional Health’, *Developmental Psychology*, 52.3 (2016), 496
- Marchetti, Raffaele, and Nathalie Tocci, ‘Conflict Society: Understanding the Role of Civil Society in Conflict’, in *Conflict Society and Peacebuilding* (Routledge India, 2020), pp. 11–40
- Markiewicz, Sarah L, ‘Preaching to the Converted? Interfaith Dialogue vs. Interfaith Realities’, *Emergent Religious Pluralisms*, 2019, 251–78
- Mashuri, Saepudin, Sagaf S Pettalongi, Nurdin Nurdin, Paozia Paozia, and Yusran Yusran, ‘Schools Strategies in Countering Religious Radicalism in Post-Conflict Community in Poso Regency Central Sulawesi, Indonesia’, *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4.1 (2022), 9–20
- Matakena, Fransina, Tonny Donald Pariela, and Yurnie Darakay, ‘Kosmologi Negeri Dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau: Upaya Pengelolaan Konflik Dan Damai Keberlanjutan’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13.1 (2024), 191–201
- McElreath, Richard, and Jeremy Koster, ‘17 The End of Human Behavioral Ecology’, *Human Behavioral Ecology*, 92 (2024), 402
- Mejia, Robert, Kay Beckermann, and Curtis Sullivan, ‘White Lies: A Racial

- History of the (Post) Truth’, *Communication and Critical/Cultural Studies*, 15.2 (2018), 109–26
- Melnyk, Iryna, Larysa Holoivukh, Diana Kalishchuk, and Iryna Levchuk, ‘Verbal Markers of the Concept of Peace: Psycholinguistic and Lexical Analyses’, 2020
- Midgley, James, ‘Diffusion and the Development of Social Policy: Evidence from the Third World’, *Journal of Social Policy*, 13.2 (1984), 167–84
- , ‘Growth, Redistribution, and Welfare: Toward Social Investment’, *Social Service Review*, 73.1 (1999), 3–21
- , ‘Social Investment: Concepts, Uses and Theoretical Perspectives’, in *Social Investment and Social Welfare* (Edward Elgar Publishing, 2017), pp. 13–32
- , ‘The Theory and Practice of Developmental Social Work’, *Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work*, 2010, 3–28
- , ‘Welfare and Social Development’, *The SAGE Handbook of Social Work*, 2012, 94–107
- Midgley, James, and Christian Aspalter, ‘Developmental Social Policy: Theory and Implementation’, in *Development and Social Policy* (Routledge, 2016), pp. 44–72
- Midgley, James E, and Leverett Davis Jr, ‘Calculation by a Moment Technique of the Perturbation of the Geomagnetic Field by the Solar Wind’, *Journal of Geophysical Research*, 68.18 (1963), 5111–23
- Midgley, James O, ‘Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare’, 1995
- Mlakuzhyil, George, ‘Jesus Christ in the Gospels’, in *Christianity* (Springer, 2024), pp. 498–510
- Mol, Hans, ‘Religion and Identity A Dialectic Interpretation of Religious Phenomena’, *Australian Association for the Study of Religions Book Series*, 2022, 16
- Mortimore, T, and A Zsolnai, ‘Inclusive Education and Social Competence Development’, in *Unpublished Academic Paper* (Hungary: Faculty of Arts, Institute of Education, University of Szeged, 2015)
- Mukhammadsidiqov, Mukhammadolim, ‘The Importance of Regulating the Relationship between the State and Religion in Ensuring the Stability of Society’, *The Light of Islam*, 2020.2 (2020), 12–17
- Müller, E, L H Naples, L Cannon, B Haffner, and A Mullins, ‘Using Integrated Arts Programming to Facilitate Social and Emotional Learning in Young Children with Social Cognition Challenges’, *Early Child Development and Care*, 2019

- Murray, Alan V, 'National Identity, Language and Conflict in the Crusades to the Holy Land, 1096–1192', in *The Crusades and the Near East* (Routledge, 2010), pp. 123–46
- Nabukeera, M S, 'The Role Of A Teacher In Developing And Implementing A Holistic Model In Youth Personality Development At Higher Education', 2018
- Neliwati, Neliwati, Samsu Rizal, and Hemawati Hemawati, 'Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat', *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9.1 (2022), 32–43
- Nicolle, D, *The Great Islamic Conquests AD 632–750* (Bloomsbury Publishing, 2012)
- Norris, J A, 'Looking at Classroom Management through a Social and Emotional Learning Lens', *Theory into Practice*, 42.4 (2003), 313–318
- Nur, Muhammad, 'Kearifan Lokal Sintuwu Maroso Sebagai Simbol Moderasi Beragama', *Pusaka*, 8.2 (2020), 241–52
- Nuraini, Atikah, 'Mencari Titik Temu Antara Pendidikan HAM Dan Transformasi Konflik: Refleksi Pengalaman Dari Lapangan', *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15.1 (2022), 20–43
- Nweke, P C, 'Religious Peacebuilding in Nigeria', in *Religion in War and Peace in Africa* (Routledge, 2020), pp. 16–23
- Oberman, I, *Challenged Schools, Remarkable Results: Three Lessons from California's Highest Achieving High Schools. A Report on Findings from Year Two of the California Best Practices Study Conducted by Springboard Schools* (Springboard Schools, 2005)
- Oberschall, Anthony, *Conflict and Peace Building in Divided Societies: Responses to Ethnic Violence* (Routledge, 2007)
- Obi, Ndifon Neji, 'Civil Society Organisations and Peacebuilding: A Functional Perspective', *International Journal of Social Sciences and Management Research*, 4.6 (2018), 24–39
- Ojo, M A, and F T Lateju, 'Christian–Muslim Conflicts and Interfaith Bridge-building Efforts in Nigeria', *The Review of Faith & International Affairs*, 8.1 (2010), 31–38
- Olowo, A F, 'A Discourse on Inter-Religion Tension in a Pluralized Nigeria: Examining the Role of Interfaith Dialogue as a Panacea', 2021
- Osaretin, I, and E Akov, 'Ethno-Religious Conflict and Peace Building in Nigeria: The Case of Jos, Plateau State', *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2.1 (2013), 349–360
- Osher, D, J Sprague, R P Weissberg, J Axelrod, S Keenan, K Kendziora, and others, 'A Comprehensive Approach to Promoting Social, Emotional, and

- Academic Growth in Contemporary Schools’, *Best Practices in School Psychology*, 4 (2008), 1263–1278
- Paiva, Paula Cristina Pelli, Haroldo Neves de Paiva, Paulo Messias de Oliveira Filho, Joel Alves Lamounier, Efigênia Ferreira e Ferreira, Raquel Conceição Ferreira, and others, ‘Development and Validation of a Social Capital Questionnaire for Adolescent Students (SCQ-AS)’, *PloS One*, 9.8 (2014), e103785
- Pamungkas, Cahyo, and Devi Tri Indriasari, ‘Preventing Religious Conflict in Papua Land: Adopting Cultural Traditions of Peacebuilding.’, *Asian Journal of Peacebuilding*, 9.2 (2021)
- Paramitha, Devy Indah, and Intan Kinanti Damarin Tyas, ‘Socialization of Social Media as a Means of Building Peace Culture among the Z-Generation in Samarinda City’, *Community Empowerment*, 7.10 (2022), 1716–22
- Pathak, Pathik, ‘Ethopolitics and the Financial Citizen’, *The Sociological Review*, 62.1 (2014), 90–116
- Piereder, J, ‘The Imam and the Pastor: Attempts at Peace in Nigeria Using Interfaith Dialogue’, *Laurier Undergraduate Journal of the Arts*, 1.1 (2014), 71–85
- Pikahulan, Muis S A, ‘Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Toleransi Dan Moderasi Beragama Di Kota Ambon’, *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 9.1 (2023), 74–87
- Pinaud, Margaux, ‘Home-Grown Peace: Civil Society Roles in Ceasefire Monitoring’, *International Peacekeeping*, 28.3 (2021), 470–95
- Pisoiu, Daniela, Andreas Zick, Fabian Srowig, Viktoria Roth, and Katharina Seewald, ‘Factors of Individual Radicalization into Extremism, Violence and Terror—the German Contribution in a Context’, *International Journal of Conflict and Violence (IJCIV)*, 14 (2020), 1–13
- Posada-Téllez, A, *Making Peace with God: What Place for Religion in United Nations Mediation?* (International Peacekeeping, 2024)
- di Poso, Berperspektif Adil Gender, ‘Tim Rencana Aksi Damai (RAD) Perempuan Untuk Perdamaian Poso’
- Prince-Embury, S, D H Saklofske, and A K Vesely, ‘Measures of Resiliency’, in *Measures of Personality and Social Psychological Constructs* (Academic Press, 2015), pp. 290–321
- Pulubuhu, Dwia Aries Tina, A T Muhammad Ramli, Andi Ahmad Yani, Muhammad Arsyad, Amril Hans, and Sitti Halwatiah, ‘Social Trust of Indonesia’s Post Conflict Society: A Case Study of Poso Regency’, *CCER*, 2019, 276
- Puspitasari, Ni Wayan Radita Novi, ‘Solidarity as a Theory: The Development

- of the Concept', *Социология*, 2, 2020, 367–75
- Putra, Muh Aidil, 'Conflict, Peace, and Sustainable Development Case Study: The Dichotomy of Abdul Latif Forest Park, Sinjai Regency', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 24.02 (2023), 1–12
- Putranti, Basilica D, and Y Tri Subagya, 'JERAT BANTUAN, JERIT PENGUNGSI'
- Al Qurtuby, Sumanto, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas* (Routledge, 2016)
- Raharjo, W A, 'Ethical Issues in Religiously Affiliated Disputes: Sant'Egidio's Mediation in Mozambique and Algeria', *Politics and Humanism*, 1.2 (2022), 52–65
- Ranger, Terence O, 'Religious Movements and Politics in Sub-Saharan Africa', *African Studies Review*, 29.2 (1986), 1–70
- Reaves, S, S N Hartley, B Clarke, S Hoover, and N Lever, 'The Need for Performance Standards in Preschools: Stealing Shamelessly from Comprehensive School Mental Health Literature', *Perspectives on Early Childhood Psychology and Education*, 6.2 (2022), 9
- Riddell, P G, and P Cotterell, *Islam in Context: Past, Present, and Future* (Baker Books, 2003)
- Riley-Smith, Jonathan, 'History, the Crusades and the Latin East, 1095–1204: A Personal View', in *Crusaders and Muslims in Twelfth-Century Syria* (Brill, 1993), pp. 1–17
- , *The Oxford History of the Crusades* (Oxford University Press, USA, 2002)
- Risser, David T, 'The Social Dimension of Moral Responsibility: Taking Organizations Seriously', *Journal of Social Philosophy*, 27.1 (1996), 189–207
- Riyani, Mufti, Wasino Wasino, Suyahmo Suyahmo, Nugroho Trisnu Brata, and Fitri Amalia Shintasiwi, 'Making Peace with the Past: Peace Education in Post-Conflict Societies Through the Application of Cognitive Behavioral Therapy', *Journal of Social Studies Education Research*, 12.2 (2021), 330–76
- Roald, A S, and L Tønnessen, *Discrimination in the Name of Religious Freedom: The Rights of Women and Non-Muslims after the Comprehensive Peace Agreement in Sudan* (Chr. Michelsen Institute, 2007)
- Roberson, B A, 'The Shaping of the Current Islamic Reformation', *Mediterranean Politics*, 7.3 (2002), 1–19
- Rocca, R M, 'Sant'egidio's Diplomacy in Crisis Areas', in *Italy's Foreign Policy in the Twenty-First Century* (Routledge, 2014), pp. 130–147

- Rostow, Walt Whitman, *Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present: With a Perspective on the next Century* (Oxford University Press, 1992)
- Ruagadi, Henry Anderson, Nursinah Nursinah, Nurfhin Ilma Bunga, Joice Noviana Pelima, and Silvany A Taariwuan, 'Social Harmony in Plural Society (Study of Social Integration Post Poso Conflict)', *International Journal of Health Sciences*, 2.2 (2024), 767–82
- Rugar, Don, 'Role of Religious Organizations in Conflict and Peacebuilding in Sub-Saharan Africa: A Case Study of the Catholic Church and the Islamic Religion.' (University of Nairobi, 2020)
- Rutagambwa, Ildephonse, 'Religious Organizations on Unity and Reconciliation Program in Post-Genocide Rwanda. Case of Igitu Cy'Umuvumu Association' (University of Rwanda, 2021)
- Ryan, A M, and H Patrick, 'The Classroom Social Environment and Changes in Adolescents' Motivation and Engagement during Middle School', *American Educational Research Journal*, 38.2 (2001), 437–460
- Saith, Ashwani, 'Development on the Periphery: Exit and Exile', in *Cambridge Economics in the Post-Keynesian Era: The Eclipse of Heterodox Traditions* (Springer, 2022), pp. 765–843
- Saleh, M.U.S.A., 'Influence of Interfaith Mediation Centre in the Management of Conflict in Bauchi State Nigeria: 1960-2015', 2020
- Saleh, M, 'Interfaith Mediation Centre in Promoting Peace in Bauchi State, Nigeria', *African Social Science and Humanities Journal*, 3.4 (2022), 182–192
- Saleh, Musa, 'Role of Interfaith Mediation Centre in Managing Conflict between Farmers and Herdsmen in Bauchi State, Nigeria', *Journal of African History, Culture and Arts*, 2.2 (2022), 110–23
- Samoei, Philemon Kipkogei, 'The Role Of Religious Organizations In Electoral Conflicts In The Horn of Africa Region: A Case Study Of NCKK In Kenya's 2017 Election' (University of Nairobi, 2018)
- Sandal, Nukhet, 'Post-Conflict Processes and Religion: An Overview', *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2019
- Sangren, P S, 'Anthropology and Identity Politics in Taiwan: The Relevance of Local Religion', in *Religion and the Formation of Taiwanese Identities* (New York: Palgrave Macmillan US, 2003), pp. 253–287
- Sawhill, Isabel V, 'Social Capital: Why We Need It and How We Can Create More of It', *Brookings Institution*, 2020
- Scales, P C, 'Building Students' Developmental Assets to Promote Health and School Success', *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 74.2 (2000), 84–88

- Schonert-Reichl, K A, 'Social and Emotional Learning and Teachers', *The Future of Children*, 2017, 137–155
- Seikanto, Soerjono, 'Sosiologi Suatu Pengantar', *Cet*, 45 (2013)
- Seligman, S, and R S Shanok, 'Subjectivity, Complexity and the Social World Erikson's Identity Concept and Contemporary Relational Theories', *Psychoanalytic Dialogues*, 5.4 (1995), 537–565
- Setiawan, Tery, *Support for Interreligious Conflict in Indonesia* (Lit, 2020), XIV
- Seto, Michael C, Nicole C Rodrigues, Elke Ham, Bonnie Kirsh, and N Zoe Hilton, 'Post-Traumatic Stress Disorder, Depression, Anxiety Symptoms and Help Seeking in Psychiatric Staff: Trouble de Stress Post-Traumatique, Dépression, Symptômes d'anxiété et Recherche d'aide Chez Le Personnel Psychiatrique', *The Canadian Journal of Psychiatry*, 65.8 (2020), 577–83
- Shah, Hemant, 'Race, Mass Communication, and Modernization: Intellectual Networks and the Flow of Ideas', in *Anti-Racism and Multiculturalism* (Routledge, 2017), pp. 21–54
- Shapiro, Daniel L, 'Reconciliation Systems Design: A Systematic Approach to Collective Healing in Post-Conflict Societies', *Harv. Negot. L. Rev.*, 26 (2020), 193
- Sharma, Aashna, and Gurparkash Singh, 'Conceptualizing Corporate Social Responsibility Practice: An Integration of Obligation and Opportunity', *Social Responsibility Journal*, 18.8 (2022), 1393–1408
- Silvestri, Sara, and James Mayall, 'The Role of Religion in Conflict and Peacebuilding' (British Academy, 2015)
- Simangan, Dahlia, 'A Case for a Normative Local Involvement in Post-Conflict Peacebuilding', *International Peacekeeping*, 27.1 (2020), 77–101
- Simon, Richard M, 'The Conflict Paradigm in Sociology and the Study of Social Inequality: Paradox and Possibility', *Theory in Action*, 9.1 (2016), 1
- Simone, C, 'Italy and the Community of Sant'Egidio in the 1990s. 'Coopetition' in Post-Cold War Italian Foreign Policy?', 2017
- Sirait, Junio Richson, and Hestyn Natal Istinatun, 'Akseptasi Teologi Pada Kerukunan Umat Islam Dan Kristen Di Indonesia', *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5.2 (2022), 79–86
- Siregar, Iskandarsyah, 'The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review', *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2.1 (2022), 9–16
- Sisic, Tajda, 'Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: A Qualitative Study

- on Local's Perception on the Reconciliation Process in Zenica', 2020
- Smelser, Neil J, and Seymour Martin Lipset, 'Social Structure, Mobility and Development', in *Social Structure and Mobility in Economic Development* (Routledge, 2018), pp. 1–50
- Smith, T K, F Connolly, and C Pryseski, *Positive School Climate: What It Looks like and How It Happens. Nurturing Positive School Climate for Student Learning and Professional Growth* (Baltimore Education Research Consortium, 2014)
- Smock, David R, *Religious Contributions to Peacemaking: When Religion Brings Peace, Not War* (US Institute of Peace, 2006), LV
- Snook, Daniel W, Ari D Fodeman, John G Horgan, and Kevin M Swartout, 'Dominant Predictors of Violent versus Non-Violent Terrorist Roles among US Muslim Converts', *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 2022, 1–21
- Soares, Francisco, and I Ketut Sudarsana, 'Religious Harmony Among Senior High School Students Multicultural Education Case Study in the Cova-Lima District of East Timor', *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 2.1 (2018), 154–62
- Song, I S, and J Hattie, 'Home Environment, Self-Concept, and Academic Achievement: A Causal Modeling Approach', *Journal of Educational Psychology*, 76.6 (1984)
- Song, Q, and Q Wang, 'Mother–Child Reminiscing about Peer Experiences and Children's Peer-related Self-views and Social Competence', *Social Development*, 22.2 (2013), 280–299
- Soni, Vidu, 'Chapter II "Public Administration" to "Good Governance" in Developing Countries: The Evolution of a Sub-Field in Political Science', *Governing Development across Cultures: Challenges and Dilemmas of an Emerging Sub-Discipline in Political Science*, 2006, 67
- Sorell, G T, and M J Montgomery, 'Feminist Perspectives on Erikson's Theory: Their Relevance for Contemporary Identity Development Research', *Identity: An International Journal of Theory and Research*, 1.2 (2001), 97–128
- Sroufe, L A, 'Attachment and Development: A Prospective, Longitudinal Study from Birth to Adulthood', *Attachment & Human Development*, 7.4 (2005), 349–367
- Sroufe, L A, B.Y.R.O.N. Egeland, E.L.I.Z.A.B.E.T.H. Carlson, W A Collins, K E Grossmann, K Grossmann, and others, 'Placing Early Attachment Experiences in Developmental Context', in *Attachment from Infancy to Adulthood: The Major Longitudinal Studies*, 2005, pp. 48–70
- Stensvold, A, I Vik, and C., 'Religious Peacemakers on the International

- Scene: Hopes and Motivations’, *People Building Peace II: Successful Stories of Civil Society*, 16.3 (2018), 9–22 ,
- Sudaryanto, Sudaryanto, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Perspektif Filsafat Pendidikan Bahasa)’, *Lateralisasi*, 8.2 (2020), 92–99
- Suharjo, Dwi, Muhammad Nur Ali, and Hasbullah Hasbullah, ‘Strategy for Handling Conflict Resolution Through a Territorial Development Approach’, *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 3.1 (2024), 185–98
- Suhl, Mary A, ‘Grassroots Intellectualism:" International Youth Meeting Dachau" as a Case Study for Holocaust Education and Awareness through Para-Educational Activities’, 2013
- Sukabdi, Zora Arfina, ‘Terrorism Risk Assessment to Children: A Study in Poso’, *Journal of Psychology and Behavior Studies*, 1.1 (2021), 47–64
- Supratikno, Agus, ‘Reinforcing Indonesian National Identity Based on Inclusiveness of Pancasila as a Way to Deal with the Identity Politics in Indonesia’, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9.6 (2022), 407–17
- Suwarno, Peter, ‘Resolving Religious Conflicts through Expanding Inter-Religious Communication: Issues and Challenges’, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 43.2 (2005), 309–25
- Svensson, Isak, *Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars* (University of Queensland Press (Australia), 2012)
- Syafa’ati, Sri, and Hidayatul Muamanah, ‘Konsep Pendidikan Menurut Muhammad Naquib Al-Attas Dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Nasional’, *Palapa*, 8.2 (2020), 285–301
- SYAHRIN, ALPI, ‘PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBIMBING KEGIATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN REMAJA DI DESA TANJUNG SARANG ELANG KECAMATAN PANAI HULU’ (Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023)
- Syaikhon, Muhammad, ‘Toleransi Dalam Keluarga Multi Agama (Kajian Pendidikan Islam Multikultural Di Desa Laban Menganti Gresik)’, 2022
- Syed, M, and K C McLean, ‘Erikson’s Theory of Psychosocial Development’, 2017
- Taji-Farouki, S, and B M Nafi, *Islamic Thought in the Twentieth Century* (London: I, 2004)
- Takdir, Mohammad, M Mushthafa, and A S Rozinah, ‘The Dynamics of Religious Conflict in Indonesia: Contestation and Resolution of Religious

- Conflicts in The New Order Age’, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2.2 (2021), 103–21
- TAMPUDU, SELFINCE, ‘PERAN MENSEN MET EEN MISSIE MELALUI SEKOLAH PEREMPUAN TERHADAP UPAYA BINA DAMAI DI KABUPATEN POSO’ (UNIVERSITAS BOSOWA, 2021)
- Taufikin, Taufikin, Nurul Huda, Siti Zuhaidah Alfatonina, Novyana Kurniasari, Mayasari Widianingsih, and Leidy Barirothun Ni’mah, ‘Praktik Kewirausahaan Di Madrasah Ibtida’iyah Negeri 1 Kota Bandung’, *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.32332/elementary.v8i1.4590>>
- Tayob, A, *Islamic Resurgence in South Africa: The Muslim Youth Movement* (Juta and Company Ltd, 1995)
- Tenaw, Aemro, ‘The Role of Religious Institutions for Conflict Management: Experience of National Council of Churches of Kenya’, *International Journal of Humanities, Art and Social Studies (IJHAS)*, 3.1 (2018)
- Titz, Alexandra, Terry Cannon, and Fred Krüger, ‘Uncovering “Community”’: Challenging an Elusive Concept in Development and Disaster Related Work’, *Societies*, 8.3 (2018), 71
- Tomory, I, ‘Cooperative Methods and Development of Social Competence in Training of Technical Teachers’, *Int. J. Eng. Pedagog*, 10.5 (2020), 49–61
- Tressa, Roma, ‘Policy Network Dalam Kebijakan Kontra Radikalisme Di Kabupaten Poso’, *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11.1 (2020), 30–42
- Trihartono, Agus, and Nino Viartasiwi, ‘Engaging the Quiet Mission: Civil Society in Breaking the Cycle of Violence in the Post-Conflict Poso, Indonesia’, *Procedia Environmental Sciences*, 28 (2015), 115–23
- Tudge, J R, and P A Winterhoff, ‘Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the Relations between the Social World and Cognitive Development’, *Human Development*, 36.2 (1993), 61–81
- Turohmah, Lidya Khofifah, Acep Nurlaeli, and Abdul Kosim, ‘PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI’, *PeTeKa*, 6.4 (2023), 699–707
- Tyerman, Christopher, *England and the Crusades, 1095-1588* (University of Chicago Press, 1996)
- Uka, E M, ‘Ethnic, Religious and Communal Conflict in Nigeria: Implications for Security’, *Bassey Andah Journal*, 1.1 (2008), 1–17
- Uksan, Arifuddin, *Pendidikan Perdamaian: Confidence Building Measures Dampak Konflik Poso* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2024)
- Vance, Michael James, *Examination of the Relationship between Specific*

- Classes of Social Skill Behaviors and Academic Competence on the Social Skills Improvement System Rating-Scales* (Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, 2012)
- Velásquez, Mauricio, Nikolai Ávila, Mónica Villota, Francisco Quintero, and Sebastián Arbeláez, 'Largely on Their Own: Dealing with the Rural Legacies of Conflict through Local Participatory Peacebuilding', *Journal of Agrarian Change*, 21.2 (2021), 313–31
- Verkuyten, Maykel, Kumar Yogeeswaran, and Levi Adelman, 'Intergroup Toleration and Its Implications for Culturally Diverse Societies', *Social Issues and Policy Review*, 13.1 (2019), 5–35
- Vieten, C, and D Lukoff, 'Spiritual and Religious Competencies in Psychology.', *American Psychologist*, 2022
- Voll, J O, *From Saints and Renewers to Mahdi s and Proto-Nationalists* (The Wiley Blackwell History of Islam, 2018)
- Wafula, NYONGESA MICHAEL, 'The Role of the Church in Promoting Reconciliation in 2008-2013 Post-Election Violence Kenya', *Unpublished Thesis*. University of Nairobi, Kenya, 2014
- Wang, M C, G D Haertel, and H J Walberg, 'Fostering Educational Resilience in Inner-City Schools', *Publication Series*, 4, 1997
- Watch, Human Rights, *Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi* (Human Rights Watch, 2002), xiv
- Weller, P, 'Identity, Politics, and the Future (s) of Religion in the UK: The Case of the Religion Questions in the 2001 Decennial Census', *Journal of Contemporary Religion*, 19.1 (2004), 3–21
- Welsh, R O, 'Overlooked Exclusionary Discipline: Examining Placement in Alternative Schools, Expulsions, and Referrals to Hearing in an Urban District', *Educational Policy*, 36.3 (2022), 550–586
- Wentzel, K R, 'Does Being Good Make the Grade? Social Behavior and Academic Competence in Middle School', *Journal of Educational Psychology*, 85.2 (1993), 357
- Widmer, Jocelyn, *Investing in Young Children for Peaceful Societies: Proceedings of a Joint Workshop by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; UNICEF; and the King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue* (National Academies Press, 2016)
- Williams White, S, K Keonig, and L Scahill, 'Social Skills Development in Children with Autism Spectrum Disorders: A Review of the Intervention Research', *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37 (2007), 1858–1868
- Worthington, Everett, and Juan Manuel Jimenez Robles, 'Forgiveness,

- Reconciliation and Hope in Trauma Healing’, *Revista d’Humanitats*, 2022
- Yakobus, I Ketut, and S Th, *Budaya Sintuwu Maroso Dan Rekonsiliasi Konflik Poso* (Feniks Muda Sejahtera, 2023)
- Yakobus, I Ketut, Muhamad Yahya, and Andi Dodi May Putra Agustang, ‘Revitalisasi Nilai Budaya Sintuwu Maroso Sebagai Alternative Resolusi Pasca Konflik Di Kabupaten Poso’, *Jurnal Sosio Sains*, 5.1 (2019), 14–21
- Yaqin, M A, S E Indriwati, and H Susilo, ‘Think-Pair-Square Learning: Improving Student’s Collaborative Skills and Cognitive Learning Outcome on Animal Diversity Course’, *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 4.2 (2018), 135–142
- Yunanto, Sri, and Angel Damayanti, ‘Religion and Power: Comparing Political Landscape in the Religious Conflicts in Poso and Maluku’, *Advances in Politics and Economics*, 5.1 (2021), 99–114
- Zandt, Maria, *SITUATION OF CHRISTIANS IN SUB-SAHARAN AFRICA*. (JSTOR, 2022)
- Zins, J E, M R Bloodworth, R P Weissberg, and H J Walberg, ‘The Scientific Base Linking Social and Emotional Learning to School Success’, *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 17.2–3 (2007), 191–210

Buku ini hadir sebagai sumbangan pemikiran dalam memahami peran agama dalam proses pemulihan pasca-konflik. Dalam konteks global yang semakin kompleks, konflik sosial yang bersifat agama menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian serius. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara agama, konflik, dan pembangunan sosial, diharapkan pembaca dapat menangkap esensi peran agama sebagai jembatan perdamaian dalam masyarakat yang beragama.



Gunung Djati Publishing

Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung
Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

ISBN 978-623-5485-90-4 (PDF)

